



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Sibolga Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Sibolga dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan



Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemko Sibolga Tahun Anggaran 2022 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat), informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemko Sibolga pada Tahun Anggaran 2022.

Laporan keuangan Pemko Sibolga menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.



## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga (Pemko Sibolga) tahun 2022, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 574);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 09 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan walikota Nomor 900/10/ Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Sibolga;
27. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**  
Berisi informasi kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**  
Berisi informasi ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Kebijakan Akuntansi**  
Berisi informasi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**  
Berisi informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.**  
Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup**  
Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. EKONOMI MAKRO**

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, di samping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa APBD Kota Sibolga Tahun 2022 telah menerapkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, di mana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi perekonomian nasional yang tengah berkembang. Walaupun secara riil kondisi tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan aktifitas yang sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB akan menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil dari proses faktor-faktor produksi tersebut.

PDRB Kota Sibolga atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dari tahun 2018 – 2022 diuraikan pada tabel dibawah berikut:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 2. 1 PDRB Kota Sibolga atas dasar harga berlaku Tahun 2018 – 2022**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.067,80	1.119,82	1.130,47	1096,49	1.179,67
B	Pertambangan dan Penggalian	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14
C	Industri Pengolahan	232,71	252,78	260,46	288,55	321,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,79	5,23	5,47	5,71	6,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,85	16,07	16,54	16,61	17,46
F	Konstruksi	643,55	699,85	676,48	713,60	772,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.235,61	1.410,57	1.452,13	1.539,08	1.727,09
H	Transportasi dan Pergudangan	453,68	498,89	488,46	519,42	589,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	256,88	279,14	278,37	280,22	310,19
J	Informasi dan Komunikasi	57,29	63,85	69,22	75,39	81,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	128,18	134,58	136,70	150,26	168,62
L	Real Estate	240,34	264,23	278,76	288,18	306,42
M,N	Jasa Perusahaan	26,86	30,38	31,16	31,73	36,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	410,16	438,32	453,54	452,07	457,65
P	Jasa Pendidikan	208,61	228,17	235,98	246,62	265,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,66	70,86	72,96	72,81	79,12
R,S,T,U	Jasa Lainnya	17,82	18,67	18,62	19,24	21,70
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5.063,94</b>	<b>5.531,54</b>	<b>5.605,47</b>	<b>5.796,11</b>	<b>6.340,37</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Tahun 2023

Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor akan menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing sektor tersebut. Distribusi masing-masing sektor dalam struktur ekonomi Kota Sibolga sampai dengan tahun 2022, atas dasar harga berlaku, dapat digambarkan pada tabel berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 2. 2 Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kota Sibolga Tahun 2018-2022**

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,09	20,24	20,17	18,92	18,61
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	4,60	4,57	4,65	4,98	5,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28
F	Konstruksi	12,71	12,65	12,07	12,31	12,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,40	25,50	25,91	26,55	27,24
H	Transportasi dan Pergudangan	8,98	9,02	8,71	8,96	9,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	5,07	5,05	4,97	4,83	4,89
J	Informasi dan Komunikasi	1,13	1,15	1,23	1,30	1,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,53	2,43	2,44	2,59	2,66
L	Real Estate	4,75	4,78	4,97	4,97	4,83
M,N	Jasa Perusahaan	0,53	0,55	0,56	0,55	0,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,10	7,92	8,09	7,80	7,22
P	Jasa Pendidikan	4,10	4,12	4,21	4,25	4,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,28	1,30	1,26	1,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Tahun 2023

Data di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Sibolga pada tahun 2022 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

**Tabel 2.3 Persentase pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas (rupiah) di Kota Sibolga, 2021 dan 2022.**

Kelompok Komoditas	2021	2022
<b>Makanan</b>		
Padi-padian	5,93	5,15
Umbi-umbian	0,23	0,27
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	6,91	6,44
Daging	0,96	0,94
Telur dan Susu	3,07	2,55
Sayur-sayuran	3,65	3,58
Kacang-kacangan	0,47	0,43
Buah-buahan	2,46	2,54
Minyak dan Kelapa	1,35	1,30
Bahan Minuman	0,85	0,71
Bumbu-bumbuan	0,50	0,43
Konsumsi lainnya	0,44	0,39
Makanan dan minuman jadi	22,83	19,00
Rokok	8,93	7,23
<b>Jumlah Makanan</b>	<b>58,60</b>	<b>50,97</b>
<b>Bukan Makanan</b>		
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	27,12	18,75
Aneka Komoditas dan Jasa	12,72	12,12
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	0,98	2,82
Komoditas Tahan lama	0,24	6,06



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>Kelompok Komoditas</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pajak, Pungutan dan Asuransi	0,07	4,08
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	0,27	5,21
<b>Jumlah Bukan Makanan</b>	<b>41,40</b>	<b>49,03</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Tahun 2023

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pemberian, pembelia maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Dari tabel 2.3 diatas terlihat bahwa pengeluaran perkapita sebulan penduduk kota sibolga untuk makanan sebesar 50,97% lebih rendah dari Tahun 2021 yang mencapai 56,60%.

Untuk pengeluaran bukan makanan pada Tahun 2022 sebesar 49,03% meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 41,40% Pada Tahun 2022 laju inflasi umum Kota Sibolga bulan Januari merupakan yang terbesar dalam setahun. Penyumbang inflasi terbesar ada pada komunitas makanan, minuman, tembakau sebesar 3,07%. Diikuti oleh komoditas rekreasi, olahraga dan budaya 2,06%.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah khususnya bidang ekonomi yang secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah.

**Tabel 2. 4 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga Tahun 2018-2022**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
1.	2018	5,25
2.	2019	5,20
3.	2020	-1,36
4.	2021	2,10
5.	2022	4,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, kondisi perekonomian di Kota Sibolga pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,15% bila dibandingkan dengan kondisi perekonomian tahun 2021 sebesar 2,10%. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2018 – 2022 di Kota Sibolga selama 5 tahun terakhir fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2018.



## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Sibolga difokuskan pada upaya untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian. Dalam kaitan pengendalian untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik telah dilakukan dan digunakan sebagaimana mestinya, dilakukan evaluasi yang terus-menerus terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pengawasan dari semua lapisan masyarakat dan khususnya dari DPRD mutlak diperlukan. Sehingga dengan demikian otonomi daerah dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka implementasi Visi Kota Sibolga **“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR”**, adalah:

1. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien.
2. Anggaran Daerah yang memperhatikan fungsi dan prioritas.
3. Anggaran Daerah yang bertumpu pada kepentingan publik.
4. Anggaran Daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.
5. Anggaran Daerah yang transparan dan akuntabel.
6. Anggaran Daerah yang mengutamakan pencapaian target kinerja.
7. Anggaran Daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
8. Anggaran Daerah yang mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi.
9. Anggaran Daerah yang dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Sesuai dengan potensi sektor unggulan pengembangan ekonomi dan investasi daerah, maka untuk memantapkan kemandirian pembiayaan Pemko Sibolga yang dinamis dan bertanggung jawab, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan



profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga program-program yang dilaksanakan tidak menghambat pertumbuhan usaha karena ekonomi biaya tinggi serta menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2022 diupayakan lebih mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Namun dalam mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati – hati. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah secara optimal dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Pemko Sibolga telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat.

Pemko Sibolga melakukan kegiatan Intensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Sedangkan dari segi Ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat. Adapun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah diatur dalam PERDA Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel dikenakan besaran tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran dikenakan besaran tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan, meliputi beberapa kategori dengan besaran tarifnya sebagai berikut:

- Pagelaran kesenian dan musik tradisional daerah tidak dikenakan Pajak Hiburan.
- Pagelaran kesenian, musik/tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, yang bersifat lokal daerah, dikenakan pajak 5% (lima persen).



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- Sirkus, acrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 7% (tujuh persen).
  - Tontonan film dan pameran dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
  - Pertandingan olahraga, pusat kebugaran/fitnes dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
  - Permainan ketangkasan, bilyar, video game, permainan game melalui internet dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
  - Balapan kendaraan bermotor dan sejenisnya dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).
  - Pagelaran musik yang menghadirkan pemusik dan/atau artis dari luar daerah dikenakan pajak 20% (dua puluh persen).
  - Panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - Diskotik, klab malam, karaoke, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- d. Pajak Reklame  
Pajak Reklame ditetapkan besaran tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- e. Pajak Penerangan Jalan  
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan besaran tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ditetapkan besaran tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- g. Pajak Parkir  
Pajak Parkir, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- h. Pajak Air Tanah  
Pajak Air Tanah, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- i. Pajak Sarang Burung Walet  
Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)  
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah, terbagi dari 3 bagian:

1. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. F.L.Tobing.
  - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - Retribusi Pelayanan Pasar.
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
  - Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
  - Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
  - Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
  - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
  - Retribusi Tempat Pelelangan.
  - Retribusi Terminal.
  - Retribusi tempat Khusus Parkir.
  - Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
  - Retribusi Rumah Potong Hewan.
  - Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
  - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  - Retribusi Penyeberangan di air.
3. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
  - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
  - Retribusi Izin Gangguan.
  - Retribusi Izin Trayek.
  - Retribusi Izin Usaha Perikanan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Sedangkan Peraturan Walikota yang telah diterbitkan tentang Pajak Daerah terdiri dari:

1. Peraturan Walikota Nomor: 973 / 31 / 2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis tentang Pajak Hiburan sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Walikota Nomor : 903 / 16 / 2012 dan Berita Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Pajak Hotel.

Dan berbagai upaya dan usaha dari pada Pemko Sibolga dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada secara optimal melalui dinas terkait. Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah yang ditempuh dan terus ditingkatkan didalam menunjang rasa kedekatan dan tanggung jawab antara masyarakat selaku subjek pajak/retribusi dengan Pemko Sibolga.

Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah, yaitu:
  - Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
  - Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
  - Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang telah dimiliki.
  - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam penerimaan pajak daerah melalui pemasangan alat perekam data transaksi (*Tapping Box*) di wilayah Kota Sibolga.
  - Peningkatan pendapatan penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum.
  - Peningkatan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara seperti Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Bantuan Keuangan.
  - Peningkatan Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Berkurangnya Pendapatan Daerah yang berasal dari:
  - Dana Penyesuaian dan Penerimaan Dana Insentif Daerah.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

- Dana Bagi Hasil Pajak (Transfer Pemerintah Pusat) dan.
  - Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
- c. Penghematan Anggaran Belanja dengan seefektif dan seefisien mungkin, sesuai dengan target kinerja, dalam penganggaran dan penggunaannya.

**2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Ada banyak indikator pencapaian target kinerja yang dapat dikemukakan, berikut ini antara lain adalah:

**a. Indikator pencapaian target kinerja berdasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sibolga Tahun 2022**

Indikator pencapaian kinerja berdasar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dapat kita uraikan sebagai berikut:

Misi: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan transparan dan akuntabel”** dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Baik.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP)	B	CC	Tidak tercapai
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	n/a	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,65	79,53	103,75%
	Indeks daya saing daerah			
2. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		2,6625	-	-

Misi: **“Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas menuju masyarakat yang makmur ”** dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang sehat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Indeks pembangunan manusia	73,85	n/a	n/a
	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,27	69,77	100,72%
	Angka Kematian Ibu	205	n/a	n/a
	Angka Kematian bayi	18	n/a	n/a
	Angka Kematian Balita	29	1	tercapai
	Prevalensi Wasting pada balita	7%	2,93%	tercapai



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

	Prevalensi angka stunting	9,5%	4,10%	tercapai
	Kualitas makanan dan minuman	89%	100%	tercapai
	Penanganan penyakit tidak menular	100%	100%	100%
	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standart	68%	59%	92,2%
	Tenaga kesehatan persatuan penduduk	10,8%	11,3%	104,6%
	Puskesmas menjadi BLUD	0	0	0
	Kelurahan stop BAB sembarangan	17,6%	0	Tidak tercapai
	Pola pangan harapan (PPH)	92%	85%	89,4%

Misi: **“Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*smart city*) ”** dengan tujuan terwujudnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks risiko bencana	151,30	167,20	Tidak tercapai
	Indeks kualitas udara	91,73	87,27	95,14
	Indeks kualitas air	53,81	59,09	109,81
	Indeks kualitas lingkungan	45,68	46	100,7%
	Indeks kualitas lingkungan hidup	67,69	66,63	98,08%
	RPPLH Kota Sibolga	ada	Tidak ada	-
	Air minum layak dan berkelanjutan	73,41%	100%	136,32%
	Rumah tangga bersanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	68,00%	33,58%	49,30%

Misi: **“Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru”** dengan tujuan terwujudnya pendidikan yang berkualitas.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks pembangunan manusia (IPM)	73,85	74,74	101,2%
	Rata-rata lama sekolah	10,42	10,43	100%
	Harapan lama sekolah	13,81	13,81	100%



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Misi: **“Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga”** dengan tujuan terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	3,00	4,15	138,3%
	Gini Rasio	0,2760	0,346	125,4%
2. Menurunkan jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	11,00	11,47	Tidak tercapai
	Angka pengangguran	5070	2882	tercapai
3. Mempermudah pelayanan perizinan dan investasi	Pendapatan perkapita penduduk	66,12	n/a	n/a
	Pendapatan daerah	89.504.186.535,00	82.398.151.034,31	92.060.666.907
	Indeks pembangunan gender	97,83	97,90	100%
	Indeks kesetaraan gender	74,03	Belum rilis	-
	Meningkatnya jumlah ekonomi kreatif	5	3	60%

**b. Indikator pencapaian target kinerja berdasar APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022**

**Tabel 2. 5 Indikator pencapaian Target Kinerja berdasarkan APBD Kota Sibolga TA 2022**

No	Uraian	Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>01.00</b>	<b>Pendapatan:</b>	<b>660.855.544.276,48</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>94,01</b>
	a. P A D	118.845.979.568,48	82.398.151.034,31	69,33
	b. Pendapatan Transfer	534.620.520.129,00	534.079.114.254,00	99,90
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	7.389.044.579,00	4.805.574.307,32	65,04
<b>02.00</b>	<b>Belanja:</b>	<b>823.827.845.243,00</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>86,18</b>
	a. Belanja Operasi	634.683.302.340,00	555.581.327.681,84	87,54
	b. Belanja Modal	176.146.380.503,00	141.684.605.852,00	80,44
	c. Belanja Tak Terduga	12.923.162.400,00	12.600.415.139,00	97,50
	d. Belanja Transfer	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	823.827.845.243,00	709.941.348.672,84	86,18
	<b>Surplus (Defisit) . . . . .</b>	<b>(162.972.300.966,52)</b>	<b>(88.658.509.077,21)</b>	<b>54,40</b>
<b>04.00</b>	<b>Pembiayaan:</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>
	a. Penerimaan Pembiayaan	162.972.300.966,52	175.814.578.217,39	107,88
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
<b>05.00</b>	<b>SiLPA TA 2022 . . . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>0,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Data di atas menunjukkan bahwa:

- a) Pada Tahun Anggaran 2022 terjadi Defisit anggaran sebesar **(Rp88.658.509.077,21)** yaitu jumlah realisasi belanja lebih besar dari jumlah realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan sebesar **Rp621.282.839.595,63** sedangkan realisasi belanja sebesar **Rp709.941.348.672,84**.
- b) Total SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp87.156.069.140,18**.



**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemko Sibolga Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan dari segi pendapatan, segi belanja dan segi pembiayaan. Kinerja keuangan tersebut dapat diukur berdasarkan:

- Ratio* antara target anggaran dengan realisasi, dan
- Ratio* keterbandingan antara keadaan sekarang dengan tahun sebelumnya (antar tahun anggaran).

Berikut akan dikemukakan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemko Sibolga Tahun Anggaran 2022 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

**3.1.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**3.1.1.1. Ikhtisar kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran  
2022 berdasarkan Struktur APBD**

**Tabel 3. 1 Ikhtisar Kinerja Keuangan Pemko Sibolga Tahun Anggaran 2022  
berdasarkan Struktur APBD**

No	Uraian	Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
01.00	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>660.855.544.276,48</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>94,01</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>118.845.979.568,48</b>	<b>82.398.151.034,31</b>	<b>69,33</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>534.620.520.129,00</b>	<b>534.079.114.254,00</b>	<b>99,90</b>
	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	490.111.485.419,00	488.538.490.242,00	99,68
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	18.430.524.000,00	18.430.524.000,00	100,00
	Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	26.078.510.710,00	27.110.100.012,00	103,96
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>7.389.044.579,00</b>	<b>4.805.574.307,32</b>	<b>65,04</b>
02.00	<b>BELANJA</b>	<b>823.827.845.243,00</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>86,18</b>
	Belanja Operasi	634.683.302.340,00	555.581.327.681,84	87,54
	Belanja Modal	176.146.380.503,00	141.684.605.852,00	80,44
	Belanja Tak Terduga	12.923.162.400,00	12.600.415.139,00	97,50
	Belanja Transfer	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	<b>Surplus (Defisit) ...</b>	<b>(162.972.300.966,52)</b>	<b>(88.658.509.077,21)</b>	<b>54,40</b>
03.00	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>
	Penerimaan Pembiayaan	162.972.300.966,52	175.814.578.217,39	107,88
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto ...</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>
04.00	<b>SILPA Tahun Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>0,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Data ini menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan daerah Kota Sibolga sebesar 94,01%, realisasi belanja sebesar 86,18%, sedangkan realisasi pembiayaan Netto sebesar 107,88%, dari rencana anggaran.

**3.1.1.1.1. Ikhtisar kinerja keuangan Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun Anggaran 2021**

**Tabel 3. 2 Ikhtisar Kinerja Keuangan Pemko Sibolga berdasarkan Realisasi TA 2021 – 2022**

No	Uraian	Realisasi (Rp) TA 2021	Realisasi (Rp) TA 2022	(%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>589.661.218.589,27</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>105,36</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>76.263.787.133,27</b>	<b>82.398.151.034,31</b>	<b>8,04</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>498.640.755.756,00</b>	<b>534.079.114.254,00</b>	<b>107,11</b>
	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	470.049.232.046,00	488.538.490.242,00	3,93
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	9.173.013.000,00	18.430.524.000,00	100,92
	Transfer Pemerintah Daerah	19.418.510.710,00	27.110.100.012,00	39,61
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>14.756.675.700,00</b>	<b>4.805.574.307,32</b>	<b>(67,43)</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>581.319.532.001,39</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>122,13</b>
	Belanja Operasi	481.221.646.923,13	555.581.327.681,84	15,45
	Belanja Modal	87.104.769.378,26	141.684.605.852,00	62,66
	Belanja Tak Terduga	12.993.115.700,00	12.600.415.139,00	(3,02)
	Belanja Transfer	0,00	75.000.000,00	100,00
<b>3</b>	<b>Surplus (Defisit) ...</b>	<b>8.341.686.587,88</b>	<b>(88.658.509.077,21)</b>	<b>(1.062,84)</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>84.287.140.918,51</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>108,59</b>
	Penerimaan Pembiayaan	87.367.317.513,51	175.814.578.217,39	101,24
	Pengeluaran Pembiayaan	3.080.176.595,00	0,00	(100,00)
	<b>Pembiayaan Netto ...</b>	<b>84.287.140.918,51</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>208,59</b>
<b>4</b>	<b>SiLPA Tahun Berkenaan</b>	<b>92.628.827.506,39</b>	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>(5,91)</b>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada TA 2022:

- Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,36% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Komposisi peningkatannya adalah Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 8,04%, Pendapatan Transfer meningkat sebesar 7,11% Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mengalami penurunan sebesar 67,43%. Data ini menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Pemko Sibolga mengalami peningkatan penerimaan keuangan dibidang Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan dan pemungutannya, serta mengalami peningkatan penerimaan dibidang pendapatan transfer.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

- b) Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 22,13% bila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun peningkatan belanja daerah terjadi pada bidang Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer.
- c) Pembiayaan *Netto* naik sebesar 108,59%, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurun sebesar 5,91%.

### 3.1.2. PENDAPATAN

#### 3.1.2.1 Realisasi

Realisasi penerimaan pendapatan Pemko Sibolga pada Tahun Anggaran 2022, dapat diuraikan pada tabel dibawah berikut:

**Tabel 3. 3 Realisasi Pendapatan Pemko Sibolga Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian	Tahun 2022		%
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>660.855.544.276,48</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>94,01</b>
<b>01.01</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>118.845.979.568,48</b>	<b>82.398.151.034,31</b>	<b>69,33</b>
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	11.425.701.723,40	12.169.731.508,00	106,51
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	13.776.680.196,00	4.683.973.666,80	34,00
01.01.03	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.955.236.945,30	11.046.702.945,44	100,83
01.01.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	82.688.360.703,78	54.497.742.914,07	65,91
<b>01.02</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>534.620.520.129,00</b>	<b>534.079.114.254,00</b>	<b>99,90</b>
<b>01.02.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>490.111.485.419,00</b>	<b>488.538.490.242,00</b>	<b>99,68</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	19.673.308.009,00	25.450.549.209,00	129,37
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	384.535.437.000,00	381.093.828.683,00	99,10
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32.933.404.410,00	31.710.074.701,00	96,29
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	52.969.336.000,00	50.284.037.649,00	94,93
<b>01.02.02</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>18.430.524.000,00</b>	<b>18.430.524.000,00</b>	<b>100,00</b>
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)	18.430.524.000,00	18.430.524.000,00	100,00
<b>01.02.03</b>	<b>Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya</b>	<b>26.078.510.710,00</b>	<b>27.110.100.012,00</b>	<b>103,96</b>
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.078.510.710,00	24.260.121.170,00	105,12
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.000.000.000,00	2.849.978.842,00	95,00
<b>01.03</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>7.388.544.579,00</b>	<b>4.805.574.307,32</b>	<b>65,04</b>
01.03.01	Pendapatan Hibah	500.000,00	67.651.909,32	13.530,38
01.03.03	Pendapatan lainnya	7.388.544.579,00	4.737.922.398,00	64,13
	<b>JUMLAH</b>	<b>660.855.544.276,48</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>94,01</b>

Total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 adalah 94,01% dengan rincian:

- a) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 69,33%.
- b) Realisasi Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat dana perimbangan sebesar 99,90%.
- c) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sebesar 103,96%.
- d) Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 65,04%.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**3.1.2.2. Perkembangan**

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Pemko Sibolga Tahun 2022, dapat dikemukakan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Pemko Sibolga dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemko Sibolga TA 2021 – 2022**

Rekening	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	(%)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>589.661.218.589,27</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>5,36</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>76.263.787.133,27</b>	<b>82.398.151.034,31</b>	<b>8,04</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	11.398.529.221,00	12.169.731.508,00	6,77
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.246.987.577,00	4.683.973.666,80	10,29
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	9.255.412.429,00	11.046.702.945,44	19,35
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	51.362.857.906,27	54.497.742.914,07	6,10
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>498.640.755.756,00</b>	<b>534.079.114.254,00</b>	<b>7,11</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	470.049.232.046,00	488.538.490.242,00	3,93
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil – LRA	24.351.430.125,00	25.450.549.209,00	4,51
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	384.535.437.000,00	381.093.828.683,00	(0,90)
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	33.815.853.302,00	31.710.074.701,00	(6,23)
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA	27.346.511.619,00	50.284.037.649,00	83,88
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	9.173.013.000,00	18.430.524.000,00	100,92
4.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	9.173.013.000,00	18.430.524.000,00	100,92
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	19.418.510.710,00	27.110.100.012,00	39,61
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil – LRA	19.418.510.710,00	24.260.121.170,00	24,93
4.2.2.2	Bantuan Keuangan – LRA	0,00	2.849.978.842,00	100,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA</b>	<b>14.756.675.700,00</b>	<b>4.805.574.307,32</b>	<b>(67,43)</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah – LRA	0,00	67.651.909,32	100,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA	14.756.675.700,00	4.737.922.398,00	(67,89)

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021. Semua sumber Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada Tahun 2022. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan TA 2021. Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan TA 2021.

Lebih lanjut dikemukakan data dan grafik kecenderungan (*trend*) pertumbuhan dan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Sibolga, berdasarkan sumber dana, dari tahun 2018 s/d tahun 2022 (tahun 2018 sebagai dasar perhitungan) sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Data Perkembangan Realisasi Pendapatan Pemko Sibolga TA 2018–2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	66,41	79,15	89,43	76,68	69,33
2	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	98,14	97,46	100,27	100,77	99,68
3	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Transfer Pem. Provsu	85,59	92,13	133,28	108,37	103,96
5	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	98,76	104,74	99,36	89,44	65,04





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecendrungan pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 adalah sebesar 69,33%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 76,68%.
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2022 adalah sebesar 99,68%, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 100,77%.
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun 2022 sebesar 100%.
- Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebesar 103,96%, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 108,37%.
- Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 adalah sebesar 65,04%, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 89,44%.

Walaupun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur di masa yang akan datang. Upaya ini diharapkan akan menunjukkan hasil yang signifikan dengan diterapkannya berbagai kebijakan daerah yang bertujuan untuk mendukung dan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan dan pemungutannya.

### **Komposisi**

Adapun komposisi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sibolga pada 2 (dua) tahun terakhir adalah:

**Tabel 3. 6 Komposisi Pendapatan Pemko Sibolga TA 2021 dan 2022**

No	Uraian	TA. 2021	%	TA. 2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah	76.263.787.133,27	12,93	82.398.151.034,31	13,26
2	Transfer Pemerintah Pusat	479.222.245.046,00	81,27	506.969.014.242,00	78,63
3	Transfer Pemerintah Daerah	19.418.510.710,00	3,29	27.110.100.012,00	3,90
4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	14.756.675.700,00	2,50	4.805.574.307,32	0,01
<b>Jumlah .....</b>		<b>589.661.218.589,27</b>	<b>100,00</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>100,00</b>

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah adalah 12,93% pada tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi 13,26% pada tahun 2022. Kontribusi Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 adalah 81,27%, mengalami penurunan menjadi 78,63% pada tahun 2022. Kontribusi Transfer Pemerintah Daerah adalah 3,29% pada tahun 2021, mengalami peningkatan menjadi 3,90% pada tahun 2021. Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap total pendapatan daerah adalah 2,50% pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 0,01% pada tahun 2022. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Pemko Sibolga didominasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022

3.1.3. BELANJA

1. Realisasi

Realisasi Belanja Pemko Sibolga dapat dikemukakan berdasarkan Realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan antara Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan Permerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
<b>1</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>	<b>520.866.972.969,00</b>	<b>484.042.486.614,84</b>	<b>92,93</b>
1.1.1.1	Pendidikan	91.242.447.192,00	90.044.936.771,00	98,69
1.2.1.2	Kesehatan	108.817.281.115,00	104.817.276.422,84	96,32
1.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.741.757.574,00	7.503.673.258,00	96,92
1.4.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.869.554.894,00	15.492.591.272,00	91,84
1.5.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.058.747.794,00	15.360.006.116,00	95,65
1.6.1.6	Sosial	4.111.618.352,00	11.836.254.150,00	287,87
1.7.2.11	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
1.8.2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.663.148.550,00	5.356.152.162,00	94,58
1.9.2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.953.474.148,00	4.362.046.111,00	88,06
1.10.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.719.647.061,00	4.388.237.708,00	92,98
1.11.2.15	Perhubungan	6.948.340.006,00	6.436.508.155,00	92,63
1.12.2.16	Komunikasi dan Informatika	4.334.770.307,00	4.019.482.389,00	92,73
1.13.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.684.214.241,00	3.214.516.110,00	87,25
1.14.2.18	Penanaman Modal	3.663.822.497,00	3.487.319.648,00	95,18
1.15.2.20	Statistik	201.687.400,00	185.606.910,00	92,03
1.16.2.23	Perpustakaan	3.409.955.982,00	3.212.677.856,00	94,21
1.17.2.24	Kearsipan	55.475.700,00	53.933.200,00	97,22
1.18.3.25	Kelautan dan Perikanan	6.036.755.476,00	5.400.905.002,00	89,47
1.19.3.26	Pariwisata	4.667.418.690,00	4.354.143.239,00	93,29
1.20.3.31	Perindustrian	10.535.531.655,00	9.947.743.393,00	94,42
1.21.4.1	Sekretariat Daerah	48.613.890.480,00	46.412.157.394,00	95,47
1.22.4.2	Sekretariat DPRD	46.212.150.061,00	34.066.616.828,00	73,72
1.23.5.1	Perencanaan	5.440.241.738,00	4.732.186.306,00	86,98
1.24.5.2	Keuangan	70.052.502.962,00	56.605.547.293,00	80,80
1.25.5.3	Kepegawaian	6.546.402.035,00	5.549.212.450,00	84,77
1.26.5.4	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
1.27.5.5	Penelitian dan Pengembangan	436.148.800,00	296.618.649,00	68,01
1.28.6.1	Inspektorat	8.190.289.171,00	7.656.602.543,00	93,48
1.29.7.1	Kecamatan	21.220.057.947,00	19.825.584.290,00	93,43
1.30.8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	10.439.641.141,00	9.423.950.989,00	90,27
<b>3</b>	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>972.140.600,00</b>	<b>545.133.400,00</b>	<b>56,08</b>
3.1.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	586.255.600,00	545.133.400,00	92,99
3.2.1.6	Sosial	385.885.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>134.094.574.766,00</b>	<b>98.881.408.369,00</b>	<b>73,74</b>
4.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.059.530.068,00	71.865.315.113,00	85,49
4.2.2.7	Tenaga Kerja	1.500.738.577,00	1.085.107.800,00	72,30
4.3.2.9	Pangan	1.547.504.016,00	330.418.350,00	21,35
4.4.2.15	Perhubungan	2.634.914.855,00	1.808.771.626,00	68,65
4.5.2.16	Komunikasi dan Informatika	4.022.982.445,00	3.895.647.607,00	96,83
4.6.2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.321.692.100,00	2.095.127.620,00	90,24
4.7.2.18	Penanaman Modal	1.545.275.345,00	1.229.444.034,00	79,56
4.8.2.21	Perindustrian	77.450.900,00	65.353.200,00	84,38
4.9.3.25	Kelautan dan Perikanan	25.241.081.141,00	7.225.634.293,00	28,63
4.10.3.27	Pertanian	212.015.900,00	185.963.499,00	87,71
4.11.3.30	Perdagangan	7.097.539.925,00	5.520.986.450,00	77,79
4.12.3.31	Perindustrian	3.833.849.494,00	3.573.638.777,00	93,21



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Kode	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
<b>5</b>	<b>PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>8.140.629.043,00</b>	<b>6.079.213.962,00</b>	<b>74,68</b>
5.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.128.718.108,00	2.089.409.116,00	98,15
5.2.2.11	Lingkungan hidup	6.011.910.935,00	3.989.804.846,00	66,37
<b>6</b>	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>5.769.360.799,00</b>	<b>5.486.692.129,00</b>	<b>95,10</b>
6.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	796.696.096,00	793.253.377,00	99,57
6.2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.972.664.703,00	4.693.438.752,00	94,38
<b>7</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>51.612.083.201,00</b>	<b>42.470.912.505,00</b>	<b>82,29</b>
7.1.1.2	Kesehatan	48.587.337.201,00	39.662.500.599,00	81,63
7.2.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.024.746.000,00	2.808.411.906,00	92,85
<b>8</b>	<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	<b>37.121.102.885,00</b>	<b>35.502.725.727,00</b>	<b>95,64</b>
8.1.3.26	Pariwisata	37.121.102.885,00	35.502.725.727,00	95,64
<b>10</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>56.477.292.609,00</b>	<b>36.512.583.111,00</b>	<b>64,65</b>
10.1.1.1	Pendidikan	53.474.152.779,00	33.818.915.100,00	63,24
10.2.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	2.029.932.555,00	1.898.101.236,00	93,51
10.3.2.22	Kebudayaan	890.901.200,00	713.683.500,00	80,11
10.4.2.23	Perpustakaan	82.306.075,00	81.883.275,00	99,49
<b>11</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>8.773.688.371,00</b>	<b>420.192.855,00</b>	<b>4,79</b>
11.1.1.6	Sosial	8.158.324.551,00	0,00	0,00
11.2.2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	615.363.820,00	420.192.855,00	68,28
	<b>JUMLAH</b>	<b>823.827.845.243,00</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>86,18</b>

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan antara Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, dari rencana belanja APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebesar **Rp823.827.845.243,00**, jumlah belanja APBD yang dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp709.941.348.672,84** atau sebesar 86,18%.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dikemukakan lebih lanjut komposisi masing-masing bidang urusan terhadap realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3. 8 Komposisi Belanja Berdasarkan Bidang Urusan**

Kode	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Komposisi (%)
1	PELAYANAN UMUM	484.042.486.614,84	68,18
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	545.133.400,00	0,08
4	EKONOMI	98.881.408.369,00	13,93
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	6.079.213.962,00	0,86
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	5.486.692.129,00	0,77
7	KESEHATAN	42.470.912.505,00	5,98
8	PARIWISATA DAN BUDAYA	35.502.725.727,00	5,00
10	PENDIDIKAN	36.512.583.111,00	5,14
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	420.192.855,00	0,06
	<b>JUMLAH</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>100,00</b>

Sebagai wujud nyata misi “Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel” serta misi “Membuka lapangan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin Kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga”, maka Pemko Sibolga memberi perhatian pada bidang Pelayanan Umum dan Ekonomi masing-masing sebesar 68,18% pada Bidang Pelayanan Umum dan 13,93% pada Bidang Ekonomi.

Kemudian untuk melaksanakan misi “Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Sehingga Dapat Melahirkan Masyarakat yang Cerdas, Menuju Masyarakat yang Makmur” serta misi “Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh Terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru” Pemko Sibolga memberi perhatian di bidang pendidikan dan kesehatan, yang ditunjukkan melalui anggaran pendidikan sebesar 5,14% dan bidang kesehatan sebesar 5,98%.

Realisasi belanja Kota Sibolga TA 2022 berdasarkan struktur sistem akuntansi pemerintahan, adalah:

**Tabel 3. 9 Realisasi Belanja dan Transfer Kota Sibolga TA 2022 berdasarkan struktur SAP**

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>823.827.845.243,00</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>86,18</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>634.683.302.340,00</b>	<b>555.581.327.681,84</b>	<b>87,54</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	289.568.023.106,00	257.445.444.071,00	88,91
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.909.242.574,00	275.344.778.304,84	86,07
5.1.3	Belanja Bunga	1.482.178.588,00	995.246.214,00	67,15
5.1.5	Belanja Hibah	15.165.022.850,00	14.205.721.912,00	93,67
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.558.835.222,00	7.590.137.180,00	88,68
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>176.146.380.503,00</b>	<b>141.684.605.852,00</b>	<b>80,44</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.751.171.122,00	17.755.536.383,00	85,56
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.972.612.691,00	45.911.783.872,00	70,66
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.604.127.189,00	73.469.155.847,00	85,82
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.818.469.501,00	4.548.129.750,00	94,39
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.923.162.400,00</b>	<b>12.600.415.139,00</b>	<b>97,50</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	12.923.162.400,00	12.600.415.139,00	97,50
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.3.1	Belanja Transfer	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

Anggaran yang tidak terealisasi (terutama belanja operasi) merupakan wujud penghematan anggaran yang dilakukan. Walaupun anggarannya tersedia, akan tetapi anggaran tersebut tidak direalisasikan kalau tidak sangat *urgent*. Setiap kegiatan dilaksanakan dengan seefektif dan seefisien mungkin, tanpa mengurangi mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Harus diakui pula bahwa belanja modal, yang seyogianya merupakan wujud nyata peningkatan pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat, tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Hal ini terjadi disebabkan adanya beberapa proyek/kegiatan konstruksi yang



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

tidak selesai pada saat tahun anggaran berakhir, sehingga proyek/kegiatan konstruksi tersebut tidak dapat dibayar sepenuhnya. Oleh karena itu ada beberapa proyek/kegiatan konstruksi yang penyelesaian fisik dan keuangannya berlanjut ke tahun anggaran 2023.

## 2. Pertumbuhan

Berikut dikemukakan pertumbuhan realisasi belanja Pemko Sibolga dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu:

**Tabel 3. 10 Pertumbuhan Realisasi Belanja Pemko Sibolga TA 2021 – 2022**

Kode	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Pertumbuhan (%)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>581.319.532.001,39</b>	<b>22,13</b>
<b>5 . 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>555.581.327.681,84</b>	<b>481.221.646.923,13</b>	<b>15,45</b>
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	257.445.444.071,00	246.602.398.284,00	4,40
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.344.778.304,84	221.685.398.219,13	24,21
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	995.246.214,00	0,00	100,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	14.205.721.912,00	5.787.542.420,00	145,45
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	7.590.137.180,00	7.146.308.000,00	6,21
<b>5 . 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>141.684.605.852,00</b>	<b>87.104.769.378,26</b>	<b>62,66</b>
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.755.536.383,00	29.476.702.047,00	(39,76)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.911.783.872,00	25.014.924.501,26	83,54
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.469.155.847,00	24.660.329.503,00	197,92
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.548.129.750,00	7.952.813.327,00	(42,81)
<b>5 . 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.600.415.139,00</b>	<b>12.993.115.700,00</b>	<b>(3,02)</b>
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	12.600.415.139,00	12.993.115.700,00	(3,02)
<b>5 . 3</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5 . 3 . 1	Belanja Transfer	75.000.000,00	0,00	100,00

Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi belanja daerah sebesar Rp581.319.532.001,39, bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022, maka terjadi peningkatan sebesar Rp128.621.816.671,45 atau 22,13%. Secara keseluruhan, naik turun realisasi masing-masing bidang belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Belanja Operasi:**

Pada Tahun Anggaran 2022, belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 15,45% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Masing-masing pertambahan belanja operasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai meningkat sebesar 4,40% yang disebabkan pertambahan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai berupa berkala, tunjangan keluarga dan lain-lain.
- Belanja Barang dan Jasa meningkat sebesar 24,21%, adapun belanja barang dan jasa berupa:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

- Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Kota yang digunakan untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yang hasilnya dihibahkan kepada masyarakat seperti pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
  - Pada tahun 2022 terdapat penambahan Belanja Bunga sebesar Rp995.246.214,00.
  - Belanja Hibah meningkat sebesar 145,45%.
  - Belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar 6,21%.

➤ **Belanja Modal:**

Belanja Modal pada tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 62,66% dari tahun anggaran 2021. Adapun terjadinya pertambahan Belanja Modal ini untuk mendukung perbaikan kinerja.

➤ **Belanja Tidak Terduga:**

Penggunaan Belanja Tidak Terduga sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga pertumbuhannya tidak signifikan sebagai bagian dari gambaran perkembangan pengelolaan keuangan daerah. Pada Tahun 2022 realisasinya adalah Rp12.600.415.139,00.

➤ **Belanja Transfer:**

Pada Tahun 2022 terdapat penambahan Belanja Transfer sebesar Rp75.000.000,00.

### **3.1.4. Surplus / defisit**

Berdasarkan penjelasan realisasi pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan surplus/defisit realisasi anggaran Pemko Sibolga sebagai berikut:

➤ Total realisasi Pendapatan .....	Rp621.282.839.595,63
➤ Total realisasi Belanja + Transfer .....	<u>Rp709.941.348.672,84</u>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(Rp88.658.509.077,21)</b>

### **3.1.5. Pembiayaan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

**1. Realisasi**

Realisasi Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2022, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 11 Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	74.654.080.966,52	92.628.827.506,39	124,08
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	88.318.220.000,00	83.185.750.711,00	94,19
<b>JUMLAH</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>

**2. Pertumbuhan**

Pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2022 dan 2021, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 12 Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2021 - 2022**

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>87.367.317.513,51</b>	<b>101,24</b>
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	92.628.827.506,39	87.367.317.513,51	6,02
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	83.185.750.711,00	0,00	100,00
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.176.595,00</b>	<b>(100,00)</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	3.080.176.595,00	(100,00)
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>84.287.140.918,51</b>	<b>108,59</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(88.658.509.077,21)</b>	<b>8.341.686.587,88</b>	<b>(1.162,84)</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>92.628.827.506,39</b>	<b>(5,91)</b>

Dengan demikian pada Tahun Anggaran 2022, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah:

- Surplus/Defisit sebesar ..... (Rp 88.658.509.077,21)
  - Pembiayaan netto sebesar ..... Rp175.814.578.217,39
- SiLPA sebesar Rp 87.156.069.140,18**



### **3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah:

1. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pengelolaan keuangan daerah masih kurang dan lemah.
2. Sulit menilai kewajaran beban kerja, karena beban kerja suatu unit kegiatan belum ada standarnya.
3. Sulit menilai kewajaran biaya suatu kegiatan, karena analisa satuan biaya belum ada standarnya.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan dan barang daerah relatif masih kurang.
5. Keterlambatan pelaksanaan tender mengakibatkan lambatnya memulai kegiatan fisik konstruksi sehingga menyebabkan pembayaran kegiatan fisik konstruksi menumpuk di akhir tahun.
6. *Refocusing* anggaran terkait dampak inflasi.





## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah Kota Sibolga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 09 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan walikota Nomor 900/10/ Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemko Sibolga yang secara garis besar sebagai berikut:

### **1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kota Sibolga dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kota Sibolga. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga selaku entitas akuntansi. Entitas akuntansi meliputi:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD dr. F. L. Tobing
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Perpustakaan
17. Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Inspektorat
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
24. Badan Kepegawaian Daerah



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

25. Sekretariat DPRD
26. Kecamatan Sibolga Utara
27. Kecamatan Sibolga Kota
28. Kecamatan Sibolga Selatan
29. Kecamatan Sibolga Sambas
30. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemerintah Kota Cilegon mempunyai 2 (dua) BUMD yaitu Perumda Tirta Nauli dan PD. Sibolga Nauli. Investasi pemerintah pada perusahaan daerah disajikan nilainya dalam investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

## **2. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

## **3. Basis Pengukuran**

### **a. Prinsip Nilai Historis**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan.

### **b. Prinsip Realisasi**

- Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
- Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
- Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

### **c. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **d. Prinsip Periodisitas**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.



**e. Prinsip Konsistensi**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

**f. Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

**g. Prinsip Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

**4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

**A. Definisi**

1. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. **Aset lancar** adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
4. **Aset non lancar** adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
5. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



#### 4.1.1. ASET LANCAR

##### 4.1.1.1. Kas Dan Setara Kas

###### a. Definisi Kas dan Setara Kas

- 1) **Kas dan setara kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 3) Kas terdiri dari:
  - a) Kas di Kas Daerah,
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan,
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran, dan
  - d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 4) **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 5) Setara kas terdiri dari:
  - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.
  - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

###### b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
  - a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar butir b, tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

###### c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- 1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 2) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

#### 4.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

##### a. Definisi Investasi Jangka Pendek

- 1) **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) **Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

##### b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
  - b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.



**c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek**

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
    - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
    - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek**

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah.
  - b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
  - c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada).
  - d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
  - e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

#### 4.1.1.3. Piutang

##### a. Definisi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.
- 4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

##### b. Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
  - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

##### c. Pengukuran Piutang

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan, atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding, atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

- 1) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

2) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten.

c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

3) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

- 5) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- 6) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 7) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) Kualitas Piutang Lancar,
  - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar,
  - c) Kualitas Piutang Diragukan,
  - d) Kualitas Piutang Macet.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*), dan
  - b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak kooperatif, dan/atau
    - (4) Wajib Pajak likuid, dan/atau
    - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, dan/atau
    - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, dan/atau
    - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang diatas 3 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau
    - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
- 10) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak kooperatif, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak likuid, dan/atau
    - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang diatas 3 tahun, dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan, dan/atau
    - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau
    - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)
- 11) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 Tahun,
  - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun,
  - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 Tahun.
- 12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,
  - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan,
  - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, dan
  - d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 13) **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih** ditetapkan:
- a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada),
  - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan
  - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 14) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 15) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

- 16) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 17) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- 18) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 19) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- 20) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
- 21) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
  - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
    - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  - b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- 22) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- 23) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,
- 24) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.
- 25) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

**a. Pengungkapan Piutang**

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
  - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
  - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.
  - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor



dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### **4.1.1.4. Beban Dibayar Dimuka**

##### **a. Definisi Beban Dibayar Dimuka**

**Beban dibayar dimuka** adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### **b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

##### **c. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka**

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

##### **d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

#### **4.1.1.5. Persediaan**

##### **a. Definisi Persediaan**

- 1) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
  - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
  - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
  - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### **b. Pengakuan Persediaan**

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

#### **c. Pengukuran Persediaan**

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

#### **d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan**

- Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



#### 4.1.1.6. Aset Untuk Dikonsolidasikan

##### a. Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

**Aset untuk Dikonsolidasikan** adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu **R/K OPD**. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD.

##### b. Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD.

##### c. Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

##### d. Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

#### 4.1.2. ASET NON LANCAR

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

##### 4.1.2.1. Investasi Jangka Panjang

###### a. Definisi Investasi Jangka Panjang

- 1) **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 4) **Investasi non permanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang

berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

- 6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### **b. Pengakuan Investasi Jangka Panjang**

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### **c. Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

#### **d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

### **4.1.2.2. Aset Tetap**

#### **a. Definisi Aset Tetap**

- 1) **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) **Nilai tercatat (*carrying amount*)** aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 4) **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 5) **Masa manfaat** adalah:
  - a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau
  - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- 6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 7) **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- 8) **Klasifikasikan Aset Tetap** berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- 9) **Tanah** adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 10) **Peralatan dan Mesin** adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 11) **Gedung dan Bangunan** adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 12) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan,
  - b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya,
  - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan
  - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 13) **Aset Tetap Lainnya** adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 14) **Konstruksi dalam Pengerjaan** adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 15) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

**b. Pengakuan Aset Tetap**

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.



**c. Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**4.1.2.3. Dana Cadangan**

**a. Definisi Dana Cadangan**

- 1) **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- 3) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

**b. Pengakuan Dana Cadangan**

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

**c. Pengukuran Dana Cadangan**

- 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan**

- 1) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



#### 4.1.2.4. Aset Lainnya

##### a. Definisi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

##### b. Pengakuan Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) **Tagihan penjualan angsuran** diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- 3) **Tuntutan Ganti Rugi** diakui bila telah memenuhi kriteria:
  - a) Telah ditandatangani Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), atau
  - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 4) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** diakui saat:
  - a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
  - b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
  - c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
  - d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
  - e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
  - f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
  - g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- 5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas, dan

- 6) Pengakuan **Aset Lain-lain** diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

**c. Pengukuran Aset Lainnya**

- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Pengukuran **Tagihan Penjualan Angsuran** dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 3) Pengukuran **Tuntutan Ganti Rugi** dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)
- 4) Pengukuran aset berdasarkan **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** dinilai berdasarkan:
  - a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
  - c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 5) **Aset Tidak Berwujud** diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- 6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  - a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.
  - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
  - (2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan.
  - (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- 7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
  - c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- 10) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- 11) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya**

- 1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) **Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran** di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- 3) **Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi** di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- 4) Pengungkapan **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- 5) Aset **Tetap Tak Berwujud** disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
  - a) Masa manfaat dan metode amortisasi.
  - b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud.
  - c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
- 6) **Aset Lain-lain** disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

**e. Amortisasi Aset Lainnya**

**1) Defenisi:**

- **Amortisasi** adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

**2) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya**

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.





**3) Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya**

- Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

**4) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya**

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

**4.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

**A. DEFINISI KEWAJIBAN**

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. **Kewajiban Jangka Pendek** adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
3. **Kewajiban Jangka Panjang** adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

**4.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

**4.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

**a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

- 1) **Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK** merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
- 2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

**b. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).



**c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

- Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar.

Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

- Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

**4.2.2. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**

**a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

**b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya**

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

**c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya**

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

**d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

**4.2.3. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN**

**a. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

- 1) **Kewajiban untuk dikonsolidasikan** adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD).



- 2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan OPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- 3) Akun ini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
- 4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

**b. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi OPD.

**c. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

- 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

**d. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan**

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

**4.2.4. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

**a. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

**b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

- 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).



**c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

**4.2.5. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

**a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

**b. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

**c. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**4.2.6. UTANG BEBAN**

**a. Definisi Utang Beban**

1) **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).



- 2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
  - a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
  - b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
  - c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

**b. Pengakuan Utang Beban**

Utang Beban diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

**c. Pengukuran Utang Beban**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

**d. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban**

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**4.2.7. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**

**a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

**b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

**c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.2.8. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

##### 4.2.8.1. Utang Jangka Panjang Lainnya

**a. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya**

**Utang jangka panjang lainnya** adalah utang jangka panjang yang:

- 1) **Utang** tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. **Kemitraan** merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- 2) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- 3) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- 4) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

**b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya**

- 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

**c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya**

- 1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



**d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya**

- 1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- 2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

**4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS**

**A. Definisi Ekuitas**

- a. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
- e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Organisasi Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

**B. Pengakuan Ekuitas**

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

**C. Pengukuran Ekuitas**

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

**D. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas**

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



#### 4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

##### A. Definisi Pendapatan LRA

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- e. **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f. **Pendapatan LRA** terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Asli Daerah – LRA.
  - 2) Pendapatan Transfer – LRA.
  - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

##### B. Pengakuan Pendapatan LRA

- a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
- b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
  - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.





- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

**C. Pengukuran Pendapatan LRA**

- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

**D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA**

- a. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan(CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
  - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**4.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH –LRA**

**A. Definisi Pendapatan Asli Daerah –LRA**

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA** adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang BPHTB, PBB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).



**B. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA**

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

**C. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA**

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

**D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA**

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**4.4.2. PENDAPATAN TRANSFER –LRA**

**A. Definisi Pendapatan Transfer –LRA**

**Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

**B. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA**

- a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- b. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

**C. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA**

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

**D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA**

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



#### **4.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA**

##### **A. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA**

- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).
- b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Hibah – LRA,
  - 2) Dana Darurat – LRA,
  - 3) Pendapatan Lainnya – LRA.

##### **B. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA**

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

##### **C. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA**

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

##### **A. DEFENISI BELANJA**

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.  
  
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
  - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
15. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

**B. PENGAKUAN BELANJA**

Pengakuan Belanja pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

**C. PENGUKURAN**

1. Pengukuran Belanja Berdasarkan Realisasi Klasifikasi Yang Ditetapkan Dalam Dokumen Anggaran.
2. Pengukuran Belanja Dilaksanakan Berdasarkan Azas Bruto Dan Diukur Berdasarkan Nilai Nominal Yang Dikeluarkan Dan Tercantum Dalam Dokumen Pengeluaran Yang Sah.

**D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - (a) Belanja Operasi
  - (b) Belanja Modal
  - (c) Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



#### **4.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER**

##### **A. DEFENISI**

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar (BAS).
7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

##### **B. PENGAKUAN**

###### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

**C. PENGUKURAN**

**1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

**2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

**D. PENILAIAN**

**1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

- a. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

**E. PENGUNGKAPAN**

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.





#### 4.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

##### A. Definisi

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari:
  - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
  - 2) Pengeluaran pembiayaan.

##### 4.7.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

###### a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. **Penerimaan pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

###### b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

###### c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

###### d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

##### 4.7.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

###### a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok



pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

**b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

**c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

**d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan**

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**4.7.3. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR**

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.



#### **4.7.4. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)**

##### **A. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
  - a) Surplus/Defisit - LRA
  - b) Pembiayaan Netto
  - c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
  - d) Perubahan SAL
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
8. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
9. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

##### **B. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

1. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.



### C. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

#### 4.8. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

##### A. DEFINISI

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

##### B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
  - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
  - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
  - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
  - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
  - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.



4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
  - b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
  - c. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya OPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
  - d. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

#### **C. PENGUKURAN**

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus,
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.9. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

##### **A. DEFINISI**

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,



masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

## **B. PENGAKUAN**

1. Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban,
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset, dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas,
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
9. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Kota Sibolga dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
  - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

**C. PENGUKURAN**

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

**D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - b. Beban Transfer
  - c. Beban Non Operasional
  - d. Beban Luar Biasa



2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
  - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
  - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.10. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

##### **A. Definisi**

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

##### **4.10.1. KOREKSI KESALAHAN**

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang.
  - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.
  - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
  - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
  - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
  - b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
    - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
    - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
    - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

18. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.10.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.



2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya, dan
  - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan:
  - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
  - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

#### **4.10.3. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI**

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.



#### **4.10.4. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan - misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
  - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  - b. Fungsi tersebut tetap ada.
  - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
  - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

#### **4.10.5. PERISTIWA LUAR BIASA**

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas,
  - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang,
  - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas,
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas, di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penjelasan setiap pos laporan realisasi anggaran Pemko Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2022 dapat dirinci dan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>621.282.839.595,63</u>	<u>589.661.218.589,27</u>

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp621.282.839.595,63 dan Rp589.661.218.589,27.

Tabel 5. 1 Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	118.845.979.568,48	82.398.151.034,31	76.263.787.133,27
Pendapatan Transfer	534.620.520.129,00	534.079.114.254,00	498.640.755.756,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	7.389.044.579,00	4.805.574.307,32	14.756.675.700,00
<b>Jumlah....</b>	<b>660.855.544.276,48</b>	<b>621.282.839.595,63</b>	<b>589.661.218.589,27</b>

Pendapatan Tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp31.621.621.006,36 dibandingkan pendapatan Tahun anggaran 2021.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>82.398.151.034,31</u>	<u>76.263.787.133,27</u>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp82.398.151.034,31 dan Rp76.263.787.133,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021

Penapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Daerah	11.425.701.723,40	12.169.731.508,00	106,51	11.398.529.221,00
Retribusi daerah	13.776.680.196,00	4.683.973.666,80	34,00	4.246.987.577,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.955.236.945,30	11.046.702.945,44	100,83	9.255.412.429,00
Lain - lain PAD Yang Sah	82.688.360.703,78	54.497.742.914,07	65,91	51.362.857.906,27
<b>Jumlah .....</b>	<b>118.845.979.568,48</b>	<b>82.398.151.034,31</b>	<b>69,33</b>	<b>76.263.787.133,27</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.398.151.034,31 bertambah sebesar Rp6.134.363.901,04 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp76.263.787.133,27. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>12.169.731.508,00</b>	<b>11.398.529.221,00</b>

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011. Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan hanya oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.169.731.508,00 dan Rp11.398.529.221,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2022 dan 2021**

Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	377.703.768,00	394.280.129,00	104,39	318.506.664,00
Pajak Restoran	1.639.241.733,00	2.087.199.377,00	127,33	1.648.820.638,00
Pajak Hiburan	79.320.700,00	65.867.450,00	83,04	82.081.000,00
Pajak Reklame	408.588.990,00	374.993.995,00	91,78	432.211.672,00
Pajak Penerangan jalan	5.401.879.685,40	5.605.771.275,00	103,77	5.184.052.921,00
Pajak Parkir	67.299.300,00	73.883.050,00	109,78	66.697.550,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan	1.951.667.547,00	2.248.691.632,00	115,22	2.033.381.276,00
Bea hasil dari Bea perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.319.044.600,00	87,94	1.632.777.500,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>11.425.701.723,40</b>	<b>12.169.731.508,00</b>	<b>106,51</b>	<b>11.398.529.221,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.169.731.508,00 atau 106,51% dari jumlah anggaran sebesar Rp11.425.701.723,40 atau bertambah sebesar Rp771.202.287,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.398.529.221,00, adapun realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp394.280.129,00 dari target sebesar Rp377.703.768,00 atau sebesar 104,39%. Pajak Hotel ini terdiri dari pajak hotel bintang dua, pajak hotel melati tiga, pajak hotel melati dua dan losmen/rumah penginapan/pasangrahan/rumah kos.
- Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Rp2.087.199.377,00 atau 127,33% dari target sebesar Rp1.639.241.733,00. Pajak Restoran ini terdiri dari pajak restoran, pajak rumah makan, pajak kafetaria dan kedai kopi. Meningkatnya Pendapatan Pajak Restoran dikarenakan tingginya kesadaran pemilik restoran dan rumah makan atau yang sejenisnya untuk menerapkan Pajak Restoran pada setiap pelanggan yang merupakan objek Pajak Restoran, serta bertambahnya jumlah Wajib Pajak Restoran di lingkungan Pemko Sibolga.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

- c. Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan sebesar Rp65.867.450,00 atau 83,04% dari target sebesar Rp79.320.700,00. Pajak Hiburan ini terdiri dari pajak diskotik/karaoke/klub malam dan sejenisnya, pajak permainan bilyar/golf dan bowling, pajak pacuan kuda/kendaraan bermotor/permainan ketangkasan dan pajak pertandingan olahraga.
- d. Realisasi Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp374.993.995,00 atau 91,78% dari target sebesar Rp408.588.990,00. Pajak Reklame ini terdiri dari pajak papan reklame /billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame selebaran, dan reklame berjalan.
- e. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan meningkat dengan realisasi sebesar Rp5.605.771.275,00 atau 103,77% dari target sebesar Rp5.401.879.685,40.
- f. Realisasi Pendapatan Pajak Parkir sebesar Rp73.883.050,00 atau 109,78% dari target sebesar Rp67.299.300,00. Realisasi pendapatan Pajak Parkir mencapai target.
- g. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp2.248.691.632,00 atau 115,22% dari target sebesar Rp1.951.667.547,00.
- h. Penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Adapun penerimaan realisasi pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.319.044.600,00 atau 87,94% dari target sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi pendapatan Bea Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mencapai target.

<b>5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>4.683.973.666,80</b>	<b>4.246.987.577,00</b>

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan merupakan imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemko Sibolga. Retribusi Daerah diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 4 Tahun 2012 dan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Sibolga.

Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp4.683.973.666,80 dan Rp4.246.987.577,00 adapun perkembangan capaian penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan 2021**

Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	475.730.850,00	217.858.500,00	45,79	215.566.700,00	72,56
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.533.420.000,00	1.603.212.000,00	104,55	1.430.639.000,00	93,30
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	399.976.954,80	40,00	296.390.000,00	77,49
Retribusi Pelayanan Pasar	8.028.600.500,00	630.102.000,00	7,85	673.470.000,00	40,22
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.800.000,00	13.960.000,00	101,16	16.400.000,00	71,30



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27.600.000,00	27.680.000,00	100,29	24.060.000,00	100,25
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	34.500.000,00	11.528.000,00	33,41	1.361.300,00	4,51
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	456.991.021,00	475.078.560,00	103,96	346.157.410,00	85,37
Retribusi Terminal	288.802.100,00	184.302.000,00	63,82	188.783.000,00	74,78
Retribusi Tempat Khusus Parkir	313.172.600,00	0,00	0,00	99.258.000,00	28,99
Retribusi Rumah Potong Hewan	84.870.000,00	77.664.000,00	91,51	71.660.000,00	97,10
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	199.203.000,00	31.830.000,00	15,98	48.250.000,00	27,85
Retribusi Penyebrangan Air	1.170.490.125,00	993.932.500,00	84,92	621.048.000,00	61,02
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	103.500.000,00	16.549.152,00	15,99	213.194.167,00	236,88
Retribusi Izin Trayek	46.000.000,00	300.000,00	0,65	750.000,00	1,88
<b>Jumlah .....</b>	<b>13.776.680.196,00</b>	<b>4.683.973.666,80</b>	<b>34,00</b>	<b>4.246.987.577,00</b>	<b>66,78</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan target dan realisasi retribusi daerah yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi penggantian rekening listrik. Retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa usaha adalah pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, Retribusi Penyebrangan air. retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin trayek. Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.683.973.666,80 atau 34,00% dari anggarannya sebesar Rp13.776.680.196,00. Rincian realisasi masing-masing jenis retribusi tersebut adalah:

1. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp217.858.500,00 atau 45,79% dari target anggaran sebesar Rp475.730.850,00. Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.
2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp1.603.212.000,00 atau sebesar 104,55% dari target anggaran sebesar Rp1.533.420.000,00. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
3. Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sebesar Rp399.976.954,80 atau 40,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Retribusi ini merupakan pembayaran masyarakat atas pelayanan Pemko Sibolga terhadap parkir di tepi jalan umum.
4. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran sebesar Rp630.102.000,00 atau 7,85% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.028.600.500,00.
5. Penerimaan Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp13.960.000,00 atau 101,16% dari target anggaran sebesar Rp13.800.000,00. Retribusi ini merupakan pembayaran masyarakat atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemko Sibolga.
6. Penerimaan Retribusi Penyedotan Kakus sebesar Rp27.680.000,00 atau 100,29% dari target anggaran sebesar Rp27.600.000,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penyedotan kakus dan penggunaan mobil tinja.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

7. Penerimaan Retribusi Tera/tera ulang sebesar Rp11.528.000,00 atau 33,41% dari target anggaran sebesar Rp34.500.000,00. Retribusi ini merupakan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dari pedagang dan pengusaha di Sibolga dan sekitarnya.
8. Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp475.078.560,00 atau 103,96% dari target anggaran sebesar Rp456.991.021,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penyewaan tanah dan bangunan serta penyewaan kendaraan bermotor milik Pemko Sibolga.
9. Penerimaan Retribusi Terminal sebesar Rp184.302.000,00 atau 63,82% dari target anggaran sebesar Rp288.802.100,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
10. Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target anggaran sebesar Rp313.172.600,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan tempat khusus parkir di Pasar, namun pada Tahun tidak ada penerimaan dikarenakan adanya pembangunan pasar dan lokasi pasar dipindahkan sementara, sehingga tidak terdapat penerimaan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir.
11. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp77.664.000,00 atau 91,51% dari target anggaran sebesar Rp84.870.000,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
12. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebesar Rp31.830.000,00 atau 15,98% dari target anggaran sebesar Rp199.203.000,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari fasilitas rekreasi dan olahraga.
13. Penerimaan Retribusi Penyeberangan Air sebesar Rp993.932.500,00 atau 84,92% dari target anggaran sebesar Rp1.170.490.125,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan penyeberangan orang di pelabuhan Sibolga.
14. Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp16.549.152,00 atau 15,99% dari target anggaran sebesar Rp103.500.000,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemberian surat izin untuk mendirikan suatu bangunan.
15. Penerimaan Retribusi Izin Trayek sebesar Rp300.000,00 atau 0,65% dari target anggaran sebesar Rp46.000.000,00. Retribusi ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemberian izin trayek.

<b>5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>11.046.702.945,44</b>	<b>9.255.412.429,00</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba (dividen) atas penyertaan modal Pemko Sibolga pada perusahaan milik daerah/BUMD Perumda Tirta Nauli dan Lembaga Keuangan Bank (PT. Bank Sumut). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp11.046.702.945,44 dan Rp9.255.412.429,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 dan 2021**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.046.702.808,00	10.046.702.945,44	100,83	8.360.479.329,00	100,00
Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	708.534.137,30	1.000.000.000,00	141,14	894.933.100,00	100,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>10.955.236.945,30</b>	<b>11.046.702.945,44</b>	<b>100,83</b>	<b>9.255.412.429,00</b>	<b>98,93</b>

Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) merupakan pendapatan dividen dari Perumda Tirta Nauli dimana realisasinya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing yaitu Rp1.000.000.000,00 dan Rp894.933.100,00. Sedangkan Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp10.046.702.945,44 merupakan pendapatan dividen dari PT.Bank Sumut TA 2022.

**5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

**Tahun 2022  
(Rp)**

**54.497.742.914,07**

**Tahun 2021  
(Rp)**

**51.362.857.906,27**

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Perda. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp54.497.742.914,07 dan Rp51.362.857.906,27 dengan rincian realisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5. 6 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021**

Lain - lain PAD Yang Sah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.680.481.900,00	755.000.000,00	925.481.900,00
Jasa Giro	1.754.166.239,00	2.659.824.753,00	(905.658.514,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	123.290,32	0,00	123.290,32
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.884.089.579,69	2.073.081.127,27	(188.991.547,58)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	73.382.540,68	0,00	73.382.540,68
Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.064.452,00	94.459.756,00	(24.395.304,00)
Pendapatan dari Pengembalian	215.451.566,38	210.751.260,00	4.700.306,38
Pendapatan BLUD	48.819.187.846,00	42.136.859.885,00	6.682.327.961,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	795.500,00	2.521.500,00	(1.726.000,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	3.430.359.625,00	(3.430.359.625,00)
<b>Jumlah .....</b>	<b>54.497.742.914,07</b>	<b>51.362.857.906,27</b>	<b>3.134.885.007,80</b>

Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp54.497.742.914,07, meningkat sebesar Rp3.134.885.007,80 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp51.362.857.906,27.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.1.1.2 Pendapatan Transfer</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>534.079.114.254,00</b>	<b>498.640.755.756,00</b>

Pendapatan transfer adalah penerimaan Pemko Sibolga dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seperti Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil. Realisasi pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp534.079.114.254,00, terdiri dari:

**Tabel 5. 7 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	506.969.014.242,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.110.100.012,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>534.079.114.254,00</b>

<b>5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>506.969.014.242,00</b>	<b>479.222.245.046,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp506.969.014.242,00 dan Rp479.222.245.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>488.538.490.242,00</b>	<b>470.049.232.046,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp488.538.490.242,00 dan Rp470.049.232.046,00 dengan rincian:

**Tabel 5. 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 dan 2021**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>19.673.308.009,00</b>	<b>25.450.549.209,00</b>	<b>129,37</b>	<b>24.351.430.125,00</b>	<b>166,26</b>
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.342.783.000,00	5.526.600.739,00	127,26	6.980.426.994,00	201,23
DBH PPh Pasal 21	6.907.852.000,00	7.225.777.774,00	104,67	9.539.929.725,00	133,54
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	543.393.000,00	1.231.152.185,00	226,57	0,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	186.570.009,00	190.339.256,00	102,02	142.857.893,00	119,09
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	9.463.000,00	33.201.500,00	350,86	4.181.800,00	19,57
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	24.653.000,00	46.549.308,00	188,82	18.526.000,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	261.948.000,00	271.608.342,00	103,69	251.183.239,00	117,27





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.190.718.000,00	8.685.696.687,00	167,33	5.423.635.384,00	233,02
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	247.617.000,00	281.312.418,00	113,61	317.362.386,00	142,87
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.673.326.704,00	148,30
<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>384.535.437.000,00</b>	<b>381.093.828.683,00</b>	<b>99,10</b>	<b>384.535.437.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Alokasi Umum	384.535.437.000,00	381.093.828.683,00	99,10	384.535.437.000,00	100,00
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>32.933.404.410,00</b>	<b>31.710.074.701,00</b>	<b>96,29</b>	<b>33.815.853.302,00</b>	<b>92,90</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.000.000.000,00	999.182.180,00	99,92	5.268.271.050,00	98,77
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.060.514.000,00	1.396.183.648,00	67,76	2.847.798.600,00	96,08
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.528.036.000,00	97,03
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.149.283.964,00	107,47
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	3.234.174.285,00	63,71
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.068.906.000,00	2.832.768.714,00	92,31	2.177.574.461,00	98,76
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	169.089.450,00	160.750.000,00	95,07	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	979.832.960,00	947.956.640,00	96,75	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.280.569.000,00	1.221.693.890,00	95,40	331.744.050,00	54,78
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	2.473.500.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	3.625.222.220,00	96,66
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	484.493.900,00	87,30
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.586.568.000,00	22.369.170.838,00	99,04	5.264.508.900,00	98,35
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	525.000.000,00	525.000.000,00	100,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	360.070.872,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.124.925.000,00	1.121.300.000,00	99,68	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.729.033.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	138.000.000,00	136.068.791,00	98,60	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.342.142.000,00	100,00
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>52.969.336.000,00</b>	<b>50.284.037.649,00</b>	<b>94,93</b>	<b>27.346.511.619,00</b>	<b>88,73</b>
DAK Non Fisik-BOS Reguler	14.910.110.000,00	14.577.093.690,00	97,77	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	18.104.732.000,00	17.268.427.744,00	95,38	18.998.895.600,00	95,51
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	480.000.000,00	511.050.000,00	106,47	220.800.000,00	80,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.670.700.000,00	1.624.381.000,00	97,23	1.718.700.000,00	92,11
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	226.200.000,00	226.200.000,00	100,00	155.165.000,00	55,38
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.496.288.000,00	6.145.511.096,00	42,39	3.399.079.260,00	78,07
DAK Non Fisik-BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	57.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.100.257.459,00	85,24



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	353.572.700,00	87,47	343.037.500,00	87,89
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	839.454.800,00	99,56
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	345.997.000,00	330.899.600,00	95,64	326.122.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.214.763.000,00	8.595.101.819,00	707,55	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	245.000.000,00	50,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>490.111.485.419,00</b>	<b>488.538.490.242,00</b>	<b>99,68</b>	<b>470.049.232.046,00</b>	<b>100,77</b>

Pada tahun 2022 terdapat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.116.413.687,00 sebagai pembayaran bunga pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2022 tentang Pemotongan dana alokasi umum sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2021 untuk penyaluran periode bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Rincian pemotongan DAU sebagai pembayaran bunga pinjaman Dana PEN adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 9 Daftar Realisasi Pembayaran Bunga Pinjaman PEN Yang Bersumber Dari PT.SMI Tahun Anggaran 2022**

No	Tanggal	Alokasi DAU	Potongan Bunga Pinjaman PEN 2022
1	28/04/2022	DAU BULAN MEI	140.468.903,00
2	31/05/2022	DAU BULAN JUNI	209.944.062,00
3	30/06/2022	DAU BULAN JULI	298.401.506,00
4	31/08/2022	DAU BULAN SEPTEMBER	0,00
5	02/09/2022	DAU BULAN AGUSTUS	308.348.222,00
6	30/09/2022	DAU BULAN OKTOBER	283.863.982,00
7	31/10/2022	DAU BULAN NOVEMBER	444.868.809,00
8	30/11/2022	DAU BULAN DESEMBER	430.518.203,00
		<b>Jumlah</b>	<b>2.116.413.687,00</b>

Dana Non Fisik - BOS Reguler dan Dana Non Fisik - BOS Kinerja merupakan Pendapatan Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta, dimana pada tahun sebelumnya pendapatan ini dicatat pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan hanya menyajikan Dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Negeri.

Daftar Satuan Pendidikan Penerima Dana BOS Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Realisasi Dana Non Fisik - BOS Reguler dan Dana Non Fisik - BOS Kinerja senilai Rp14.577.093.690,00 dan Rp200.000.000,00 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sibolga Nomor S-115/KPN.0209/2023 tanggal 15 Februari 2023 hal Penyampaian Data.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.1.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>18.430.524.000,00</b>	<b>9.173.013.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, adapun DID yang diterima sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.430.524.000,00 dengan alokasi sebagai berikut:

**Tabel 5. 10 Alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022**

<b>NO.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Alokasi</b>
1	Pendidikan	5.042.132.340,00
2	Kesehatan	1.340.313.660,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.000.000.000,00
4	Sosial	2.799.692.600,00
5	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.392.848.000,00
6	Lainnya	855.537.400,00
	<b>Jumlah .....</b>	<b>18.430.524.000,00</b>

<b>5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>27.110.100.012,00</b>	<b>19.418.510.710,00</b>

Pendapatan Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp27.110.100.012,00 dan Rp19.418.510.710,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp24.260.121.170,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp 2.849.978.842,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil pada TA 2022, sesuai dengan alokasi yang diterima oleh Pemko Sibolga yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1169/KPTS/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/189/KPTS/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah  
TA 2022 dan TA 2021**

<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Rasio</b>	<b>Realisasi 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>(Rp)</b>
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.610.345.063,00	1.610.345.063,00	100,00	3.071.175.319,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.087.602.167,00	1.087.602.167,00	100,00	1.764.430.091,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	9.489.484.924,00	9.489.484.924,00	100,00	4.440.670.291,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	193.345.949,00	193.345.949,00	100,00	70.473.599,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.697.732.607,00	11.879.343.067,00	111,05	10.071.761.410,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.000.000.000,00	2.849.978.842,00	95,00	0,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>26.078.510.710,00</b>	<b>27.110.100.012,00</b>	<b>103,96</b>	<b>19.418.510.710,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah secara umum telah terealisasi sesuai dengan nilai anggaran yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagi hasil dari PKB sebesar Rp1.610.345.063,00 yang terdiri dari alokasi Kurang Bayar bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp812.507.113,00 dan alokasi Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp797.837.950,00.
2. Bagi hasil dari BBN-KB sebesar Rp1.087.602.167,00 terdiri dari alokasi Kurang Bayar bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp552.219.068,00 dan alokasi Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp535.383.099,00.
3. Bagi hasil dari PBB-KB sebesar Rp9.489.484.924,00 terdiri dari alokasi Kurang Bayar bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp8.808.644.664,00 dan alokasi Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp680.840.260,00.
4. Bagi hasil dari pajak air permukaan sebesar Rp193.345.949,00 terdiri dari alokasi Kurang Bayar bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp119.309.063,00 dan alokasi Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp74.036.886,00.
5. Bagi hasil dari pajak rokok sebesar Rp11.879.343.067,00 terdiri dari alokasi Kurang Bayar bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp830.335.638,00 dan alokasi Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp11.049.007.429,00.
6. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp2.849.978.842,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dialokasikan untuk membiayai pekerjaan penataan selasar di Wisata Sungai Aek Doras yang dikelola Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga.

<b>5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>4.805.574.307,32</b>	<b>14.756.675.700,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp4.805.574.307,32 dan Rp14.756.675.700,00, terdiri dari:

<b>5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>67.651.909,32</b>	<b>0,00</b>

Sumbangan Pihak Ketiga atau Sejenis adalah sumbangan pihak ketiga/sejenisnya yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pada Pemerintah kota Sibolga. Realisasi Pendapatan Hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.651.909,32 merupakan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) senilai Rp.3.651.909,32 dan Penerimaan Pendapatan sebesar Rp64.000.000,00 merupakan sisa pengumpulan dana sumbangan dari Pegawai Pemerintah Kota Sibolga pada saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>4.737.922.398,00</b>	<b>14.756.675.700,00</b>

<b>5.1.1.3.2.1 Pendapatan Hibah Dana BOS</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>13.016.818.000,00</b>

Pendapatan Hibah Dana BOS pada Tahun 2022 adalah NIHIL karena Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2022 tidak lagi dicatat pada Pendapatan Hibah, melainkan dicatat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada kelompok Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

<b>5.1.1.3.2.2 Pendapatan Atas Pengembalian Hibah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>2.567.119,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan atas pengembalian hibah tahun 2022 merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia. Adapun Lembaga yang mengembalikan hibah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sibolga. Realisasi Pendapatan atas pengembalian hibah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.567.119,00.

<b>5.1.1.3.2.3 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>4.735.355.279,00</b>	<b>1.739.857.700,00</b>

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Tahun 2022 sebesar Rp4.735.355.279,00. Pendapatan Kapitasi JKN merupakan pendapatan atas pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan. Berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dicatat dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**5.1.2 BELANJA**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>709.941.348.672,84</b>	<b>581.319.532.001,39</b>

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp709.941.348.672,84 dan Rp581.319.532.001,39 dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

**Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021**

Belanja Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Operasi	634.683.302.340,00	555.581.327.681,84	87,54	481.221.646.923,13	83,93
Belanja Modal	176.146.380.503,00	141.684.605.852,00	80,44	87.104.769.378,26	47,62
Belanja Tidak Terduga	12.923.162.400,00	12.600.415.139,00	97,50	12.993.115.700,00	82,40
Belanja Transfer	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>Jumlah ...</b>	<b>823.827.845.243,00</b>	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>86,18</b>	<b>581.319.532.001,39</b>	<b>75,30</b>

<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>555.581.327.681,84</b>	<b>481.221.646.923,13</b>

Belanja Operasi Pemko Sibolga meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing terealisasi sebesar Rp555.581.327.681,84 dan Rp481.221.646.923,13, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021**

Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Pegawai	289.568.023.106,00	257.445.444.071,00	88,91	246.602.398.284,00	84,44
Belanja Barang dan Jasa	319.909.242.574,00	275.344.778.304,84	86,07	221.685.398.219,13	83,85
Belanja Bunga	1.482.178.588,00	995.246.214,00	67,15	0,00	0,00
Belanja Hibah	15.165.022.850,00	14.205.721.912,00	93,67	5.787.542.420,00	81,53
Belanja Bantuan Sosial	8.558.835.222,00	7.590.137.180,00	88,68	7.146.308.000,00	92,76
<b>Jumlah ...</b>	<b>634.683.302.340,00</b>	<b>555.581.327.681,84</b>	<b>87,54</b>	<b>481.221.646.923,13</b>	<b>83,93</b>

**5.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>257.445.444.071,00</b>	<b>246.602.398.284,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp257.445.444.071,00 atau 88,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp289.568.023.106,00. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD dengan rincian:

**Tabel 5. 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021**

Belanja Pegawai	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	177.432.509.872,00	151.100.504.868,00	85,16	154.595.276.871,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.950.356.687,00	48.642.115.521,00	95,47	43.121.222.459,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23.934.061.503,00	21.383.080.007,00	89,34	28.432.873.860,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.839.242.553,00	7.451.499.610,00	95,05	7.178.043.638,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	286.504.491,00	159.254.982,00	55,59	159.710.432,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	506.880.000,00	99,22	479.160.000,00
Belanja Pegawai BLUD	28.614.468.000,00	28.202.109.083,00	98,56	12.636.111.024,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>289.568.023.106,00</b>	<b>257.445.444.071,00</b>	<b>88,91</b>	<b>246.602.398.284,00</b>

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<u>275.344.778.304,84</u>	<u>221.685.398.219,13</u>

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, serta Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Realisasi Belanja Barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp275.344.778.304,84 atau 86,07% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp319.909.242.574,00 dengan rincian:

**Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>319.909.242.574,00</b>	<b>275.344.778.304,84</b>	<b>86,07</b>	<b>221.685.398.219,13</b>
<b>Belanja Barang</b>	<b>91.106.285.694,00</b>	<b>82.583.138.983,00</b>	<b>90,64</b>	<b>58.359.691.497,81</b>
Belanja Barang Pakai Habis	91.078.292.694,00	82.560.287.983,00	90,65	58.151.263.547,81
Belanja Barang Tak Habis Pakai	27.993.000,00	22.851.000,00	81,63	208.427.950,00
<b>Belanja Jasa</b>	<b>116.696.098.294,00</b>	<b>104.619.102.452,00</b>	<b>89,65</b>	<b>99.020.376.498,00</b>
Belanja Jasa Kantor	89.583.812.915,00	81.800.378.895,00	91,31	75.762.065.634,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.764.043.200,00	13.795.337.928,00	82,29	15.750.711.828,00
Belanja Sewa Tanah	100.000.000,00	38.119.000,00	38,12	38.410.800,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.194.597.909,00	3.848.688.383,00	91,75	2.409.680.622,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.452.327.220,00	1.135.123.847,00	78,16	752.256.930,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	25.500.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.536.863.350,00	1.392.153.009,00	90,58	817.945.300,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	404.654.700,00	404.654.700,00	100,00	75.000.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	74.000.000,00	54.700.000,00	73,92	77.200.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.581.799.000,00	2.145.946.690,00	83,12	3.294.754.384,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	16.851.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14.115.435.477,00</b>	<b>13.596.835.630,00</b>	<b>96,33</b>	<b>8.349.974.329,00</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.240.107.975,00	6.769.545.425,00	93,50	5.685.008.908,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.310.513.869,00	5.265.823.836,00	99,16	1.964.740.481,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.564.813.633,00	1.561.466.369,00	99,79	658.008.850,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	42.216.090,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>59.181.490.000,00</b>	<b>38.756.415.675,00</b>	<b>65,49</b>	<b>25.364.484.562,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.181.490.000,00	38.756.415.675,00	65,49	25.364.484.562,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>1.648.800.000,00</b>	<b>1.484.620.000,00</b>	<b>90,04</b>	<b>1.420.550.000,00</b>
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.627.200.000,00	1.463.020.000,00	89,91	1.407.050.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	13.500.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>8.909.717.809,00</b>	<b>9.109.649.231,00</b>	<b>102,24</b>	<b>8.070.395.358,00</b>
Belanja Barang dan Jasa BOS	8.909.717.809,00	9.109.649.231,00	102,24	8.070.395.358,00
<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>28.251.415.300,00</b>	<b>25.195.016.333,84</b>	<b>89,18</b>	<b>21.099.925.974,32</b>
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.251.415.300,00	25.195.016.333,84	89,18	21.099.925.974,32
<b>Jumlah....</b>	<b>319.909.242.574,00</b>	<b>275.344.778.304,84</b>	<b>86,07</b>	<b>221.685.398.219,13</b>

**5.1.2.1.3 Belanja Bunga**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>995.246.214,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Bunga pada TA. 2022 adalah sebesar Rp995.246.214,00 atau 67,15% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.482.178.588,00. Belanja Bunga pada TA 2022 merupakan Pembayaran Biaya Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Kota Sibolga T.A. 2023 sebesar Rp163.388.707,00 dan Pembayaran Biaya Provisi Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Kota Sibolga T.A. 2022 sebesar Rp831.857.507,00 kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

**5.1.2.1.4 Belanja Hibah**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>14.205.721.912,00</b>	<b>5.787.542.420,00</b>

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2022 adalah sebesar Rp14.205.721.912,00 atau 93,67% dari anggarannya sebesar Rp15.165.022.850,00. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021**

Belanja Hibah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	580.000.000,00	580.000.000,00	100,00	258.800.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.126.200.000,00	11.265.752.600,00	92,90	5.221.920.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	2.116.820.000,00	2.030.574.552,00	95,93	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	342.002.850,00	329.394.760,00	96,31	306.822.420,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>15.165.022.850,00</b>	<b>14.205.721.912,00</b>	<b>93,67</b>	<b>5.787.542.420,00</b>

Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp2.030.574.552,00 merupakan belanja hibah pada Satuan Pendidikan Swasta di Kota Sibolga, dimana pada tahun sebelumnya belanja ini tidak disajikan di LRA.

Daftar Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

<b>5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>7.590.137.180,00</b>	<b>7.146.308.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp8.558.835.222,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.590.137.180,00 atau 88,68% dengan rincian:

**Tabel 5. 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021**

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.742.235.222,00	1.044.880.000,00	59,97	958.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	6.245.500.000,00	6.064.057.180,00	97,09	5.535.108.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	403.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	571.100.000,00	481.200.000,00	84,26	250.000.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>8.558.835.222,00</b>	<b>7.590.137.180,00</b>	<b>88,68</b>	<b>7.146.308.000,00</b>

Daftar Realisasi Bantuan Belanja Sosial Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>141.684.605.852,00</b>	<b>87.104.769.378,26</b>

Belanja Modal pada TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp141.684.605.852,00 dan Rp87.104.769.378,26 dengan rincian:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5.18 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021**

Belanja Modal (BM)	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	20.751.171.122,00	17.755.536.383,00	85,56	29.476.702.047,00	80,26
Belanja Gedung dan Bangunan	64.972.612.691,00	45.911.783.872,00	70,66	25.014.924.501,26	35,10
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.604.127.189,00	73.469.155.847,00	85,82	24.660.329.503,00	36,98
Belanja Aset tetap lainnya	4.818.469.501,00	4.548.129.750,00	94,39	7.952.813.327,00	96,42
<b>Jumlah.....</b>	<b>176.146.380.503,00</b>	<b>141.684.605.852,00</b>	<b>80,44</b>	<b>87.104.769.378,26</b>	<b>47,62</b>

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan belanja modal dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal Pemko Sibolga meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya. Namun demikian realisasi belanja modal tidak seluruhnya dapat dikapitalisasi ke aset tetap, antara lain karena terdapat belanja modal yang dibelanjakan ke barang dan jasa sehingga tidak termasuk aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga nomor 028/31/Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Kota Sibolga.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 adalah sebesar Rp141.684.605.852,00 atau 80,44% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp176.146.380.503,00. Realisasi Belanja Modal dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

**5.1.2.2.1 Belanja Tanah**

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja Modal Tanah pada TA 2022 dan 2021 adalah NIHIL.

**5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin**

	<u>Tahun 2022</u>	<u>Tahun 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
	<b>17.755.536.383,00</b>	<b>29.476.702.047,00</b>

Belanja Peralatan dan Mesin pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp20.751.171.122,00 dengan realisasi Rp17.755.536.383,00 atau 85,56% dari anggarannya. Belanja tersebut dimaksudkan untuk peralatan dan perlengkapan kantor, serta peralatan dan perlengkapan kerja dengan rincian:

**Tabel 5. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021**

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Modal Alat Besar	1.598.758.900,00	404.798.340,00	25,32	172.351.800,00	66,05
Belanja Modal Alat Angkutan	2.694.400.000,00	2.495.153.487,00	92,61	5.246.283.525,00	79,11
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	80.237.600,00	63.563.112,00	79,22	104.163.200,00	99,28
Belanja Modal Alat Pertanian	193.432.800,00	193.417.800,00	99,99	9.650.000,00	99,90
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.433.475.153,00	5.587.862.139,00	86,86	11.069.526.809,00	70,37



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	832.146.100,00	825.491.987,00	99,20	119.138.100,00	99,43
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	444.074.844,00	420.804.500,00	94,76	4.326.028.945,00	80,15
Belanja Modal Alat Laboratorium	12.626.250,00	12.380.000,00	98,05	1.578.679.900,00	96,26
Belanja Modal Komputer	4.529.126.275,00	4.437.245.255,00	97,97	6.667.125.368,00	100,29
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	153.816.000,00	153.150.000,00	99,57	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	289.376.000,00	282.822.000,00	97,74	183.754.400,00	99,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	579.672.000,00	424.980.710,00	73,31	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.910.029.200,00	2.453.867.053,00	84,32	0,00	0,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>20.751.171.122,00</b>	<b>17.755.536.383,00</b>	<b>85,56</b>	<b>29.476.702.047,00</b>	<b>80,26</b>

<b>5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>45.911.783.872,00</b>	<b>25.014.924.501,26</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 adalah sebesar Rp45.911.783.872,00 atau 70,66% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp64.972.612.691,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021**

URAIAN	Anggaran	2022	%	2021
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.917.144.600,00	7.787.478.213,00	98,36	15.928.643.446,26
Belanja Modal Bangunan Gudang	489.441.599,00	244.329.200,00	49,92	0,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	322.836.110,00	291.919.500,00	90,42	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.512.343.439,00	3.652.055.967,00	80,93	7.089.262.055,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	750.003.910,00	682.476.061,00	91,00	1.749.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	26.672.345.780,00	9.196.348.327,00	34,48	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	143.199.257,00	142.336.000,00	99,40	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.516.252.603,00	1.504.927.000,00	99,25	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	435.481.851,00	422.646.517,00	97,05	0,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	19.127.815.797,00	18.949.056.000,00	99,07	0,00
Belanja Modal Taman	2.522.218.772,00	2.490.645.000,00	98,75	93.708.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	190.438.425,00	188.825.737,00	99,15	0,00
Belanja Modal Pagar	373.090.548,00	358.740.350,00	96,15	154.311.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.972.612.691,00</b>	<b>45.911.783.872,00</b>	<b>70,66</b>	<b>25.014.924.501,26</b>

<b>5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>73.469.155.847,00</b>	<b>24.660.329.503,00</b>

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember TA 2022 dan 2021 sebesar Rp73.469.155.847,00 dan Rp24.660.329.503,00 dengan rincian:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021**

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Modal Jalan	72.766.846.790,00	60.945.601.850,00	83,75	21.663.467.903,00	38,95
Belanja Modal Jembatan	4.242.710.174,00	4.182.553.377,00	98,58	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	7.027.207.433,00	6.795.244.250,00	96,70	2.894.566.600,00	48,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	157.402.541,00	156.976.500,00	99,73	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.210.000.208,00	1.204.125.250,00	99,51	40.095.000,00	72,81
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	199.960.043,00	184.654.620,00	92,35	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	100,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	52.300.000,00	4,98
<b>Jumlah.....</b>	<b>85.604.127.189,00</b>	<b>73.469.155.847,00</b>	<b>85,82</b>	<b>24.660.329.503,00</b>	<b>36,98</b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari Belanja Modal Jalan, Jembatan, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya, Bangunan Air Bersih/Air Baku, Bangunan Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Jaringan Air Minum, dan Belanja Modal Jaringan Listrik dengan total Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp73.469.155.847,00 atau 85,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp85.604.127.189,00.

**5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>4.548.129.750,00</b>	<b>7.952.813.327,00</b>

Belanja Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember TA 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp4.548.129.750,00 dan Rp7.952.813.327,00 dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 5. 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	559.662.510,00	620.434.459,00	110,86	7.590.973.327,00	96,48
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	165.990.000,00	93,70
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	714.318.500,00	687.134.000,00	96,19	195.850.000,00	96,36
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.544.488.491,00	3.240.561.291,00	91,43	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.818.469.501,00</b>	<b>4.548.129.750,00</b>	<b>94,39</b>	<b>7.952.813.327,00</b>	<b>96,42</b>

Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak, Barang Bercorak Kesenian, Aset Tidak Berwujud, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dengan realisasi sebesar Rp4.548.129.750,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp4.818.469.501,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>12.600.415.139,00</b>	<b>12.993.115.700,00</b>

Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp12.600.415.139,00 dan Rp12.993.115.700,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 23 Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2022**

No	URAIAN	Jumlah
		(Rp)
1	Dinas Kesehatan	214.809.800,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	5.270.237.069,00
3	Dinas Sosial	508.051.520,00
4	Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	258.111.250,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)	6.349.205.500,00
	<b>Jumlah...</b>	<b>12.600.415.139,00</b>

Belanja Tidak Terduga pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp12.923.162.400,00 dan terealisasi sebesar Rp12.600.415.139,00 atau 97,50% dari jumlah anggarannya.

Daftar Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat lebih lanjut pada **Lampiran 4**.

<b>5.1.2.4 Belanja Transfer</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Transfer sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp75.000.000,00 dan NIHIL. Bantuan ini merupakan Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Kejadian Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022.

• <b>Jumlah Belanja</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>709.941.348.672,84</b>	<b>581.319.532.001,39</b>

Realisasi Jumlah Belanja pada TA 2022 sebesar Rp709.941.348.672,84 mengalami kenaikan sebesar Rp128.621.816.671,45 atau 22,12% dari realisasi pada TA 2021 sebesar Rp581.319.532.001,39.

• <b>Surplus/Defisit</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(88.658.509.077,21)</b>	<b>8.341.686.587,88</b>

Surplus/Defisit pada TA 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp88.658.509.077,21) dan sebesar Rp8.341.686.587,88.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022

5.1.3 PEMBIAYAAN

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>175.814.578.217,39</u>	<u>84.287.140.918,51</u>

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemko Sibolga meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Pembiayaan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021	Rasio
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>	<b>87.367.317.513,51</b>	<b>49,73</b>
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	74.654.080.966,52	92.628.827.506,39	124,08	87.367.317.513,51	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	88.318.220.000,00	83.185.750.711,00	94,19	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.176.595,00</b>	<b>23,55</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	3.080.176.595,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>162.972.300.966,52</b>	<b>175.814.578.217,39</b>	<b>107,88</b>	<b>84.287.140.918,51</b>	<b>51,84</b>

Pembiayaan *Netto* (Penerimaan dikurangi pengeluaran daerah) pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp162.972.300.966,52 dengan realisasi Rp175.814.578.217,39 atau 107,88% dari anggaran dengan rincian:

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan berasal dari penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya, yaitu pada TA 2021. Dianggarkan sebesar Rp74.654.080.966,52 dengan realisasi sebesar Rp92.628.827.506,39 atau 124,08% dari anggaran yang telah ditetapkan.
2. Penerimaan Pinjaman Daerah berasal dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) pada TA 2022. Dianggarkan sebesar Rp88.318.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.185.750.711,00 atau 94,19% dari anggaran yang telah ditetapkan. Penerimaan Pinjaman Daerah merupakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemko Sibolga pada TA 2022 adalah **NIHIL**.

5.1.4 SiLPA

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<u>87.156.069.140,18</u>	<u>92.628.827.506,39</u>

Sisa perhitungan anggaran merupakan SiLPA atau SiKPA yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Perhitungan APBD TA. 2022 menunjukkan SiLPA sebesar Rp87.156.069.140,18,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

menurun sebesar (Rp5.472.758.366,21) atau 5,91% dari SiLPA TA 2021 sebesar Rp92.628.827.506,39. SiLPA merupakan hak Pemko Sibolga sebagai penambah Ekuitas Dana Daerah yang ditunjukkan oleh adanya sisa kas dan setara kas di Rekening Kas Daerah. Rincian SiLPA pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 25 Rincian SiLPA per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	No Rekening Bank	Tahun 2022	Tahun 2021
			(Rp)	(Rp)
1	<b>Kas Di RKUD</b>	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.003505.0	<b>57.000.948.549,82</b>	<b>60.193.571.271,19</b>
2	<b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>47.753.550,00</b>	<b>1.414.000,00</b>
4	<b>FKTP :</b>		<b>145.688.554,00</b>	<b>387.367.921,00</b>
	a. FKTP Puskesmas Pintu Angin	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004058-5	32.978.887,00	47.376.769,00
	b. FKTP Puskesmas Sambas	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004056-0	4.965,00	35.004.163,00
	c. FKTP Puskesmas Pelabuhan Sambas	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004055-1	60.238.220,00	106.567.480,00
	d. FKTP Puskesmas Aek Habil	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004059-7	52.463.390,00	136.270.480,00
	e. FKTP Puskesmas Aek Parombunan	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004057-3	3.092,00	62.149.029,00
5	<b>Kas di BLUD</b>		<b>29.919.976.562,36</b>	<b>31.974.746.540,20</b>
	a. Deposito di Bank Sumut	PT. Bank Sumut, AC. 290.03.01.000033-3	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
		PT. Bank Sumut, AC. 290.03.01.000093-0	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	b. Kas Dibendahara BLUD (Bank)	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.000175-2	19.799.820.613,00	0,00
		PT. BNI,Tbk AC. 058567032	98.460.243,00	21.969.176.018,00
	c. Kas Dibendahara BLUD (Tunai)		21.695.706,36	5.570.522,20
6	<b>Kas Dibendahara Dana BOS</b>		<b>11.916.306,00</b>	<b>40.588.400,00</b>
7	<b>Kas Lainnya</b>		<b>24.435.618,00</b>	<b>31.139.374,00</b>
8	<b>Setara Kas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SiLPA</b>			<b>87.156.069.140,18</b>	<b>92.628.827.506,39</b>

Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di RKUD pada TA 2022 adalah sebesar Rp57.000.948.549,82 dengan rincian berikut:

**Tabel 5. 26 Rincian SiLPA pada RKUD per 31 Desember Tahun 2022**

NO	BIDANG	SISA	%
<b>DAK ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK T.A 2022</b>			
1	BOK	4.738.736.400,00	8,31
2	BOKB	158.859.184,00	0,28
3	PK2UKM	6.317.000,00	0,01
4	ADMINDUK	13.539.817,00	0,02
5	PENANAMAN MODAL (FPM)	134.144.250,00	0,24
6	TPG	68.972.526,00	0,12
7	TAMSIL	41.750.000,00	0,07
8	PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPPA)	181.690.245,00	0,32
<b>DAK ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK T.A 2022</b>			
9	Sekolah Dasar (SD)	49.000.000,00	0,09
10	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	106.727.000,00	0,19
11	Jalan	2.420.718.001,00	4,25



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>SISA</b>	<b>%</b>
12	Air Minum	9.900,00	0,00
13	Sanitasi	6.500,00	0,00
14	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>	<b>10.970.931.987,00</b>	<b>19,25</b>
15	<b>PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) T.A 2022</b>	<b>17.780.684.584,00</b>	<b>31,19</b>
16	<b>BANTUAN KEUANGAN PROVINSI (BKP) T.A 2022</b>	<b>2.503.142,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>	<b>20.326.358.013,82</b>	<b>35,66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>57.000.948.549,82</b>	<b>100,00</b>

**Penjelasan Akun-Akun Saldo Anggaran Lebih:**

**5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)**

LPSAL merupakan laporan yang menggambarkan jumlah saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir tahun yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

<b>5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>92.628.827.506,39</b>	<b>87.367.317.513,51</b>

Saldo anggaran lebih awal pada TA 2022 sebesar Rp92.628.827.506,39 naik sebesar Rp5.261.509.992,88 atau 6,02% dibanding tahun 2021 sebesar Rp87.367.317.513,51.

<b>5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>92.628.827.506,39</b>	<b>87.367.317.513,51</b>

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran awal yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Bila dibandingkan dengan TA 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp5.261.509.992,88 atau 6,02%.

<b>5.2.3 SISA LEBIH ANGGARAN SiLPA</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>92.628.827.506,39</b>

SiLPA per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp87.156.069.140,18 dan Rp92.628.827.506,39, SiLPA tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.472.758.366,21 atau 5,91% dibandingkan SiLPA tahun 2021.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah NIHIL.

<b>5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>92.628.827.506,39</b>

Saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp87.156.069.140,18 dan Rp92.628.827.506,39. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.472.758.366,21 atau 5,91% dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2021.

**Penjelasan Akun-Akun Neraca:**

**5.3 NERACA**

Penjelasan-penjelasan mengenai Aset, kewajiban dan Ekuitas Pemko Sibolga sebagaimana tertuang dalam Neraca dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.3.1 ASET</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.676.673.333.045,01</b>	<b>1.624.652.271.437,26</b>

Saldo Aset Kota Sibolga per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.676.673.333.045,01 naik sebesar Rp52.021.061.607,75 atau 3,20% dibanding tahun sebelumnya dengan rincian:

**Tabel 5. 27 Rincian Saldo Aset Per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	
1.	Aset Lancar	122.655.453.849,98	127.641.768.818,27	(4.986.314.968,29)
2.	Investasi Jangka Panjang	52.570.727.947,95	53.494.902.881,90	924.174.933,95
3.	Aset Tetap	1.365.278.501.226,39	1.327.458.818.905,77	37.819.682.320,62
4.	Aset Lainnya	136.168.650.020,69	116.056.780.831,32	20.111.869.189,37
	<b>Jumlah</b>	<b>1.676.673.333.045,01</b>	<b>1.624.652.271.437,26</b>	<b>52.021.061.607,75</b>

<b>5.3.1.1 Aset Lancar</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>122.655.453.849,98</b>	<b>127.641.768.818,27</b>

Saldo Aset Lancar Kota Sibolga per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.655.453.849,98. Adapun rincian aset lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 pada tabel berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 28 Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021**

Aset Lancar	Desember 2022	Desember 2021	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	
Kas di Kas Daerah	57.000.948.549,82	60.193.571.271,19	(3.192.622.721,37)
Kas di Bendahara Penerimaan	47.753.550,00	1.414.000,00	46.339.550,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.350.000,00	0	5.350.000,00
Kas di BLUD	29.919.976.562,36	31.974.746.540,20	(2.054.769.977,84)
Kas Dana BOS	11.916.306,00	40.588.400,00	(28.672.094,00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	145.688.554,00	387.367.921,00	(241.679.367,00)
Kas Lainnya	83.590.855,00	129.125.401,00	(45.534.546,00)
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	6.520.239.522,00	5.931.403.986,00	588.835.536,00
Piutang Retribusi Daerah	1.323.925.000,00	1.320.665.000,00	3.260.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.042.321.552,00	6.345.285.984,00	2.697.035.568,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.765.234.480,32	8.623.482.150,16	2.141.752.330,16
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	11.123.015.546,00	(11.123.015.546,00)
Piutang Lainnya	3.740.956.008,94	0,00	3.740.956.008,94
Penyisihan Piutang	(8.023.975.116,10)	(7.795.861.590,56)	(228.113.525,54)
Beban Dibayar Dimuka	7.059.500,00	376.805.400,00	(369.745.900,00)
Persediaan	12.064.468.525,64	8.990.158.809,28	3.074.309.716,36
<b>Total</b>	<b>122.655.453.849,98</b>	<b>127.641.768.818,27</b>	<b>(4.986.314.968,29)</b>

**5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>57.000.948.549,82</b>	<b>60.193.571.271,19</b>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.000.948.549,82 pada PT. Bank Sumut Cabang Sibolga No. Rekening 290.01.02.003505.0.

**5.3.1.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>47.753.550,00</b>	<b>1.414.000,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.753.550,00. Saldo ini merupakan pendapatan retribusi yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian:

**Tabel 5. 29 Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022**

No	Nama OPD	Saldo	Keterangan
1	Dinas PKPLH	36.562.750,00	Pengutipan retribusi 31 Desember 2022 dan sudah disetor pada Januari 2023
2	Dinas Perhubungan	11.190.800,00	Pengutipan retribusi 31 Desember 2022 dan sudah disetor pada Januari 2023
<b>Jumlah</b>		<b>47.753.550,00</b>	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<u>5.350.000,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.350.000,00 merupakan sisa uang persediaan Tahun Anggaran 2022 yang belum disetor ke Kasda sampai dengan 31 Desember 2022, sisa uang persediaan ini disetor pada tanggal 01 Februari 2023.

<b>5.3.1.1.4 Kas di BLUD</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<u>29.919.976.562,36</u>	<u>31.974.746.540,20</u>

Kas di BLUD merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelola Rumah Sakit Umum FL Tobing, terdiri dari Saldo awal BLUD sebesar Rp31.974.746.540,20 dan penerimaan selama TA 2022 sebesar Rp48.819.187.846,00 dikurangi dengan realisasi belanja sebesar Rp50.873.957.823,84 sehingga saldo akhir BLUD sebesar Rp29.919.976.562,36. Saldo tersebut berada di Rekening Bank Sumut dan di Bendahara BLUD dengan rincian:

**Tabel 5. 30 Rincian Kas Di BLUD Tahun 2022 dan 2021**

No.	Uraian	No. Rekening Bank	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
			(Rp)	(Rp)	
1	Deposito di Bank Sumut	AC. 290.03.01.000033-3	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
		AC. 290.03.01.000093-0	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
2	Kas BLUD (BNI)	AC. 058567032	98.460.243,00	21.969.176.018,00	(21.870.715.775,00)
3	Kas Tunai Di Bendahara Pengeluaran		13.917.466,36	5.570.522,20	8.346.944,16
4	Kas Tunai Dibendahara Penerimaan		7.778.240,00	0,00	7.778.240,00
5	Kas BLUD (Bank Sumut)	AC. 290.0102.0001752	19.799.820.613,00	0,00	19.799.820.613,00
<b>Total</b>			<b>29.919.976562,36</b>	<b>31.974.746.540,20</b>	<b>(2.054.769.977,84)</b>

<b>5.3.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<u>11.916.306,00</u>	<u>40.588.400,00</u>

Kas di Bendahara BOS sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.916.306,00, dengan rincian:

**Tabel 5. 31 Saldo Kas Dibendahara BOS per 31 Desember 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Sisa Dana BOS Reguler- Bank	Sisa Dana BOS Reguler- Tunai	Total
		(Rp)	(Rp)	
1	SD	11.536,00	10.186.318,00	10.197.854,00
2	SMP	0,00	1.718.452,00	1.718.452,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.536,00</b>	<b>11.904.770,00</b>	<b>11.916.306,00</b>

Kas di Bendahara BOS Tahun 2022 per satuan pendidikan dirincikan pada **Lampiran 5**.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**5.3.1.1.6 Kas di Bendahara  
FKTP**

**Tahun 2022  
(Rp)**  
**145.688.554,00**

**Tahun 2021  
(Rp)**  
**387.367.921,00**

Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp145.688.554,00, kas ini merupakan sisa kas di Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian:

**Tabel 5. 32 Kas di Bendahara FKTP Tahun 2022 dan 2021**

No.	Uraian	No. Rekening Bank	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
			(Rp)	(Rp)	
1	FKTP Puskesmas Pintu Angin	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004058-5	32.978.887,00	47.376.769,00	(14.397.882,00)
2	FKTP Puskesmas Sambas	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004056-0	4.965,00	35.004.163,00	(34.999.198,00)
3	FKTP Puskesmas Pel. Sambas	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004055-1	60.238.220,00	106.567.480,00	(46.329.260,00)
4	FKTP Puskesmas Aek Habil	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004059-7	52.463.390,00	136.270.480,00	(83.807.090,00)
5	FKTP Puskesmas Aek Parombunan	PT. Bank Sumut, AC. 290.01.02.004057-3	3.092,00	62.149.029,00	(62.145.937,00)
<b>Total</b>			<b>145.688.554,00</b>	<b>387.367.921,00</b>	<b>(241.679.367,00)</b>

**5.3.1.1.7 Kas Lainnya**

**Tahun 2022  
(Rp)**  
**83.590.855,00**

**Tahun 2021  
(Rp)**  
**129.125.401,00**

Kas Lainnya digunakan untuk mencatat kas selain di kas di kas daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BLUD, kas Dana BOS dan kas Dana Kapitasi pada FKTP. Saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.590.855,00, dengan rincian:

**Tabel 5. 33 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.588.443,00	Utang Pajak PFK yang bersumber dari dana BOS dan sudah disetor ke Kas Negara pada Tahun 2023
2	BPBD	3.896.231,00	Utang Pajak PFK dan sudah disetor pada tahun 2023
3	BPKPAD	24.396.378,00	Pendapatan Pajak Daerah 2022 dan sudah disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2023
4	Dinas Koperasi UKMK	1.340.000,00	Utang Pajak PFK dan sudah disetor pada tahun 2023
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPA	632.088,00	Utang Pajak PFK dan sudah disetor pada tahun 2023
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	540.000,00	Utang Pajak PFK dan sudah disetor pada tahun 2023
7	Dinas Perhubungan	39.240,00	Uang Kas di Rekening Penampungan Retribusi e-Parking Bank Sumut akibat adanya perbedaan antara STS dengan Kas yang masuk ke RKUD
8	Dinas Perikanan	1.158.475,00	Utang Pajak PFK dan sudah disetor pada tahun 2023
<b>Jumlah.....</b>		<b>83.590.855,00</b>	

**5.3.1.1.8 Setara Kas**

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2022 adalah NIHIL.

**5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek**

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah NIHIL.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>6.520.239.522,00</b>	<b>5.931.403.986,00</b>

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.520.239.522,00 mengalami kenaikan sebesar Rp588.835.536,00 atau 9,93% jika dibandingkan saldo tahun 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 34 Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	
Piutang Pajak Hotel	37.140.313,00	17.100.000,00	20.040.313,00
Piutang Pajak Restoran	78.967.887,00	50.669.700,00	28.298.187,00
Piutang Pajak Hiburan	22.443.250,00	20.274.000,00	2.169.250,00
Piutang Pajak Reklame	9.556.000,00	6.688.990,00	2.867.010,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	448.265.652,00	0,00	448.265.652,00
Piutang Pajak Parkir	1.370.000,00	950.000,00	420.000,00
Piutang Pajak PBB-P2	5.922.496.420,00	5.835.721.296,00	86.775.124,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>6.520.239.522,00</b>	<b>5.931.403.986,00</b>	<b>588.835.536,00</b>

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan Rp588.835.536,00 dibandingkan dengan Piutang Pajak tahun 2021, dimana mutasi piutang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo piutang pajak hotel tahun 2021 adalah sebesar Rp17.100.000,00. Piutang yang timbul selama tahun 2022 sebesar Rp20.040.313,00 sehingga total saldo piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp37.140.313,00.
- Terdapat Penerimaan Piutang Pajak Restoran tahun 2021 sebesar Rp21.059.700,00 sepanjang Tahun Anggaran 2022, sehingga Piutang Pajak Restoran 2021 masih tersisa sebesar Rp29.610.000,00. Piutang Pajak Restoran yang timbul selama tahun 2022 sebesar Rp49.357.887,00 sehingga Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp78.967.887,00.
- Tidak terdapat Penerimaan Piutang Pajak Hiburan selama tahun 2022 dan ada piutang baru yang terbentuk sebesar Rp2.169.250,00 sehingga total Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.443.250,00.
- Piutang pajak reklame tahun 2021 diterima sebesar Rp6.688.990,00. Piutang Pajak Reklame yang timbul selama tahun 2022 sebesar Rp9.556.000,00.
- Piutang Pajak Penerangan dihasilkan sendiri sebesar Rp448.265.652,00 merupakan pajak penerangan jalan umum periode Desember 2022 dan sudah diterima kasnya pada Januari 2023.
- Piutang Pajak Parkir tahun 2021 sebesar Rp950.000,00, bertambah Rp420.000,00 di tahun 2022 sehingga saldo piutang pajak parkir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.370.000,00.
- Piutang Pajak PBB-P2 tahun 2021 yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp329.992.848,00. Pada tahun 2022 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB-P2 sebesar Rp2.333.994.086,00 dengan realisasi Rp1.918.698.784,00 sehingga terbentuk Piutang PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp415.295.302,00, terdapat koreksi saldo awal Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp1.472.670,00 sehingga piutang pajak sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp5.922.496.420,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.3.1.1.11 Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.323.925.000,00</b>	<b>1.320.665.000,00</b>

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.323.925.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.260.000,00 atau 0,25% dibandingkan tahun 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 35 Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan (Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.425.000,00	9.200.000,00	12.225.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.294.000.000,00	1.298.100.000,00	(4.100.000,00)
Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.740.000,00	(1.740.000,00)
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.500.000,00	11.625.000,00	(3.125.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.323.925.000,00</b>	<b>1.320.665.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>

**a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.425.000,00 merupakan piutang retribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode Desember 2022 dan sudah diterima kas nya pada tahun 2023.

**b. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.294.000.000,00 dengan rincian:

**Tabel 5. 36 Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2022 dan 2021**

Jenis Piutang	2022	2021
<b>Retribusi Pelayanan Pasar - Los</b>	3.500.000,00	<b>3.500.000,00</b>
<b>Retribusi Pelayanan Pasar - Kios</b>	1.290.500.000,00	<b>1.294.600.000,00</b>
- Piutang Retribusi 2022	17.400.000,00	31.800.000,00
- Piutang Retribusi 2021	11.800.000,00	38.100.000,00
- Piutang Retribusi 2020	37.600.000,00	0,00
- Piutang Retribusi 2019	110.050.000,00	111.050.000,00
- Piutang Retribusi 2018	49.550.000,00	49.550.000,00
- Piutang Retribusi 2017	48.000.000,00	48.000.000,00
- Piutang Retribusi 2016	23.200.000,00	23.200.000,00
- Piutang Retribusi 2015	23.200.000,00	23.200.000,00
- Piutang Retribusi 2014	107.100.000,00	107.100.000,00
- Piutang Retribusi 2013	235.100.000,00	235.100.000,00
- Piutang Inpres 2013	4.000.000,00	4.000.000,00
- Piutang Retribusi 2012	223.400.000,00	223.400.000,00
- Piutang Retribusi 2011	205.000.000,00	205.000.000,00
- Piutang Retribusi 2007	195.100.000,00	195.100.000,00
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>1.294.000.000,00</b>	<b>1.298.100.000,00</b>

Selama tahun 2022 terdapat penerimaan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp21.500.000 dan piutang baru yang timbul selama tahun 2022 sebesar Rp17.400.000,00 sehingga Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2022 senilai Rp1.294.000.000,00. Piutang ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah piutang pengelolaan Rusunawa sebesar Rp8.500.000,00 yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

<b>5.3.1.1.12</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
		<u>9.042.321.552,00</u>	<u>6.345.285.984,00</u>

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.042.321.552,00. Piutang ini merupakan dividen dari PT. Bank Sumut, Tbk atas laba tahun 2022 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut tahun buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut.

<b>5.3.1.1.13</b>	<b>Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
		<u>10.765.234.480,32</u>	<u>8.623.482.150,16</u>

Saldo piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.765.234.480,32 dengan rincian:

**Tabel 5. 37 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	2022	2021
		(Rp)	(Rp)
1	Piutang Pendapatan Bunga	560.983,28	0,00
2	Piutang TP-TGR	37.067.536,00	0,00
3	Piutang BLUD	8.179.679.776,00	6.139.878.024,00
4	Piutang Denda PBB	2.547.926.185,04	2.483.604.126,16
<b>Total Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>		<b>10.765.234.480,32</b>	<b>8.623.482.150,16</b>

- Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp560.983,28 merupakan dana remunerasi atas Dana Treasury Deposit Facility (TDF), yang disimpan pada Rekening Lain BI TDF-TKD Kota Sibolga senilai Rp2.313.043.062,00
- Piutang TP-TGR tahun 2022 senilai Rp37.067.536,00 timbul akibat adanya SK Walikota Sibolga tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp8.179.679.776,00 dan Rp6.139.878.024,00. Penerimaan Piutang BLUD Tahun 2021 selama tahun 2022 sebesar Rp5.684.328.274,00 sehingga masih ada sisa piutang sebesar Rp455.549.750,00 yaitu Piutang Pendapatan Rujukan Parsial RSUD Pandan. Piutang yang timbul selama tahun 2022 sebesar Rp7.724.130.026,00 sehingga total piutang BLUD per 31 Desember sebesar Rp8.179.679.776,00 dengan rincian:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 38 Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2022**

No.	Jenis Pelayanan	Tahun Pengakuan	Jumlah Piutang (Rp)
1	Pendapatan Rujukan Parsial RSU Pandan	2020-2021	455.549.750,00
2	Pendapatan Rujukan Parsial RS Metta Medika	2022	1.097.000,00
3	Pendapatan BLUD JKN Nopember 2022	2022	3.525.148.650,00
4	Pendapatan BLUD JKN Desember 2022	2022	3.690.918.800,00
5	Pendapatan BLUD Klaim Ambulance Nopember 2022	2022	59.958.100,00
6	Pendapatan BLUD Klaim Ambulance Desember 2022	2022	42.770.150,00
7	Pendapatan BLUD Obat Kronis Nopember 2022	2022	199.652.640,00
8	Pendapatan BLUD Obat Kronis Desember 2022	2022	204.584.686,00
<b>Jumlah</b>			<b>8.179.679.776,00</b>

- d. Piutang Pendapatan Denda PBB-P2  
Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.547.926.185,04, dengan mutasi yang terjadi selama tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5. 39 Saldo Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Saldo Awal	2.483.604.126,16
2	Koreksi Tambah Saldo Awal	316.363,00
3	Kenaikan persentasi denda	189.683.146,48
4	Pengurangan denda Sesuai Perwal Kota Sibolga Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	60.501.289,12
5	Penerimaan piutang	65.176.161,48
<b>Saldo akhir</b>		<b>2.547.926.185,04</b>

Mutasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

<b>5.3.1.1.14</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Nihil

<b>5.3.1.1.15</b>	<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
		<u>0,00</u>	<u>11.123.015.546,00</u>

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Nihil dan Rp11.123.015.546,00.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.3.1.1.16 Piutang Lainnya</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>3.740.956.008,94</b>	<b>0,00</b>

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.740.956.008,94 merupakan saldo yang diakibatkan adanya selisih antara uang muka pengadaan barang dan jasa dengan realisasi fisik pada kegiatan Pembangunan Pasar Ikan Modren dengan Kontrak Sebesar Rp22.280.857.710,82 piutang lainnya dicatat sebesar Rp3.740.956.008,94 yaitu selisih antara uang muka yang dibayarkan kepada rekanan sebesar 25% dari Kontrak (Rp5.570.214.427,00) dengan realisasi fisik per 31 Desember 2022 sebesar 8,21% (Rp1.829.258.418,06)

<b>5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(8.023.975.116,10)</b>	<b>(7.795.861.590,56)</b>

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp8.023.975.116,10) dengan rincian:

**Tabel 5. 40 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022**

No	Penyisihan Piutang	2022 (Rp)	2021 (Rp)
<b>A</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>4.641.876.803,97</b>	<b>4.537.595.061,42</b>
1	Penyisihan Pajak Hotel	17.200.201,57	17.100.000,00
2	Penyisihan Pajak Restoran	18.897.964,44	17.423.398,50
3	Penyisihan Pajak Hiburan	14.433.346,25	14.253.500,00
4	Penyisihan Pajak Parkir	952.100,00	950.000,00
5	Penyisihan Pajak Reklame	47.780,00	33.444,95
6	Penyisihan PBB P2	4.590.345.411,71	4.487.834.717,97
<b>B</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>1.180.206.875,00</b>	<b>1.105.693.575,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	107.125,00	46.000,00
2	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	8.700,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.018.750,00	2.684.375,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.172.581.000,00	1.100.329.500,00
	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	3.500.000,00	2.625.000,00
<b>C</b>	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>2.201.891.437,13</b>	<b>2.152.572.954,14</b>
1	Denda PBB P2	2.201.891.437,13	2.152.572.954,14
	<b>Jumlah ( A+B+C)</b>	<b>8.023.975.116,10</b>	<b>7.795.861.590,56</b>

Perhitungan Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

<b>5.3.1.1.18 Beban Dibayar Di Muka</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>7.059.500,00</b>	<b>376.805.400,00</b>

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.059.500,00 merupakan Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 atas sewa lahan oleh Dinas Kesehatan periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**5.3.1.1.19 Persediaan**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>12.064.468.525,64</b>	<b>8.990.158.809,28</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengukuran persediaan, Pemko Sibolga melakukan pencatatan secara periodik dimana pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian persediaan.

Saldo persediaan pada OPD di Kota Sibolga per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.064.468.525,65 mengalami kenaikan sebesar Rp3.074.309.716,36 atau 34,20% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 41 Persediaan Per 31 Desember 2022**

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Saldo 31 Des 2021
<b>PERSEDIAAN</b>		
<b>Barang Pakai Habis</b>		
<b>Bahan</b>	<b>4.812.184,06</b>	<b>5.182.942,76</b>
Bahan Kimia	4.812.184,06	5.182.942,76
Bahan Lainnya	0,00	0,00
<b>Suku Cadang</b>	<b>3.268.919.925,57</b>	<b>2.914.285.547,79</b>
Suku Cadang Alat Kedokteran	2.301.270.929,63	1.697.583.695,55
Suku Cadang Alat Laboratorium	967.648.995,94	1.185.676.969,91
Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	31.024.882,33
<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>	<b>414.968.118,70</b>	<b>626.883.446,50</b>
Alat Tulis Kantor	0,00	4.519.018,00
Bahan Cetak	186.531.050,70	243.524.573,50
Kertas dan Cover	0,00	4.360.244,00
Perabot Kantor	228.437.068,00	284.067.936,00
Alat Listrik	0,00	2.490.075,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	87.921.600,00
<b>Obat-obatan</b>	<b>6.111.459.545,61</b>	<b>4.782.337.563,03</b>
Obat-obatan	5.763.109.186,92	3.420.003.393,52
Obat-obatan Lainnya	348.350.358,69	1.362.334.169,51
<b>Persediaan untuk dijual/diserahkan</b>	<b>2.205.746.750,00</b>	<b>566.947.000,00</b>
Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.205.746.750,00	566.947.000,00
<b>Natura dan Pakan</b>	<b>58.562.001,70</b>	<b>94.522.309,20</b>
Natura	58.562.001,70	94.522.309,20
<b>TOTAL PERSEDIAAN</b>	<b>12.064.468.525,64</b>	<b>8.990.158.809,28</b>

Pada Tahun 2022 terdapat:

1. koreksi saldo awal pada RSUD F. L. Tobing karena ada persediaan obat yang berasal dari hibah Propinsi Sumut yang tidak dicatat pada Tahun 2021.
2. Koreksi saldo awal persediaan karcis pada Dinas Perindustrian Perdagangan sebesar Rp1.896.261,00 karena adanya perubahan harga karcis.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

3. Terdapat persediaan expired pada Dinas Kesehatan sebesar Rp636.441.535,15 yang terdiri dari persediaan suku cadang alat kedokteran sebesar Rp261.404.930,61, persediaan obat-obatan sebesar Rp219.186.816,40 dan persediaan obat-obatan lainnya sebesar Rp155.849.788,14.
4. Terdapat persediaan expired pada RSUD F. L. Tobing sebesar Rp67.584.875,50 yang terdiri dari persediaan suku cadang alat kedokteran sebesar Rp2.571.250,00 dan persediaan obat-obatan sebesar Rp65.013.625,50.

Rincian Persediaan per OPD per 31 Desember 2022 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

<b>5.3.1.2</b>	<b>Investasi Panjang</b>	<b>Jangka</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
			<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
			<b>52.570.727.947,95</b>	<b>53.494.902.881,90</b>

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp52.570.727.947,95 dan Rp53.494.902.881,90 dengan rincian:

**Tabel 5. 42 Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
		(Rp)	(Rp)
1.	Investasi Non Permanen	1.477.929.038,57	1.477.929.038,57
	Penyisihan Investasi Non Permanen	(1.477.929.038,57)	(1.477.929.038,57)
	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2.	Investasi Permanen	52.570.727.947,95	53.494.902.881,90
	<b>Jumlah</b>	<b>52.570.727.947,95</b>	<b>53.494.902.881,90</b>

<b>5.3.1.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>1.477.929.038,57</b>	<b>1.477.929.038,57</b>

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.477.929.038,57 terdiri dari dana bergulir dan dana kemitraan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 43 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2022**

No.	Jenis Investasi	Nilai Investasi
1	Dana Bergulir	300.533.543,00
2	Dana Kemitraan	1.177.395.495,57
	<b>Jumlah</b>	<b>1.477.929.038,57</b>

<b>5.3.1.2.1.1</b>	<b>Dana Bergulir</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
		<b>300.533.543,00</b>	<b>300.533.543,00</b>

Saldo Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp300.533.543,00, dengan rincian:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 44 Rincian Dana Bergulir per 31 Desember 2022**

REKENING	Nilai Dana Bergulir	Pengembalian Dana	Dana Bergulir yang Macet dan Jatuh Tempo Sd Desember 2022	Sisa Dana Bergulir Per 31 Des 2021	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Bank Sumut AC.29002040122635	185.000.000,00	41.936.457,00	143.063.543,00	0,00	115.073,00
Bank Sumut AC.29002040141865	30.000.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Bank Sumut AC.29002040141877	189.000.000,00	39.530.000,00	149.470.000,00	0,00	0,00
	<b>404.000.000,00</b>	<b>103.466.457,00</b>	<b>300.533.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.073,00</b>

saldo rekening bank sebesar Rp115.073,00 merupakan bunga bank tahun 2022 dan status rekening Bank Sumut AC.29002040141865 dan Bank Sumut AC.29002040141877 sudah tutup.

**5.3.1.2.1.2 Dana Kemitraan**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**(Rp)**

**(Rp)**

**1.177.395.495,57**

**1.177.395.495,57**

Rincian Dana Kemitraan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 45 Rincian Dana Kemitraan Tahun 2022**

REKENING	Nilai Dana Bergulir	Pengembalian Dana	Dana Bergulir yang Macet dan Jatuh Tempo Sd Desember 2022	Pengembalian Dana Bergulir Ke Kas Daerah Tahun 2021	Sisa Dana Bergulir Per 31 Des 2022	Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Bank Sumut AC 290.01.02.00.3668-0</b>	1.500.000.000,00	322.604.504,43	1.177.395.495,57	322.604.504,43	1.177.395.495,57	3.765.490,17
	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>322.604.504,43</b>	<b>1.177.395.495,57</b>	<b>322.604.504,43</b>	<b>1.177.395.495,57</b>	<b>3.765.490,17</b>

Dana Kemitraan merupakan investasi yang dicairkan dari RKUD ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada TA 2009, 2010, dan 2011, Nilai masing-masingnya sebesar Rp500.000.000,00, sehingga total selama 3 Tahun tersebut adalah Rp1.500.000.000,00.

Saldo rekening Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.765.490,17 merupakan bunga bank.

**5.3.1.2.1.2 Penyisihan Investasi  
Dana Bergulir dan  
Dana Kemitraan**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**(Rp)**

**(Rp)**

**(1.477.929.038,57)**

**(1.477.929.038,57)**

Saldo Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.477.929.038,57. Investasi Dana Bergulir Kepada Masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah dilakukan penyisihan 100% karena sudah dikategorikan macet.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022

<b>5.3.1.2.2 Investasi Permanen</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>52.570.727.947,95</b>	<b>53.494.902.881,90</b>

**5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp52.570.727.947,95 dan Rp53.494.902.881,90 merupakan investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemko Sibolga pada PT. Bank Sumut, Perumda Air Minum Tirta Nauli dan PD. Sibolga Nauli saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 46 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
PT. Bank Sumut	39.621.222.827,45	39.621.222.827,45
Perumda Air Minum Tirta Nauli	12.821.168.065,50	13.639.747.755,45
PD. Sibolga Nauli	128.337.055,00	233.932.299,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.570.727.947,95</b>	<b>53.494.902.881,90</b>

<b>1. Investasi Permanen pada PT. Bank Sumut</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>39.621.222.827,45</b>	<b>39.621.222.827,45</b>

Kepemilikan investasi permanen pada PT. Bank Sumut oleh Pemko Sibolga pada TA 2022 adalah berupa saham dan pengakuan investasi dinilai dengan metode biaya (*cost method*). Investasi permanen pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.621.222.827,45 dengan rincian:

**Tabel 5. 47 Investasi Permanen Pemko Sibolga pada PT. Bank Sumut Per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Nilai Investasi (Rp)
1	Surat sertifikat kolektif saham s.d RUPS 2001	607.800.000,00
2	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2002	19.890.000,00
3	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2003	38.030.000,00
4	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2004	107.260.000,00
5	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2005	3.489.140.000,00
6	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2006	262.920.000,00
7	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2007	170.530.000,00
8	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2008	378.540.000,00
9	Surat sertifikat kolektif saham sesuai RUPS 2009	307.870.000,00
10	Surat sertifikat kolektif saham Tw II s.d IV 2010	3.000.000.000,00
11	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2011	3.000.000.000,00
12	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2012	3.000.000.000,00
13	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2013	3.000.000.000,00
14	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2014	3.000.000.000,00
15	Pembayaran di Investasi Saham Pemko Sibolga TA 2009	250.000.000,00
16	Akumulasi Pembulatan akibat perbedaan pengakuan oleh Bank Sumut	1.556,45
17	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2018	6.390.145.823,00
18	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2021	4.146.381.763,00
19	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2022	3.530.999.661,00
20	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2022	1.841.537.429,00
21	Surat sertifikat kolektif saham Tahun 2022	3.080.176.595,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.621.222.827,45</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Investasi permanen pada PT. Bank Sumut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena tidak adanya penyertaan modal maupun divestasi.

<b>2. Investasi Permanen pada Perumda Tirta Nauli</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>12.821.168.065,50</b>	<b>13.639.747.755,45</b>

Saldo Investasi Permanen pada Perumda Tirta Nauli per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.821.168.065,50 sesuai dengan hasil laporan keuangan Perumda Tirta Nauli TA. 2022 *audited*. Persentase kepemilikan investasi permanen Pemko Sibolga pada Perumda Air Minum Tirta Nauli adalah 100%, sehingga pengakuan investasi dinilai dengan metode ekuitas (*equity method*), yakni dengan menyajikan nilai investasi awal kemudian perubahan berupa penambahan dan pengurangan saldo investasi yang berasal dari laba atau rugi Perumda Air Minum Tirta Nauli.

**Tabel 5. 48 Investasi Permanen Pemko Sibolga pada Perumda Tirta Nauli Sibolga Per 31 Desember 2022**

No.	Uraian	Investasi 2021	Penyertaan Modal 2022	Investasi 2022
1	Penyertaan Pemko Sibolga	12.703.984.092,00	0,00	12.703.984.092,00
2	Penambahan Investasi atas laba Tahun berjalan	935.763.663,45	0,00	117.183.973,50
	<b>Saldo Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Nauli</b>	<b>13.639.747.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.821.168.065,50</b>

Investasi tahun 2022 sebesar Rp12.821.168.065,50 terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp12.703.984.092,00 dan deviden tahun buku 2022 sebesar Rp117.183.973,50.

<b>3. Investasi Permanen pada PD Sibolga Nauli</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>128.337.055,00</b>	<b>233.932.299,00</b>

Saldo Investasi Permanen pada PD Sibolga Nauli per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.337.055,00, penurunan investasi sebesar Rp105.595.244,00 merupakan kerugian sesuai dengan hasil laporan keuangan TA. 2022 *unaudited*. Persentase kepemilikan investasi permanen Pemko Sibolga pada PD Sibolga Nauli adalah 100%, sehingga pengakuan investasi dinilai dengan metode ekuitas (*equity method*), yakni dengan menyajikan nilai investasi awal kemudian perubahan berupa penambahan dan pengurangan saldo investasi yang berasal dari laba atau rugi PD Sibolga Nauli.

<b>5.3.1.3 Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.365.278.501.226,39</b>	<b>1.327.458.818.905,77</b>

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/kuasai oleh Pemko Sibolga sampai dengan 31 Desember 2022. Perolehan aset tetap Pemko Sibolga berasal



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

dari Kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap pada Tahun Anggaran berkenaan. Jumlah Aset Tetap Pemko Sibolga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.365.278.501.226,39 dan Rp1.327.458.818.905,77 dengan rincian:

**Tabel 5. 49 Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	542.565.473.552,00	542.565.473.552,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	362.761.833.975,89	351.230.000.788,79	11.531.833.187,10
3	Gedung dan Bangunan	540.219.470.363,36	514.298.824.599,26	25.920.645.764,10
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	630.509.731.093,09	562.884.444.038,00	67.625.287.055,09
5	Aset Tetap Lainnya	19.850.697.129,82	19.062.603.098,82	788.094.031,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.612.846.477,22	5.698.880.169,00	9.913.966.308,22
7	Akumulasi Penyusutan	(746.241.551.364,99)	(668.281.407.340,10)	(77.960.144.024,89)
	<b>Jumlah...</b>	<b>1.365.278.501.226,39</b>	<b>1.327.458.818.905,77</b>	<b>37.819.682.320,62</b>

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**5.3.1.3.1 Tanah**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>542.565.473.552,00</b>	<b>542.565.473.552,00</b>

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp542.565.473.552,00 tidak penambahan aset dari tahun 2021, dengan rincian:

**Tabel 5. 50 Rincian Mutasi Tanah Per 31 Desember 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal Per 31 Desember 2021</b>	<b>542.565.473.552,00</b>
<b>Koreksi</b>	0,00
<b>Saldo setelah Koreksi</b>	<b>542.565.473.552,00</b>
Penambahan	<b>2.500.000.000,00</b>
• <i>Mutasi Satker</i>	2.500.000.000,00
Pengurangan	<b>2.500.000.000,00</b>
• <i>Mutasi Satker</i>	2.500.000.000,00
<b>Saldo Akhir Tanah Per 31 Desember 2022</b>	<b>542.565.473.552,00</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tanah antar satuan kerja sebesar Rp2.500.000.000,00 terdiri dari:
  - a. Mutasi tanah dari Sekretariat Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00 yaitu tanah Tangkahan UD. Budi Jaya ke Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Terdapat 4 bidang tanah yang dalam proses sengketa dimana tanah-tanah tersebut masih dikuasai oleh pihak lain yaitu :

1. Tanah SD 084090 yang berlokasi di Kel. Hutabangunan;
2. Tanah SD 084091 yang berlokasi di Kel. Hutabangunan;
3. Tanah Aek Habil yang berlokasi di Kel. Aek Habil;
4. Tanah Kosong yang diperuntukkan yang berlokasi di Kel. Aek Manis.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Selama Tahun 2022 terdapat 88 bidang tanah Pemko Sibolga yang sudah disertifikat sehingga total tanah Pemko Sibolga yang sudah disertifikat sebanyak 378 bidang tanah.

Mutasi Aset Tetap Tanah per OPD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

<b>5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>362.761.833.975,89</b>	<b>351.230.000.788,79</b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp362.761.833.975,89 mengalami kenaikan Rp11.531.833.187,10 atau 3,28% dari tahun 2021.

Selama tahun 2022 terjadi mutasi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai dari peralatan mesin Pemko Sibolga dimana mutasi tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5. 51 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal per 01 Januari 2022</b>	<b>351.230.000.788,79</b>
Koreksi Tambah :	19.460.000,00
Koreksi Kurang	0,00
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>351.249.460.788,79</b>
Penambahan	<b>20.125.753.949,00</b>
• <i>Belanja Modal Tahun 2022</i>	17.755.536.383,00
• <i>Mutasi antar satker/OPD</i>	471.280.475,00
• <i>Kapitalisasi dari Beban Barang Jasa</i>	233.650.157,00
• <i>Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C)</i>	52.807.400,00
• <i>Reklas dari Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan (KIB D)</i>	60.999.000,00
• <i>Reklas dari Aset Tetap Lainnya</i>	2.500.000,00
• <i>Reklas dari Belanja barang Jasa</i>	56.890.331,00
• <i>Reklas dari KDP</i>	56.420.000,00
• <i>Penerimaan Hibah</i>	1.435.670.203,00
Pengurangan	<b>8.613.380.761,90</b>
• <i>Ekstracomtabel (belanja modal yang tidak menjadi aset tetap)</i>	1.415.071.277,00
• <i>Mutasi antar Satker/OPD</i>	471.280.475,00
• <i>Reklas Ke Gedung dan Bangunan</i>	44.988.500,00
• <i>Reklas Ke Aset tak Berwujud</i>	245.175.000,00
• <i>Reklas Ke Aset Tetap Lainnya</i>	14.834.496,00
• <i>Reklas Ke Aset lain-lain</i>	5.005.426.612,00
• <i>Reklas Ke barang dan jasa</i>	1.334.984.401,90
• <i>Reklas Ke beban pemeliharaan</i>	81.620.000,00
<b>Saldo akhir Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022</b>	<b>362.761.833.975,89</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi tambah saldo awal sebesar Rp19.460.000,00 merupakan koreksi pada Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKPP) dimana alat kantor lainnya sebesar Rp17.460.000,00 dan peralatan jaringan sebesar Rp2.000.000,00 yang dicatat secara ekstrakomtabel pada gedung dan bangunan, dikoreksi menjadi peralatan dan mesin.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

2. Mutasi antar satker/OPD sebesar Rp471.280.475,00 terdiri dari:
  - a. mutasi personal komputer dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp117.600.000,00.
  - b. Mutasi Kendaraan Dinas roda empat (4) dari Sekretariat Daerah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu senilai Rp337.900.000,00.
  - c. Mutasi Kendaraan roda dua (2) sebanyak dua unit dari Sekretariat Daerah ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) senilai Rp15.780.475,00.
3. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp233.650.157,00 terdiri dari:
  - a. Kapitalisasi perjalanan dinas dalam kota pada Dinas Pendidikan senilai Rp3.780.000,00
  - b. Kapitalisasi biaya umum pada Dinas Kesehatan yaitu pengadaan GRIS Infant Warmer senilai Rp8.480.200,00 dan pengadaan Antropometri senilai Rp9.505.800,00
  - c. Kapitalisasi beban barang dan jasa pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) yaitu pada kegiatan pengadaan kapal pengangkut sampah senilai Rp10.627.000,00
  - d. Kapitalisasi beban barang dan jasa pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) yaitu pada kegiatan pemasangan lampu taman Jl. Perintis Kemerdekaan senilai Rp83.462.931,00
  - e. Kapitalisasi beban barang dan jasa pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) yaitu pada kegiatan pekerjaan pemasangan LPJU senilai Rp41.111.390,00
  - f. Kapitalisasi beban barang dan jasa pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) yaitu pada kegiatan pekerjaan pemasangan LPJU tersebar senilai Rp49.921.500,00
  - g. Kapitalisasi bahan untuk kegiatan kantor lainnya menjadi alat rumah tangga (gorden) pada Dinas PPKB senilai Rp20.931.136,00
  - h. Kapitalisasi barang dan jasa senilai Rp5.830.200,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa alat angkutan dan alat kantor dan rumah tangga.
4. Penambahan peralatan dan mesin berupa mobiler senilai Rp34.473.900,00 pada Dinas Pendidikan yang direklas dari belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan dan penambahan peralatan dan mesin senilai Rp18.333.500,00 pada PKPLH.
5. Penambahan peralatan dan mesin akibat adanya reklas dari Jalan Irigasi dan Jaringan yaitu reklas bangunan penampung sampah senilai Rp48.899.000,00 menjadi alat kantor lainnya pada PKPLH dan reklas JIJ berupa dudukan tangki air senilai Rp12.100.000,00 menjadi alat rumah tangga lainnya pada Dinas Perhubungan.
6. Penambahan peralatan mesin sebesar Rp2.500.000,00 merupakan reklas dari aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan
7. Penambahan peralatan dan mesin dari reklas barang jasa senilai Rp56.890.331,00 pada Dinas Pendidikan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

8. Penambahan perlatan dan mesin dari reklas konstruksi dalam pengerjaan (KDP) senilai Rp56.420.000,00 pada Dinas Pendidikan yaitu pengadaan mobiler kelas SD dan SMP (Biaya umum)
9. Penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari penerimaan hibah sebesar Rp1.435.070.203,00 terdiri dari:
  - a. Penerimaan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Dinas Kesehatan berupa alat laboratorium umum sebesar Rp64.378.890,00
  - b. Penerimaan hibah dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumut kepada Dinas Kesehatan berupa tabung oksigen senilai Rp60.545.000,00
  - c. Penerimaan hibah dari Perpustakaan Nasional kepada Dinas Perpustakaan berupa printer senilai Rp4.049.000,00, server senilai Rp16.050.000,00 dan komputer senilai Rp45.750.000,00

Pengurangan aset tetap peralatan mesin tahun berjalan dapat dirinci:

1. Pengurangan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.415.071.277,00 akibat Belanja Modal yang tidak memenuhi kapitalisasi sehingga dicatat secara ekstrakomptabel pada 14 OPD.
2. Pengurangan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp44.988.500,00 akibat adanya reklasifikasi menjadi gedung dan bangunan yaitu pengadaan jerjak senilai Rp17.960.000,00 yang bersumber dari dana BOS dan belanja modal mebel senilai Rp5.550.000,00 pada Dinas Pendidikan dan belanja modal alat kantor lainnya pada Sekretariat Daerah senilai Rp21.478.500,00
3. Pengurangan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp245.175.000,00 akibat adanya reklasifikasi ke aset tidak berwujud yaitu belanja modal komputer jaringan sebesar Rp200.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, belanja modal komputer jaringan (pengadaan website) senilai Rp25.675.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan belanja modal komputer jaringan senilai Rp21.500.000,00 pada Sekretariat DPRD.
4. Pengurangan saldo peralatan dan mesin karena direklas ke aset tetap lainnya sebesar Rp145.200,00 pada Dinas Pendidikan dan sebesar Rp14.689.296,00 di Dinas PPKB pada kegiatan KIT Stunting siap nikah.
5. Pengurangan saldo peralatan dan mesin sebesar Rp5.005.426.612,00 akibat adanya rekalasifikasi ke aset lain-lain ubah kondisi ke rusak berat pada 7 OPD.
6. Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp1.334.984.401,90 akibat direklasifikasi ke beban barang dan jasa terdiri dari:
  - a. Reklas ke beban barang jasa BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp19.670.000,00
  - b. Reklas belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp180.000,00 menjadi suku cadang alat bengkel pada Dinas Pendidikan
  - c. Reklas belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp72.960.000,00 menjadi suku cadang alat kedokteran umum pada Dinas Pendidikan
  - d. Reklas belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp6.966.150,00 menjadi suku cadang alat laboratorium pada Dinas Pendidikan
  - e. Reklas belanja modal alat peralatan permainan sebesar Rp4.650.000,00 menjadi alat pendukung olahraga pada Dinas Pendidikan
  - f. Reklas ke alat bahan kantor lainnya sebesar Rp2.506.400,00 pada Dinas Pendidikan.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- g. Reklas ke suku cadang alat kedokteran sebesar Rp20.302.320,00 pada Dinas Kesehatan.
- h. Reklas ke bahan alat kegiatan kantor lainnya sebesar Rp650.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- i. Reklas Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp510.000,00 pada Dinas PKPLH.
- j. Reklas Belanja Modal Alat Pengelolaan Tanah dan Tanaman sebesar Rp120.760.400,00 pada Dinas PKPLH.
- k. Reklas Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp10.800.000,00 pada Dinas PKPLH.
- l. Reklas Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebesar Rp232.800,00 menjadi Suku Cadang Alat Pertanian (cangkul) pada Dinas Sosial.
- m. Reklas Belanja Modal Personal Komputer sebesar Rp1.620.000,00 menjadi bahan komputer pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- n. Reklas belanja modal personal komputer sebesar Rp764.676.000,00 menjadi beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Dinas PPKB
- o. Reklas belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp525.000,00 menjadi suku cadang alat pertanian pada Dinas Perhubungan.
- p. Reklas belanja modal topi kerja sebesar Rp20.950.000,00 menjadi suku cadang alat keselamatan kerja pada Dinas Perhubungan.
- q. Reklas belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor sebesar Rp994.500,00 menjadi persediaan bahan komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- r. Reklas belanja modal perkakas kerja sebesar Rp288.000,00 menjadi suku cadang alat bengkel pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- s. Reklas belanja modal peralatan tukang besi sebesar Rp78.000,00 menjadi suku cadang alat bengkel pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- t. Reklas belanja modal alat ukur sebesar Rp960.000,00 dan peralatan permainan sebesar Rp5.148.000,00 menjadi suku cadang pendukung olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- u. Reklas belanja modal pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp1.623.600,00 menjadi suku cadang alat pertanian pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- v. Reklas belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp1.100.000,00 menjadi suku cadang alat kedokteran pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
- w. Reklas belanja modal perkakas bengkel kerja sebesar Rp1.564.000,00, belanja modal peralatan tukang besi sebesar Rp3.700.000,00, peralatan tukang kayu sebesar Rp3.700.000,00 dan belanja modal alat ukur sebesar Rp918.000,00 menjadi suku cadang alat bengkel pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- x. Reklas belanja modal alat rumah tangga lainnya sebesar Rp16.950.000,00 menjadi beban barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- y. Reklas belanja modal mebel sebesar Rp11.950.000,00 menjadi bahan alat kantor lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- z. Reklas belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp210.864.362,00 menjadi suku cadang alat angkutan pada Sekretariat DPRD



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

- ã. Reklas belanja modal peralatan tukang besi sebesar Rp1.841.000,00 menjadi alat listrik pada Kecamatan Sibolga Selatan
    - ä. Reklas belanja modal peralatan tukang besi sebesar Rp84.000,00 menjadi suku cadang alat bengkel pada Badan Kepegawaian Daerah
- 7. Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp81.620.000,00 akibat reklasifikasi belanja modal alat pengolahan air kotor ke beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan berupa pemeliharaan IPAL dan Incenerator.

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Terdapat kendaraan milik Pemko Sibolga yang di pinjam pakai kepada instansi *vertikal* sebagai berikut:

**Tabel 5. 52 Daftar Kendaraan Pemko Sibolga yang Dipinjam Pakai Oleh Instansi Vertikal Per 31 Desember 2022**

No	Intansi Pemakai	Jenis Kendaraan	Merk / Type	No.Polisi	Jlh Harga
1	KEJARI SIBOLGA	RODA 4	INNOVA	BB 241 N	248.350.000
2	KEJARI SIBOLGA	RODA 4	MITSUBISHI	BB 1005 N	155.000.000
3	KOREM 023	RODA 4	INNOVA	BB 112 N	213.950.000
4	POLISI MILITER SIBOLGA	RODA 4	AVANZA	BB 114 N	120.000.000
5	POLRES SIBOLGA	RODA 4	INNOVA	BB 246 N	315.740.000
6	POLRES SIBOLGA	RODA 2	HONDA TIGER	BB 2792 N	24.753.000
7	POLRES SIBOLGA	RODA 2	HONDA TIGER	BB 2791 N	24.753.000
8	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	RODA 2	SUPRA	BB 2509	13.298.000
9	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	RODA 2	SUPRA	BB 2491 N	13.298.000
10	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	RODA 4	INNOVA		115.175.000
<b>Total</b>					<b>1.244.317.000,00</b>

<b>5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u>540.219.470.363,36</u>	<u>514.298.824.599,26</u>

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp540.219.470.363,36 mengalami kenaikan sebesar Rp25.920.645.764,10 atau 5,04% dibandingkan tahun 2021. Mutasi gedung dan bangunan yang terjadi selama Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5. 53 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal Per 01 Januari 2022</b>	<b>514.298.824.599,26</b>
Koreksi Tambah :	57.530.000,00
Koreksi Kurang :	477.156.530,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	<b>513.879.198.069,26</b>
Penambahan	<b>54.519.868.356,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Belanja Modal Tahun 2022</i></li> <li>• <i>Mutasi Satker</i></li> <li>• <i>Reklas dari Beban Pemeliharaan</i></li> <li>• <i>Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa</i></li> <li>• <i>Hibah Masuk</i></li> <li>• <i>Reklas dari Barang dan Jasa</i></li> <li>• <i>Reklas dari Peralatan dan Mesin</i></li> <li>• <i>Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.911.783.872,00</li> <li>4.015.522.600,00</li> <li>380.019.650,00</li> <li>1.200.805.984,00</li> <li>765.000.000,00</li> <li>18.850.000,00</li> <li>44.988.500,00</li> <li>1.941.371.100,00</li> </ul>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)
• Retensi Tahun 2022	241.526.650,00
Pengurangan	<b>28.179.596.061,90</b>
• Ekstrakomptabel	17.323.000,00
• Mutasi Satker	4.015.522.600,00
• Reklas Ke Peralatan dan Mesin (KIB B)	52.807.400,00
• Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.961.012.427,00
• Reklas Ke Jaringan Irigasi dan Jaringan	2.269.670.350,00
• Reklas Ke Aset Lain-lain	13.747.679.344,90
• Reklas Ke Beban Pemeliharaan	1.596.608.240,00
• Reklas Ke Belanja Barang dan Jasa	1.846.900,00
• Retensi Tahun 2021	517.125.800,00
<b>Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022</b>	<b>540.219.470.363,36</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan saldo awal aset tetap gedung dan bangunan akibat adanya koreksi tambah saldo awal sebesar Rp57.530.000,00 yaitu:
  - a. Koreksi tambah saldo awal aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp31.650000,00 yaitu adanya aset tetap gedung bangunan yang sebelumnya dicatat secara ekstrakomptable berupa jerjak bangunan.
  - b. Koreksi tambah saldo awal aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.000.000,00 karena adanya kapitalisasi jerjak pada bangunan rumah dinas dokter.
  - c. Koreksi tambah saldo awal aset tetap gedung dan bangunan pada Kecamatan Sibolga Sambas sebesar Rp23.880.000,00 karena adanya aset tetap gedung bangunan yang sebelumnya dicatat secara ekstrakomptable.
2. Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp477.156.530,00 yaitu:
  - a. Koreksi kurang saldo awal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp74.921.280,00 karena adanya aset tetap yang dicatat secara ekstrakomptable.
  - b. Koreksi kurang saldo awal pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp402.235.250,00 karena adanya bangunan yang sudah dihapus dengan SK penghapusan tahun 2021.
3. Pada tahun 2022 terjadi mutasi gedung dan bangunan antar OPD sebesar Rp4.015.522.600,00 yaitu:
  - a. Mutasi bangunan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ke Dinas Perikanan KPP sebesar Rp696.150.000,00 .
  - b. Mutasi tugu pembangunan dari Dinas Perikanan KPP ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp410.246.750,00.
  - c. Mutasi gedung dan bangunan dari Dinas PUPR ke Sekretariat Daerah sebesar Rp1.173.134.250,00 yaitu rehab pagar rumah dinas walikota.
  - d. Mutasi gedung bangunan dari Dinas PUPR ke Kecamatan Sibolga Utara sebesar Rp248.881.150,00 yaitu rehab pagar Kantor Camat Sibolga Utara.
  - e. Mutasi gedung dan bangunan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp992.654.300,00 yaitu penataan area kuliner pasar belakang.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- f. Mutasi gedung dan bangunan dari Dinas PUPR ke Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp212.299.400,00 yaitu rehab kantor Kecamatan Sibolga Selatan.
- g. Mutasi gedung dan bangunan dari Dinas PUPR ke Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp95.251.900,00 yaitu rehab kantor Kelurahan Aek Manis.
- h. Mutasi gedung dan bangunan dari Dinas PUPR ke Kecamatan Sibolga Sambas sebesar Rp186.904.850,00 yaitu rehab bangunan kantor Kecamatan Sibolga Sambas.

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun berjalan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat adanya rekals dari beban pemeliharaan senilai Rp380.019.650,00 dengan rincian:
  - a. Reklas Beban Pemeliharaan sebesar Rp93.429.650,00 pada Dinas Pendidikan yaitu rehab ruang kelas dan pemeliharaan paving blok SDN 084087 Sibolga.
  - b. Reklas Beban Pemeliharaan sebesar Rp117.826.000,00 pada BPKPAD yaitu pembuatan taman sebesar Rp68.719.000,00 dan pembuatan kanopi parkir sebesar Rp49.107.000,00.
  - c. Reklas Beban Pemeliharaan sebesar Rp168.764.000,00 pada Sekretariat Daerah.
2. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.200.805.984,00 akibat adanya kapitalisasi dari Belanja barang dan jasa dengan rincian :
  - a. Kapitalisasi beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp208.031.305,00 pada 16 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan.
  - b. Kapitalisasi belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar Rp166.735.000,00 pada Dinas PUPR.
  - c. Kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp175.866.387,00 pada 11 paket kegiatan di Dinas PKPLH.
  - d. Kapitalisasi honorarium pengadaan barang dan jasa sebesar Rp5.900.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada kegiatan perbaikan sarana dan prasarana di kawasan wisata pelabuhan lama Kota Sibolga.
  - e. Kapitalisasi belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp44.729.000,00 ke gedung bangunan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  - f. Kapitalisasi belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp76.494.000,00 ke gedung bangunan pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  - g. Kapitalisasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp79.489.292,00 ke gedung bangunan Kantor Camat Sibolga Sambas.
  - h. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp443.561.000,00 pada Gedung Bangunan Kantor BPKPAD.
3. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.617.529.000,00 berupa penerimaan hibah yang terdiri dari:
  - Penerimaan Hibah Gedung dan Bangunan dari PT. Metta Medika Sibolga ke Dinas PKPLH berupa bangunan gudang pengumpulan limbah dengan nilai sebesar Rp65.000.000,00.
  - Penerimaan Hibah Gedung Bangunan Rumah Produksi dari Kemeterian PUPR sebesar Rp700.000.000,00.
4. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.850.000,00 merupakan reklasifikasi dari beban Barang dan Jasa Dana BOS.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

5. Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.988.500,00 merupakan pengadaan jerjak senilai Rp17.960.000,00 yang bersumber dari dana BOS dan belanja modal mebel senilai Rp5.550.000,00 pada Dinas Pendidikan, serta belanja modal alat kantor lainnya pada Sekretariat Daerah senilai Rp21.478.500,00.
6. Reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp1.941.371.100,00 terdiri dari:
  - Pembangunan Gedung Area Penitipan dan Kamar Mandi di kawasan Pelabuhan Lama senilai Rp1.671.893.600,00 pada Dinas PUPR.
  - Pembangunan Gerbang dan Area Parkir Pelabuhan Lama Rp49.071.200,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - Pembangunan Food Court Pelabuhan Lama Rp91.180.400,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Pelabuhan Lama Rp15.405.100,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - Rehab Area Taman dan Selasar Pelabuhan Lama Rp23.129.600,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - Rehab Open Space Pantai Ujung Sibolga ke Pelabuhan Lama Rp90.691.200,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
7. Retensi tahun 2022 sebesar Rp241.526.650,00 merupakan pekerjaan yang pembayarannya akan dianggarkan pada tahun 2023 yaitu:
  - a. 11 paket pekerjaan fisik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp172.653.050,00.
  - b. Pembangunan Kantor Rusunawa pada Dinas PKPLH sebesar Rp68.873.600,00.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun berjalan dapat dirinci:

1. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp17.323.000,00 karena dicatat secara ekstrakomptabel, yaitu bangku taman pada Kecamatan Sibolga Kota.
2. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena direklas ke peralatan dan mesin berupa mobiler senilai Rp34.473.900,00 pada Dinas Pendidikan yang direklas dari belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan dan penambahan peralatan dan mesin senilai Rp18.333.500,00 pada PKPLH.
3. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.749.391.727,00 menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu pembangunan pasar ikan pada Dinas Perikanan KPP.
4. Pengurangan asset Gedung dan Bangunan sebesar Rp211.620.700,00 yaitu biaya umum pembangunan pasar dewa sakti.
5. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.269.670.350,00 karena direklas menjadi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdiri dari:
  - Reklas bangunan kesehatan (IPAL) menjadi bangunan waduk air kotor sebesar Rp2.116.799.350,00 pada RSUD. FL. Tobing.
  - Reklas instalasi dan menara air di PPI Aek Habil sebesar Rp52.212.000,00 pada Dinas Perikanan KPP.
  - Reklas bangunan sebesar Rp100.659.000,00 menjadi bangunan MCK di Kecamatan Sibolga Kota.
6. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp13.515.178.778,00 karena direklasifikasi ke aset lainnya yaitu:
  - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp1.915.506.000,00 berupa bangunan kamar mandi dan pagar.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- b. Reklas gedung bangunan farmasi sebesar Rp125.757.450,00 pada Dinas Kesehatan.
- c. Bangunan gedung kelurahan sebesar Rp472.425.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- d. Bangunan mesjid yang sudah dihibahkan dan dalam proses penghapusan sebesar Rp56.857.500,00.
- e. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas PKPLH sebesar Rp2.559.676.700,00 terdiri dari 15 register aset gedung dan bangunan.
- f. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.061.726.125,00 yaitu bangunan tempat ibadah, pos jaga terminal atas, gapura dan portal terminal atas dan bawah dimana bangunan tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Perhubungan dan akan diusulkan untuk dihapus.
- g. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Kamar Mandi Di Kawasan Objek Wisata Di Pelabuhan Lama sebesar Rp178.538.000,00
- h. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Panggung Atraksi Putri Runduk Rp475.277.000,00
- i. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Rest Area Di Jalan Lingkar Serasi Rp199.500.000,00
- j. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Spot Photo Di Bukit Ketapang Rp149.500.000,00
- k. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Bangunan Tribun Stadion Horas Rp2.637.028.650,00
- l. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Pos Jaga Di Kawasan Objek Wisata Pelabuhan Lama Rp199.670.000,00
- m. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Bangunan Guest House Tangga Seratus Rp1.119.389.203,00
- n. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Pembuatan Gazebo Di Tangga Seratus Rp177.578.000,00
- o. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Pintu Pengaman Di Jalan Lingkar Serasi Rp69.800.000,00
- p. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Joging Track Pelabuhan Lama sebesar Rp347.326.200,00
- q. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Taman Vegetasi sebesar Rp218.497.200,00
- r. Reklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu Logo Sibolga kota Ikan sebesar Rp200.598.750,00
- s. Reklas ke aset lain-lain pada Kecamatan Sibolga Utara sebesar Rp118.665.000,00
- t. Reklas ke aset lain-lain pada Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp231.862.000,00 yaitu bangunan gedung kantor kelurahan aek habil.
- u. Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp53.280.787,15 yaitu kelebihan bayar atas 5 paket kegiatan di Dinas Pendidikan, kelebihan bayar ini telah dikembalikan oleh pihak rekanan ke RKUD Kota Sibolga pada Tahun 2023.
- v. Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp163.160.943,94 yaitu kelebihan bayar atas 3 paket kegiatan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, kelebihan bayar ini telah dikembalikan oleh pihak rekanan ke RKUD Kota Sibolga pada Tahun 2023.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- w. Reklas ke aset lain-lain sebesar Rp16.058.835,81 yaitu kelebihan bayar atas kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kelebihan bayar ini telah dikembalikan oleh pihak rekanan ke RKUD Kota Sibolga pada Tahun 2023. Untuk aset pencatatan aset dimutasi ke Kecamatan Sibolga Kota.
7. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.596.608.240,00 karena direklasifikasi menjadi beban pemeliharaan yaitu:
- Beban pemeliharaan gedung pada Dinas Pendidikan sebesar Rp274.289.017,00.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp34.336.000,00 pada pekerjaan pemeliharaan tugu putri runduk.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp38.885.100,00 pada pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan taman rusunawa Kota Sibolga.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp101.494.500,00 pada pekerjaan pengecatan pagar TPA.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp197.549.300,00 pada pekerjaan perbaikan dan pengecatan pagar serta pembuatan gerbang rusunawa.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp103.069.500,00 pada pekerjaan perbaikan dan pengecatan pagar pembibitan.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp235.320.300,00 pada pekerjaan pengecatan gedung rusunawa blok A dan blok B.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp112.530.950,00 pada pekerjaan pengecatan pagar pemakaman ujung sibolga.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp142.428.000,00 pada pekerjaan perbaikan dan pengecatan pagar pemakaman muslim di Panomboman.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp99.433.000,00 pada pekerjaan rehab gazebo tersebar di Kota Sibolga.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp85.000.000,00 pada pekerjaan pengecatan tiang LPJU tersebar di Kota Sibolga.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp68.602.000,00 pada pekerjaan pengecatan tiang lampu LPJU tersebar di Kota Sibolga.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas PKPLH sebesar Rp1.104.825,00 pada pekerjaan perbaikan mesin pompa air, perpipaan dan kelengkapan kantor rusunawa kota sibolga.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas Sosial sebesar Rp33.627.748,00 yaitu pengecatan gedung kantor.
  - Beban pemeliharaan pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp68.938.000,00 yaitu pengecatan gedung kantor.
8. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.846.900,00 merupakan reklas belanja modal bangunan gudang menjadi beban bahan kontruksi pada Dinas PKPLH.
9. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp517.125.800,00 merupakan pembayaran retensi tahun 2021 yaitu:
- Pembangunan gedung area penitipan dan kamar mandi di kawasan pelabuhan lama Dinas PUPR sebesar Rp79.243.900,00
  - Pembayaran 26 Paket kegiatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp345.038.000,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

- c. Pendirian/revitalisasi gedung ruang/area produksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp113.535.000,00.

Terdapat gedung dan bangunan yaitu Pasar Dewa Sakti berlokasi di Kecamatan Sibolga Sambas yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian yang sudah digunakan oleh masyarakat Sibolga. Bangunan ini direncanakan akan di hibahkan ke Pemerintah Kota Sibolga tetapi sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST).

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2022 dapat dilihat dalam **Lampiran 11**.

**5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>630.509.731.093,09</b>	<b>562.884.444.038,00</b>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp630.509.731.093,09 mengalami kenaikan sebesar Rp67.625.287.055,09 atau 12,10% dibandingkan dengan tahun 2021.

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terjadi selama tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5. 54 Rincian Mutasi Jalan Irigasi dan jaringan Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 01 Januari 2022</b>	<b>562.884.444.038,00</b>
Koreksi Bertambah	9.000.000,00
Koreksi Berkurang	0,00
<b>Saldo Awal Setelah Koreksi Per 01 Januari 2022</b>	<b>562.893.444.038,00</b>
Penambahan	<b>79.719.292.555,00</b>
• <i>Belanja Modal Tahun 2022</i>	73.469.155.847,00
• <i>Kapitalisasi Beban barang dan Jasa</i>	804.083.538,00
• <i>Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan</i>	937.991.500,00
• <i>Retensi 2022</i>	894.414.470,00
• <i>Mutasi Masuk</i>	1.343.976.850,00
• <i>Reklas dari Gedung dan Bangunan</i>	2.269.670.350,00
Pengurangan	<b>12.103.005.499,91</b>
• <i>Mutasi Keluar</i>	1.343.976.850,00
• <i>Reklas ke Peralatan dan Mesin (KIB B)</i>	60.999.000,00
• <i>Reklas ke Kontruksi Dalam Pengerjaan</i>	10.001.667.070,00
• <i>Reklas ke Aset Lain-lain</i>	276.566.479,91
• <i>Reklas Ke Beban Barang Jasa</i>	64.502.000,00
• <i>Retensi</i>	147.097.150,00
• <i>Reklas Ke Beban Pemeliharaan</i>	208.196.950,00
<b>Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022</b>	<b>630.509.731.093,09</b>

Dari tabel diatas dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun berjalan dapat dirinci sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

1. Koreksi bertambah Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.000.000,00 adalah pencatatan sumur bor dan instalasi RPH Aek Parombunan dimana sebelumnya dicatat secara ekstrakomtable gedung bangunan.
2. Penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya kapitalisasi dari beban barang dan jasa sebesar Rp804.083.538,00 yang terdiri dari kapitalisasi Beban Persediaan dan Beban Jasa pada 24 paket kegiatan di Dinas PUPR.
3. Penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya reklas dari KDP sebesar Rp937.991.500,00 yang terdiri dari 57 paket kegiatan di Dinas PUPR senilai Rp861.039.100,00 (**Lampiran 12**), pembangunan jembatan penghubung pajus ke pelabuhan lama Rp50.141.600,00, pembangunan selasar pemecah ombak sebesar Rp11.124.100,00 dan pembangunan jaring pengaman sampah dan dermaga apung di pelabuhan lama sebesar Rp15.686.700,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
4. Penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena adanya utang belanja modal tahun 2022 yang akan di bayarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp894.414.470,00 pada 13 paket kegiatan di Dinas PUPR (**Lampiran 13**).
5. Mutasi Masuk sebesar Rp1.343.976.850,00 yaitu mutasi pembangunan air kotor dari Dinas PUPR ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
6. Penambahan aset tetap tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklas Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.269.670.350,00 yang terdiri dari:
  - a. Reklas bangunan kesehatan (IPAL) menjadi bangunan waduk air kotor sebesar Rp2.116.799.350,00 pada RSUD. FL. Tobing.
  - b. Reklas instalasi dan menara air di PPI Aek Habil sebesar Rp52.212.000,00 pada Dinas Perikanan KPP.
  - c. Reklas bangunan sebesar Rp100.659.000,00 menjadi bangunan MCK di Kecamatan Sibolga Kota.

Adapun Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun berjalan dengan rincian:

1. Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan karena direklas ke peralatan dan mesin yaitu reklas bangunan penampung sampah senilai Rp48.899.000,00 menjadi alat kantor lainnya pada PKPLH dan reklas JIJ berupa dudukan tangki air senilai Rp12.100.000,00 menjadi alat rumah tangga lainnya pada Dinas Perhubungan.
2. Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp10.001.667.070,00 di Dinas PUPR karena masih berstatus KDP yaitu :
  - a. Peningkatan Jalan Murai Kota Sibolga dengan realisasi fisik 48% dan nilai KDP sebesar Rp195.000.610,00.
  - b. Peningkatan Jalan Kop. Galung Kota Sibolga (PEN) dengan realisasi fisik 90% dan nilai KDP sebesar Rp4.451.141550,00
  - c. Peningkatan Jalan Bakti TNI II Parombunan Kota Sibolga dengan realisasi fisik 85% dan nilai KDP sebesar Rp756.573.000,00.
  - d. Pemeliharaan berkala dan peningkatan Jalan Rasak Kota Sibolga dengan realisasi fisik 95% dan nilai KDP sebesar Rp1.283.954.150,00.
  - e. Peningkatan Jalan Kesumber Mata Air PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga dengan realisasi fisik 80% dan nilai KDP sebesar Rp2.409.135.810,00
  - f. Pemeliharaan berkala dan peningkatan Jalan Bukit Barisan Kota Sibolga dengan realisasi fisik 35% dan nilai KDP sebesar Rp905.861.950,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

3. Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp276.566.479,91 berupa reklasifikasi menjadi aset lain-lain karena kondisi rusak berat yaitu sumur bor dan instalasi RPH Aek Parombunan pada Dinas Perikanan KPP sebesar Rp9.000.000,00, reklas ke aset lain-lain yaitu kelebihan bayar 2 paket kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp51.649.824,85 dan kelebihan bayar 9 paket kegiatan pada Dinas PUPR sebesar Rp215.916.655,06.
4. Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp64.502.000,00 reklas belanja modal jalan kota menjadi beban perjalanan dinas pada Dinas PUPR.
5. Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp147.097.150,00 merupakan belanja modal pembayaran retensi Tahun 2021 pada Dinas PUPR.
6. Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp208.196.950,00 karena direklas belanja jalan kota menjadi beban pemeliharaan jalan kota pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Kota Sibolga TA. 2022 pada Dinas PUPR.

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>19.850.697.129,82</b>	<b>19.062.603.098,82</b>

Saldo aset tetap lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp19.850.697.129,82 mengalami kenaikan sebesar Rp788.094.031,00 atau 4,13% dibandingkan tahun 2021. Mutasi aset tetap lainnya yang terjadi selama tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5. 55 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 01 Januari 2022</b>	<b>19.062.603.098,82</b>
Koreksi Tambah :	0,00
Saldo Awal Setelah Koreksi	<b>19.062.603.098,82</b>
Penambahan	<b>4.174.539.426,00</b>
• <i>Belanja Modal Tahun 2022</i>	3.287.495.750,00
• <i>Reklas dari Peralatan dan Mesin</i>	14.834.496,00
• <i>Mutasi Masuk</i>	5.500.000,00
• <i>Reklas dari Barang dan Jasa</i>	640.081.800,00
• <i>Reklas dari Aset Tidak Berwujud</i>	33.500.000,00
• <i>Kapitalisasi</i>	59.217.000,00
• <i>Penerimaan hibah</i>	133.910.380,00
Pengurangan	<b>3.386.445.395,00</b>
• <i>Ekstrakomptabel</i>	2.588.631.758,00
• <i>Mutasi Keluar</i>	5.500.000,00
• <i>Reklas ke Peralatan dan Mesin</i>	2.500.000,00
• <i>Reklas ke Aset Tak Berwujud</i>	15.000.000,00
• <i>Reklas ke Aset Lain-lain</i>	698.411.528,00
• <i>Reklas ke Barang dan Jasa</i>	76.402.109,00
<b>Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022</b>	<b>19.850.697.129,82</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan aset tetap lainnya tahun berjalan dengan rincian:

1. Pertambahan saldo aset tetap lainnya karena direklas dari peralatan dan mesin sebesar Rp145.200,00 pada Dinas Pendidikan dan sebesar Rp14.689.296,00 di Dinas PPKB pada kegiatan KIT Stunting siap nikah.
2. Mutasi aset tetap lainnya berupa pahatan batu sebesar Rp5.500.000,00 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp640.081.800,00 terdiri dari reklas barang dan jasa menjadi aset tetap lainnya berupa peta jaringan sebesar Rp611.920.800,00 pada Dinas PUPR dan reklas barang dan jasa ke ATL sebesar Rp28.161.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa buku dan simbol drumband.
4. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp33.500.000,00 yaitu reklas dari Aset Tidak Berwujud berupa aplikasi laporan bulanan.
5. Penambahan karena adanya kapitalisasi beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp59.217.000,00 di Dinas Pendidikan pada kegiatan pembelian buku, alat laboratorium dan mobiler.
6. Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp133.910.380,00 karena adanya hibah dari Perpustakaan Nasional ke Dinas Pendidikan berupa buku.

Pengurangan aset tetap lainnya tahun berjalan dengan rincian:

1. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp2.487.600.055,00 adalah belanja modal aset tetap yang tidak menjadi aset tetap karena dibawah nilai kapitalisasi berupa buku sebesar Rp2.461.445.451,00 pada Dinas Pendidikan dan buku sebesar Rp127.186.307,00 pada Dinas Perpustakaan, sehingga dicatat secara ekstrakomptabel.
2. Pengurangan aset tetap lainnya karena reklas peralatan mesin sebesar Rp2.500.000,00 di Dinas Pendidikan.
3. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp15.000.000,00 karena direklas ke aset tidak berwujud berupa aplikasi di Dinas Pendidikan.
4. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp698.411.528,00 karena direklas ke aset lain-lain pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu kegiatan rehab pagar dan gapura pintu masuk kawasan objek wisata pelabuhan lama.
5. Pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp76.402.109,00 karena direklas ke beban barang dan jasa yaitu reklas belanja modal sebesar Rp64.002.109,00 menjadi persediaan yang akan diserahkan pada masyarakat di Dinas Pendidikan dan belanja modal buku yang direklas menjadi bahan cetak sebesar Rp12.000.000,00 di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

<b>5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>15.612.846.477,22</b>	<b>5.698.880.169,00</b>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 sebesar Rp15.612.846.477,22 mengalami kenaikan sebesar Rp9.913.966.308,22 atau 173,96% dibandingkan dengan tahun 2021.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terjadi selama tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5. 56 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo Awal Per 01 Januari 2022</b>	<b>5.698.880.169,00</b>
Koreksi Tambah Saldo Awal	<b>0,00</b>
Saldo Setelah Koreksi	<b>5.698.880.169,00</b>
Penambahan	<b>16.838.896.273,00</b>
• Kapitalisasi	876.216.776,00
• Reklas dari Gedung dan Bangunan	5.961.012.427,00
• Reklas dari Jaringan Irigasi dan Jaringan	10.001.667.070,00
Pengurangan	<b>6.924.929.964,78</b>
• Reklas Ke Gedung dan Bangunan	1.941.371.100,00
• Reklas Ke Peralatan dan Mesin	56.420.000,00
• Reklas Ke Jaringan Irigasi dan Jaringan	937.991.500,00
• Reklas ke piutang lainnya (Uang muka pengadaan barang dan jasa)	3.740.956.008,94
• Reklas ke Aset Lain-lain	248.191.355,84
<b>Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022</b>	<b>15.612.846.477,22</b>

Penambahan saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan karena kapitalisasi sebesar Rp876.216.776,00 yang terdiri dari kapitalisasi belanja persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya pada kegiatan peningkatan jalan Bakti II TNI Parombunan Kota Sibolga sebesar Rp699.999.576,00, kapitalisasi beban barang dan jasa pada kegiatan rehab gedung nasional Kota Sibolga sebesar Rp150.867.500,00, kapitalisasi beban barang dan jasa pada kegiatan jalan murai Kota Sibolga sebesar Rp25.349.700,00. Ketiga kegiatan ini dikelola oleh Dinas PUPR.

Pengurangan KDP karena adanya mutasi sebagai berikut:

1. Reklas ke gedung dan bangunan pada Dinas PUPR sebesar Rp1.671.893,60 yaitu pembangunan gedung area penitipan dan kamar mandi di kawasan pelabuhan lama.
2. Reklas ke gedung dan bangunan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp269.477.500,00 berupa:
  - a. Pembangunan Gerbang dan Area Parkir Pelabuhan Lama Rp49.071.200,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - b. Pembangunan Food Court Pelabuhan Lama Rp91.180.400,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - c. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Pelabuhan Lama Rp15.405.100,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - d. Rehab Area Taman dan Selasar Pelabuhan Lama Rp23.129.600,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  - e. Rehab Open Space Pantai Ujung Sibolga ke Pelabuhan Lama Rp90.691.200,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Reklas ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp56.420.000,00 yaitu biaya umum pengadaan mobiler Tahun Anggaran 2020.
4. Uang muka sebesar Rp3.740.956.008,94 adalah piutang lainnya akibat adanya selisih antara pembayaran uang muka dengan realisasi fisik pada kegiatan pembangunan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

pasar ikan modern dimana uang muka dibayarkan sebesar Rp5.570.214.427,00 sementara realisasi fisik hanya sebesar Rp1.829.258.418,06 (8,21%).

5. Reklas ke aset lain-lain atas kelebihan bayar sebesar Rp248.191.355,84 pada kegiatan:
  - a. Peningkatan jl. Bakti TNI II 2007 Parombunan Kota Sibolga sebesar Rp10.203.554,36.
  - b. Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan ke Bukit Barisan Kota Sibolga sebesar Rp25.374.908,91.
  - c. Peningkatan jalan Kop. Galung Silitonga Kota Sibolga sebesar Rp55.064.871,05.
  - d. Pemeliharaan berkala dan peningkatan jl. Rasak Kota Sibolga sebesar Rp17.657.304,55.
  - e. Peningkatan jalan ke sumber mata air PDAM Tirta Nauli (Lapen-Hotmix) sebesar Rp139.890.716,97.

Untuk kelebihan pembayaran ini telah dikembalikan seluruhnya ke RKUD Kota Sibolga pada Tahun 2023.

Daftar kegiatan yang berstatus KDP adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 57 Daftar Kegiatan yang Berstatus KDP Sampai Dengan Tahun 2022**

OPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Nilai KDP 2022
Dinas PUPR	2022	Peningkatan Jl. Murai Kota Sibolga	220.350.310,00
Dinas PUPR	2022	Pekerjaan Peningkatan Jl. Kop Galung Kota Sibolga (PEN )	4.396.076.678,95
Dinas PUPR	2022	Peningkatan Jl. Bakti TNI II 2007 Parombunan Kota Sibolga	1.446.369.021,64
Dinas PUPR	2022	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Rasak Kota Sibolga (DAK)	1.266.296.845,45
Dinas PUPR	2022	Peningkatan Jl. Ke Sumber Mata Air PDAM Tirta Nauli (Lapen-Hotmix) Kota Sibolga	2.269.245.093,03
Dinas PUPR	2022	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jl. Bukit Barisan Kota Sibolga (DAK)	880.487.041,09
Dinas PUPR	2013	Pembangunan Kantor Sapol PP Kota Sibolga	40.200.880,00
Dinas PUPR	2013	Rehabilitas Total Kantor PMK, Kantor PKK dan Kantor KNPI Kota Sibolga	102.161.555,00
Dinas PUPR	2013	Rehabilitas Total Kantor KPU Kota Sibolga	56.879.968,00
Dinas PUPR	2013	Pembangunan Mess Pemko Sibolga di Jalan Sei Musi No.35 Medan	50.785.686,00
Dinas PUPR	2013	Rehabilitas Pagar Gedung Nasional Kota Sibolga	40.200.880,00
Dinas PUPR	2022	Rehab Gedung Nasional Kota Sibolga	150.867.500,00
Dinas Perindag	2019	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan - Hibah dari Kementerian Perdagangan-Pasar Inpres Sibolga	1.133.656.600,00
Dinas Perindag	2022	Perencanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Sibolga Nauli	589.212.000,00
Dinas Perindag	2022	Biaya umum Pembangunan Pasar Dewa Sakti	211.620.700,00
Dinas PKPLH	2020	Kerangka Acuan Pembangunan Pasar Sibolga Nauli	750.000.000,00
Dinas Perikanan KPP	2022	Pembangunan pasar ikan modern	2.008.435.718,06
<b>JUMLAH</b>			<b>15.612.846.477,22</b>

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

<b>5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>(746.241.551.364,99)</b></u>	<u><b>(668.281.407.340,10)</b></u>

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp746.241.551.364,99 mengalami kenaikan sebesar Rp77.960.144.024,89 atau 11,67% dibanding tahun 2021 dengan rincian:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 58 Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021**

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(301.358.943.311,99)	(273.631.764.795,10)
3	Gedung dan Bangunan	(86.825.004.895,00)	(80.778.263.275,00)
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	(358.057.603.158,00)	(313.871.379.270,00)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>(746.241.551.364,99)</b>	<b>(668.281.407.340,10)</b>

Untuk rincian akumulasi penyusutan OPD Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

**5.3.1.4 Aset Lainnya**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>136.168.650.020,69</b>	<b>116.056.780.831,32</b>

Saldo Aset Lainnya sebesar Rp136.168.650.020,69 mengalami kenaikan sebesar Rp20.111.869.189,37 atau 17,33% dibanding tahun 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 59 Rincian Aset Lainnya Tahun 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	12.867.918.486,66
2	Aset Tidak Berwujud	4.395.484.463,00
3	Aset Lain-lain	119.312.877.071,03
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(407.630.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>136.168.650.020,69</b>

**5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>12.867.918.486,66</b>	<b>13.093.337.501,94</b>

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp12.867.918.486,66 dan Rp13.093.337.501,94 dengan rincian:

**Tabel 5. 60 Mutasi Aset Lainnya TGR selama tahun 2022**

Jenis TGR	2021	Koreksi	Reklas	Pembayaran TGR	Saldo Akhir TGR
Bendahara	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
Pegawai Bukan Bendahara	775.503.104,43	0,00	0,00	17.840.143,00	757.662.961,43
Pihak Ketiga	12.212.834.397,51	0,00	0,00	207.578.872,28	12.005.255.525,23
<b>TOTAL</b>	<b>13.093.337.501,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.419.015,28</b>	<b>12.867.918.486,66</b>

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tagihan TGR Bendahara sebesar Rp105.000.000,00 merupakan tagihan TGR Bendahara yaitu ketekoran kas TA 2012 yang dicatat sebagai aset Lain-lain pada Neraca tahun sebelumnya, namun telah memiliki Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), ketekoran kas ini direklas menjadi tagihan jangka panjang. Ketekoran kas ini sebelumnya sebesar Rp120.000.000,00 dan telah disetorkan ke rekening kas daerah sebesar Rp15.000.000,00 pada tanggal 23 mei 2014.
2. Selama tahun 2022, terdapat penerimaan atas TGR sebesar Rp225.419.015,28.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>4.395.484.463,00</b>	<b>2.908.175.463,00</b>

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 saldo Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp1.487.309.000,00 naik 51,14% dari Tahun 2021. Mutasi aset tidak berwujud yang terjadi selama tahun 2022 dapat dijelaskan dengan rincian:

**Tabel 5. 61 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Bruto per 01 Januari 2022 :</b>	<b>2.908.175.463,00</b>
Amortisasi s/d 2022	407.630.000,00
<b>Saldo Awal Netto per 01 Januari 2022</b>	<b>2.500.545.463,00</b>
Penambahan	<b>1.520.809.000,00</b>
• Reklas dari BM Aset Tetap Lainnya	1.260.634.000,00
• Reklas dari Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00
• Reklas dari Peralatan dan Mesin	245.175.000,00
• Reklas dari Belanja Barang Jasa BOS	5.000.000,00
Pengurangan	33.500.000,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya	33.500.000,00
<b>Saldo Akhir Bruto</b>	<b>4.395.484.463,00</b>
Amortisasi 2022	407.630.000,00
Beban Amortisasi 2022	0,00
<b>Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud</b>	<b>3.987.854.463,00</b>

Rincian lebih lanjut atas mutasi saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

<b>5.3.1.4.3 Aset Lain-lain</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>119.312.877.071,03</b>	<b>100.462.897.866,38</b>

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.312.877.071,03 mengalami kenaikan sebesar Rp18.849.979.204,65 atau 18,76% dengan rincian:

**Tabel 5. 62 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
	<b>Saldo Awal Aset Lain-lain 01 Januari 2022</b>	<b>220.463.172.336,35</b>
<b>1</b>	<b>Aset Lain-lain-Tanah</b>	
	Saldo awal	24.868.040.000,00
	Mutasi Tambah	0,00
	Mutasi Kurang	0,00
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>24.868.500.440,00</b>
<b>2</b>	<b>Aset Lain-lain-Peralatan dan Mesin</b>	
	Saldo Awal	<b>79.042.903.137,35</b>
	Koreksi tambah	0,00
	Koreksi kurang	0,00
	Saldo Setelah Koreksi Saldo Awal	<b>79.042.903.137,35</b>
	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>5.005.426.612,00</b>



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	<i>Reklas dari Peralatan dan Mesin</i>	5.005.426.612,00
	<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>4.676.832.359,00</b>
	<i>Penghapusan BMD</i>	4.676.832.359,00
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>79.371.497.390,35</b>
<b>3</b>	<b>Aset lain-lain-Gedung dan Bangunan</b>	
	Saldo Awal	<b>61.097.051.958,00</b>
	Koreksi	0,00
	<b>Saldo Awal Setelah Koreksi</b>	<b>61.097.051.958,00</b>
	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>19.560.223.892,00</b>
	<i>Reklas dari Gedung Bangunan</i>	13.515.178.778,00
	<i>Mutasi Masuk</i>	6.045.045.114,00
	<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>8.079.378.495,00</b>
	<i>Mutasi Keluar</i>	6.045.045.114,00
	<i>Pemusnahan BMD</i>	2.034.333.381,00
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>72.577.897.355,00</b>
<b>4</b>	<b>Aset lain-lain- Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	
	Saldo Awal	<b>52.891.509.289,00</b>
	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>9.000.000,00</b>
	<i>Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	9.000.000,00
	<b>Mutasi Kurang :</b>	0,00
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>52.900.509.289,00</b>
<b>5</b>	<b>Aset lain-lain-Aset Tetap Lainnya</b>	
	Saldo Awal	<b>2.389.264.446,00</b>
	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>698.411.528,00</b>
	<i>Reklas dari Aset Tetap Lainnya</i>	698.411.528,00
	<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>698.411.528,00</b>
	<i>Pemusnahan BMD</i>	698.411.528,00
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>2.389.264.446,00</b>
<b>6</b>	<b>Aset lain-lain-Aset Tak Berwujud</b>	
	Saldo Awal Bruto	668.857.566,00
	Amortisasi s/d 2021	494.914.500,00
	<b>Saldo Awal Netto</b>	<b>173.943.066,00</b>
	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022 Netto</b>	<b>173.943.066,00</b>
<b>7</b>	<b>Aset lain-lain-Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	
	Saldo Awal	0,00
	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>2.313.043.062,00</b>
	<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>2.313.043.062,00</b>
<b>8</b>	<b>Aset lain-lain-Kelebihan bayar Paket Kegiatan</b>	
	Saldo Awal	<b>0,00</b>
	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>748.258.402,65</b>
	<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>748.258.402,65</b>
	<b>Saldo Akhir Aset Lain-Lain 31 Desember 2022 (Jumlah 1 s/d 8)</b>	<b>235.342.913.451,00</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>(116.030.036.379,97)</b>
	<b>Saldo Akhir Aset Lain-lain Netto</b>	<b>119.312.877.071,03</b>

Rincian aset lain-lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

Pada Tahun 2022 terdapat Dana Bagi Hasil yang Belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kota Sibolga, tetapi sudah dicatat pada LRA. Dana ini merupakan *Treasury Deposit Facility* dimana hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility*



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun 2022. Dana ini disimpan pada Rekening Lain BI TDF-TKD Kota Sibolga senilai Rp 2.313.043.062,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 63 Data Saldo Treasury Deposit Facility Transfer Ke Daerah (TDF-TKD)  
Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo Pokok Tanggal 31 Desember 2022
<b>1</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan</b>	<b>921.718.398,00</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PPh Pasal 21	854.500.729,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PPh Pasal 25/29 OP	67.217.669,00
<b>2</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>537.201.900,00</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	14.898.170,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	47.238.401,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	589.677,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	1.869.847,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai, Tahap ke-3 TA 2022 DBH PBB Bagi Rata	472.605.805,00
<b>3</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi</b>	<b>1.023.238,00</b>
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Minyak Bumi 15%	990.367,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Minyak Bumi 0.5%	32.871,00
<b>4</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi</b>	<b>2.665.741,00</b>
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Gas Bumi 30%	2.622.057,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	43.684,00
<b>5</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara</b>	<b>561.275.100,00</b>
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Minerba - Royalti	561.275.100,00
<b>6</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi</b>	<b>28.324.576,00</b>
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	2.992.512,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	25.332.064,00
<b>7</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan</b>	<b>26.774.958,00</b>
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Kehutanan - PSDH	26.774.958,00
<b>8</b>	<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan</b>	<b>211.753.211,00</b>
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH SDA Perikanan	211.753.211,00
<b>9</b>	<b>Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</b>	<b>22.305.940,00</b>
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 DBH Cukai Hasil Tembakau	22.305.940,00
	<b>Jumlah .....</b>	<b>2.313.043.062,00</b>

Berikut daftar kelebihan bayar kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dicatat pada aset lain-lain

**Tabel 5. 64 daftar kelebihan bayar kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dicatat pada aset lain-lain**

No	Uraian Pekerjaan	OPD	Nilai Kelebihan Bayar
1	Rehab Rumah Dinas Kepala dan Guru Sekolah (2 Rumah)	Disdikbud	24.681.949,48
2	Rehab Ruang Guru SMPN6	Disdikbud	3.256.247,94



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

No	Uraian Pekerjaan	OPD	Nilai Kelebihan Bayar
3	Rehab Ruang Kelas SMPN6	Disdikbud	5.468.452,43
4	Conblock SDN 084081 dan SDN 081082	Disdikbud	5.972.769,72
5	Rehab Gedung Kantor dan Pembangunan Ruang Komputer SDN 087695	Disdikbud	13.901.367,58
6	Penataan Area kuliner Pasar Belakang	Kec. Sibolga Kota	16.058.835,81
7	Pembangunan Gerbang dan Area Parkir Pelabuhan Lama	Disparpora	115.300.269,80
8	Pembangunan Selasar Pemecah Ombak	Disparpora	2.155.077,36
9	Rehab Open Space Pantai Ujung Sibolga	Disparpora	45.947.074,14
10	Rehab Area Taman dan Selasar Pelabuhan Lama	Disparpora	1.913.600,00
11	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Sibolga Baru	DPUPR	19.265.112,82
12	Peningkatan Jalan Kader Manik Kota Sibolga	DPUPR	14.625.171,26
13	Peningkatan Jalan Tapian Kota Sibolga	DPUPR	14.887.036,21
14	Peningkatan Jalan Rajawali Kota Sibolga	DPUPR	28.014.667,13
15	Penataan Selasar Wisata Sungai Aek Doras	Disparpora	49.494.747,49
16	Peningkatan Jalan Bakti TNI II 2007 Parombunan Kota Sibolga	DPUPR	10.203.554,36
17	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Ke Bukit Barisan Kota Sibolga	DPUPR	25.374.908,91
18	Peningkatan Jalan Amir Sitanggang Kota Sibolga	DPUPR	17.274.989,23
19	Peningkatan Jalan Com Yos Sudarso Kota Sibolga	DPUPR	19.052.874,94
20	Peningkatan Jalan Kop Galung Silitonga Kota Sibolga	DPUPR	55.064.871,05
21	Peningkatan Jalan Buchari Koto Kota Sibolga	DPUPR	6.205.816,80
22	Peningkatan Jalan MS Sianturi Kota Sibolga	DPUPR	22.152.254,01
23	Peningkatan Jalan Tor Simarbarimbing Kota Sibolga	DPUPR	74.438.732,66
24	Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Rasak Kota Sibolga	DPUPR	17.657.304,55
25	Peningkatan Jalan Ke Sumber Mata Air PDAM Tirta Nauli (Lapen-Hotmix)	DPUPR	139.890.716,97
<b>TOTAL</b>			<b>748.258.402,65</b>

**5.3.2 KEWAJIBAN**

**Tahun 2022  
(Rp)**

97.996.879.460,49

**Tahun 2021  
(Rp)**

8.505.762.363,40

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

**Tahun 2022  
(Rp)**

14.811.128.749,49

**Tahun 2021  
(Rp)**

8.505.762.363,40

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemko Sibolga per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.811.128.749,49 mengalami kenaikan sebesar Rp6.305.366.386,09 atau 74,13% dengan rincian:

**Tabel 5. 65 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	59.155.237,00	33.986.027,00	25.169.210,00
Pendapatan Diterima Dimuka	101.023.059,00	139.515.791,00	(38.492.732,00)
Utang Belanja	14.650.950.453,49	8.332.260.545,40	6.318.689.908,09
<b>Jumlah</b>	<b>14.811.128.749,49</b>	<b>8.505.762.363,40</b>	<b>6.305.366.386,09</b>

**5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

**Tahun 2022  
(Rp)**

59.155.237,00

**Tahun 2021  
(Rp)**

33.986.027,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.155.237,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

merupakan utang pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian:

**Tabel 5. 66 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga Per 31 Desember 2022**

No.	OPD	Utang PFK 2021 (Rp)	Penyetoran Utang PFK 2021 (Rp)	Sisa Utang PFK Tahun 2021 (Rp)	Utang PFK 2022 (Rp)	Utang PFK Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.447.641,00	33.447.641,00	0,00	51.588.443,00	51.588.443,00
2	Kecamatan Sibolga Selatan	538.386,00	538.386,00	0,00	0,00	0,00
3	BPBD	0,00	0,00	0,00	3.896.231,00	3.896.231,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPPA	0,00	0,00	0,00	632.088,00	632.088,00
5	Dinas Koperasi UKMK	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
7	Dinas Perikanan dan KPP	0,00	0,00	0,00	1.158.475,00	1.158.475,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.986.027,00</b>	<b>33.986.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.155.237,00</b>	<b>59.155.237,00</b>

- Utang PFK tahun 2022 pada Dinas Pendidikan merupakan utang pajak pusat pada satuan pendidikan yang bersumber dari dana BOS yang terdiri dari PPN sebesar Rp48.876.831,00, PPh 21 sebesar Rp2.202.300,00 dan PPh 23 sebesar Rp509.312,00. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2023.
- Utang PFK tahun 2022 pada Kecamatan Sibolga Selatan merupakan utang PPh sebesar Rp28.604,00 dan utang PPN Pusat sebesar Rp509.782,00. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2023.
- Utang PFK tahun 2022 pada BPDB sebesar Rp3.896.231,00 terdiri dari PPh 22 sebesar Rp326.883,00, PPh 23 sebesar Rp1.390.800,00 dan PPN sebesar Rp2.178.548,00. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Januari 2023.
- Utang PFK tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPPA sebesar Rp632.088,00 terdiri dari PPh 23 sebesar Rp83.000,00, dan PPN sebesar Rp549.000,00. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Januari 2023.
- Utang PFK tahun 2022 pada Dinas Koperasi UKMK sebesar Rp1.340.000,00 merupakan utang PPh 21. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Januari 2023.
- Utang PFK tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp540.000,00 merupakan utang PPh 21. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Januari 2023.
- Utang PFK tahun 2022 pada Dinas Perikanan dan KPP sebesar Rp1.158.475,00 terdiri dari utang PPh 22 sebesar Rp169.358,00 dan utang PPN sebesar Rp989.117,00. Utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada Februari 2023.

<b>5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>101.023.059,00</b>	<b>139.515.791,00</b>

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp101.023.059,00 dan Rp139.515.791,00 dengan rincian:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

1. Pendapatan pajak reklame yang diterima dan belum menjadi hak Pemko Sibolga tetapi telah dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp76.023.049,18.
2. Sewa lokasi ATM di Rumah Sakit Umum F. L. Tobing oleh PT. BNI sebesar Rp8.333.340,00 dan PT. Bank Sumut sebesar Rp16.666.670,00.

Rincian atas daftar wajib pajak reklame dan nilai pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

<b>5.3.2.1.3 Utang Belanja</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>14.650.950.453,49</b>	<b>8.332.260.545,40</b>

Utang belanja pada tahun 2022 sebesar Rp14.650.950.453,49 terdiri dari:

**Tabel 5. 67 Utang Belanja Tahun 2021 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Belanja Pegawai	6.003.106.538,00	5.816.057.837,40	187.048.700,60
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.771.529.754,49	1.226.998.972,00	5.544.530.782,49
3	Utang Belanja Hibah	141.000.000,00	0,00	141.000.000,00
4	Utang Belanja Modal	1.735.314.161,00	1.289.203.736,00	446.110.425,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>14.650.950.453,49</b>	<b>8.332.260.545,40</b>	<b>6.318.689.907,60</b>

<b>5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>6.003.106.538,00</b>	<b>5.816.057.837,40</b>

Utang belanja pegawai sebesar Rp6.003.106.538,00 merupakan utang belanja pegawai BLUD.

<b>5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan jasa</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>6.771.529.754,49</b>	<b>1.226.998.972,00</b>

Utang Belanja barang dan Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.771.529.754,49 naik Rp5.544.530.782,49 atau 451% dibanding dengan Tahun Anggaran 2021. Utang ini terdiri dari:

**Tabel 5. 68 Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Utang Belanja Barang	4.232.820.523,49	0,00	4.232.820.523,49
2	Utang Belanja Jasa	2.494.519.981,00	1.026.144.972,00	1.468.375.009,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	16.964.250,00	0,00	16.964.250,00
4	Utang Belanja Barang dan jasa BLUD	27.225.000,00	200.854.000,00	(173.629.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>6.771.529.754,49</b>	<b>1.226.998.972,00</b>	<b>5.544.530.782,49</b>

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 21**.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Hibah</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>141.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Utang Belanja Hibah sebesar Rp141.000.000,00 merupakan utang hibah kepada HKBP Distrik IX Sibolga-Tapteng-Nias yang dianggarkan untuk dibayar pada tahun 2023 di Sekretariat Daerah.

<b>5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Modal</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.735.314.161,00</b>	<b>1.289.203.736,00</b>

Utang Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1.735.314.161,00 naik sebesar Rp446.110.425,00 atau 34,60% dari Tahun 2021. Utang ini tercatat pada 5 (lima) OPD yang dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

<b>5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>83.185.750.711,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo kewajiban jangka panjang Pemko Sibolga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp83.185.750.711,00 dan Nihil. Merupakan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dengan periode jatuh tempo sampai dengan Maret 2030.

<b>5.3.3 EKUITAS</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>1.578.676.453.584,52</b>	<b>1.616.146.509.073,86</b>

Saldo Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.578.676.453.584,52 mengalami penurunan sebesar Rp37.470.055.489,34 atau 2,32% jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2021.

### **Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional**

#### **5.4. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemko Sibolga yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional sebagai berikut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.4.1. Pendapatan - LO</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>622.665.773.399,06</b>	<b>604.411.674.606,54</b>

Pendapatan LO adalah hak Pemko Sibolga yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan LO Pemko Sibolga tahun 2022 sebesar Rp622.665.773.399,06 mengalami kenaikan sebesar Rp18.254.098.792,52 atau 3,02% dibandingkan dengan tahun 2021, dengan rincian:

**Tabel 5. 69 Rincian Pendapatan LO Per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	84.645.764.949,69	75.445.977.142,15	9.199.787.807,54
2	Pendapatan Transfer – LO	527.385.555.457,00	504.919.839.456,00	22.465.716.001,00
3	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	10.634.452.992,37	24.045.858.008,39	(13.411.405.016,02)
	<b>Total Pendapatan - LO</b>	<b>622.665.773.399,06</b>	<b>604.411.674.606,54</b>	<b>18.254.098.792,52</b>

<b>5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>84.645.764.949,69</b>	<b>75.445.977.142,15</b>

Pendapatan Asli daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp84.645.764.949,69 turun sebesar 12,19% dari tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat diuraikan dengan rincian:

**Tabel 5. 70 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Per 31 Desember 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	12.332.072.500,00	11.703.648.837,00	628.423.663,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.687.308.666,80	4.153.537.577,00	533.771.089,80
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.860.922.486,94	7.300.219.196,45	5.560.703.290,49
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah – LO	54.765.461.295,95	52.288.571.531,70	2.476.889.764,25
	<b>Jumlah</b>	<b>84.645.764.949,69</b>	<b>75.445.977.142,15</b>	<b>9.199.787.807,54</b>

<b>5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO.</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>12.332.072.500,00</b>	<b>11.703.648.837,00</b>

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (BPKPAD) Kota Sibolga. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2022 dengan rincian:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 71 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2022**

NO.	Uraian	LRA 2022	LO 2022	Kenaikan/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pajak Hotel-LO	368.215.129,00	388.255.442,00	(20.040.313,00)
2	Pajak Losmen-LO	26.065.000,00	26.065.000,00	0,00
2.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	68.299.405,00	72.591.125,00	(4.291.720,00)
3.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	819.062.300,00	821.712.300,00	(2.650.000,00)
4.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	1.199.837.672,00	1.221.194.139,00	(21.356.467,00)
5.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	13.337.750,00	15.407.000,00	(2.069.250,00)
6.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	34.054.700,00	34.054.700,00	0,00
7.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	18.175.000,00	18.275.000,00	(100.000,00)
8.	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	300.000,00	300.000,00	0,00
9.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	337.311.395,00	361.910.731,00	(24.599.336,00)
10.	Pajak Reklame Kain-LO	26.495.800,00	27.422.876,00	(927.076,00)
11	Pajak Reklame Berjalan-LO	11.186.800,00	11.186.800,00	0,00
12.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	5.605.771.275,00	5.606.355.651,00	584.376,00
13.	Pajak Parkir-LO	73.883.050,00	74.303.050,00	(420.000,00)
14.	PBBP2-LO	2.248.691.632,00	2.333.994.086,00	(85.302.454,00)
15.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.185.497.150,00	1.185.497.150,00	0,00
16.	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	133.547.450,00	133.547.450,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.169.731.508,00</b>	<b>12.332.072.500,00</b>	<b>(162.340.992,00)</b>

Adapun Selisih Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp368.215.129 ditambah piutang Hotel yang timbul pada tahun 2022 sebesar Rp20.040.000 sehingga realisasi pajak hotel disajikan sebesar Rp388.255.442,00 pada Laporan Operasional.
2. Realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp68.299.405,00 ditambah dengan piutang pajak restoran TA. 2022 sebesar Rp13.091.720,00 dikurangi tunggakan pajak restoran tahun 2021 yang dibayar di tahun 2022 sebesar Rp8.800.000,00 sehingga realisasi pajak restoran di LO sebesar Rp72.591.125,00.
3. Realisasi Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LRA sebesar Rp819.062.300,00 ditambah piutang yang timbul pada tahun 2022 sebesar Rp10.215.000,00 kemudian dikurang penerimaan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp7.565.000,00 sehingga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya dicatat sebesar Rp821.712.300,00 pada laporan operasional.
4. Realisasi Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LRA sebesar Rp1.199.837.672,00 ditambah piutang yang timbul pada tahun 2022 sebesar Rp26.051.167,00 kemudian dikurang penerimaan piutang tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp4.694.700,00 sehingga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya dicatat sebesar Rp1.221.194.139,00 pada laporan operasional.
5. Realisasi Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LRA sebesar Rp13.337.750,00 ditambah piutang yang timbul pada tahun 2022 sebesar Rp2.069.250,00 sehingga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya dicatat sebesar Rp15.407.000,00
6. Realisasi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LRA sebesar Rp18.175.000,00 ditambah piutang yang timbul pada tahun 2022 sebesar Rp100.000,00 sehingga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) dicatat sebesar Rp18.175.000,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

7. Realisasi Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebesar Rp337.311.395,00 ditambah dengan piutang pajak reklame TA. 2021 sebesar Rp9.556.000,00 dan ditambah realisasi pendapatan diterima di muka Tahun 2021 yang menjadi hak 2022 sebesar Rp 97.066.183,00 dikurangi penerimaan piutang 2021 sebesar Rp 6.688.990,00 dan realisasi pendapatan diterima di muka Tahun 2022 yang menjadi hak 2023 sebesar Rp 75.333.857,00 sehingga realisasi pajak reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron di LO sebesar Rp 361.910.731,00
8. Realisasi Pajak Reklame Kain sebesar Rp26.495.800,00 ditambah dengan realisasi pendapatan diterima di muka Tahun 2021 yang menjadi hak 2022 sebesar Rp1.616.268,00 dikurangi realisasi pendapatan diterima di muka Tahun 2022 yang menjadi hak 2023 sebesar Rp 689.192,00 sehingga realisasi pajak reklame Kain di LO sebesar Rp27.422.876,00
9. Realisasi Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri pada LRA dicatat sebesar Rp5.605.771.275,00 bertambah karena adanya piutang Tahun 2022 sebesar Rp448.265.652,00 kemudian berkurang karena adanya penerimaan piutang sebesar Rp447.681.276,00 sehingga realisasi pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri pada LO dicatat sebesar Rp5.606.355.651,00
10. Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp73.883.050,00 ditambah dengan piutang yang timbul pada tahun 2022 sebesar Rp420.000,00 sehingga realisasi pajak parkir di LO sebesar Rp 74.303.050,00.
11. Realisasi pajak PBB-P2 sebesar Rp2.248.691.632,00 ditambah dengan piutang pajak PBB TA. 2022 sebesar Rp 415.295.302,00 dikurangi tunggakan pajak PBB-P2 Tahun 2021 yang dibayar di tahun 2022 sebesar Rp 329.992.848,00 sehingga realisasi pajak PBB-P2 di LO sebesar Rp 329.992.848,00.

<b>5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO.</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>4.687.308.666,80</b>	<b>4.153.537.577,00</b>

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemko Sibolga. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi TA. 2022 berdasarkan jenis retribusi dengan rincian:

**Tabel 5. 72 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2022**

No	URAIAN	LRA 2022	LO 2022	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO	187.158.500,00	199.383.500,00	(12.225.000,00)
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	1.603.212.000,00	1.603.212.000,00	0,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	399.976.954,80	399.976.954,80	0,00
5	Retribusi Pelataran-LO	366.383.000,00	366.383.000,00	0,00
6	Retribusi Los-LO	198.619.000,00	198.619.000,00	0,00
7	Retribusi Kios-LO	65.100.000,00	61.000.000,00	4.100.000,00
8	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO	13.960.000,00	12.295.000,00	1.665.000,00
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	27.680.000,00	27.680.000,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

No	URAIAN	LRA 2022	LO 2022	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
10	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	11.528.000,00	11.528.000,00	0,00
11	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	349.132.410,00	346.007.410,00	3.125.000,00
12	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	21.058.650,00	21.058.650,00	0,00
13	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	104.887.500,00	104.887.500,00	0,00
14	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	700.000,00	700.000,00	0,00
15	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	183.602.000,00	183.602.000,00	0,00
17	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	77.664.000,00	77.664.000,00	0,00
18	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	31.830.000,00	31.830.000,00	0,00
19	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO	993.932.500,00	993.932.500,00	0,00
20	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	16.549.152,00	16.549.152,00	0,00
21	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	300.000,00	300.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.683.973.666,80</b>	<b>4.687.308.666,80</b>	<b>(3.335.000,00)</b>

Jika dilihat pada tabel diatas, terdapat perbedaan antara pendapatan retribusi di LRA dan LO sebesar Rp3.335.000,00 dengan rincian:

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp12.225.000,00 ditambah piutang 2022 sebesar Rp21.425.000,00 dikurang penerimaan piutang tahun 2021 sebesar Rp 9.200.000,00 sehingga realisasi retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas-LO menjadi sebesar Rp 199.383.500,00.
2. Retribusi Pelayanan Pasar-Kios pada LRA sebesar Rp65.100.000,00 ditambah piutang retribusi pelayanan pasar yang timbul pada tahun 2022 sebesar Rp17.400.000,00 dikurangi penerimaan piutang 2021 sebesar Rp21.500.000,00 sehingga realisasi retribusi pelayanan pasar pada LO menjadi Rp61.000.000,00.
3. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran pada LRA sebesar Rp13.960.000,00 dikurang penerimaan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.665.000,00 sehingga realisasi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran pada LO menjadi Rp12.295.000,00.
4. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada LRA sebesar Rp349.132.410,00 ditambah piutang yang timbul selama tahun 2022 sebesar Rp3.750.000,00, kemudian dikurang penerimaan piutang tahun 2021 sebesar Rp6.875.000,00 sehingga realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada LO menjadi Rp346.007.410,00.

<b>5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>12.860.922.486,94</b>	<b>7.300.219.196,45</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas Penyertaan pada Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA. 2022 sebesar Rp12.860.922.486,94 dengan penjelasan:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 73 Rincian Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO  
Tahun 2022**

(Dalam Rupiah)					
NO	Uraian	LRA	Bertambah	Berkurang	LO
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.046.702.945,44	9.042.321.552,00	6.345.285.984,00	12.743.738.513,44
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.000.000.000,00	117.183.973,50	1.000.000.000,00	117.183.973,50
<b>Total</b>		<b>11.046.702.945,44</b>	<b>9.159.505.525,50</b>	<b>7.345.285.984,00</b>	<b>12.860.922.486,94</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Penambahan sebesar Rp9.042.321.552,00 merupakan deviden yang dibagikan oleh PT. Bank Sumut dan penambahan sebesar Rp117.183.973,50 merupakan deviden dari Perumda Air Minum Tirta Nauli.
2. Pengurangan sebesar Rp6.345.285.984,00 pada Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO merupakan bagian laba tahun 2021 pada PT. Bank Sumut, tbk yang sudah diakui pada laporan operasional tahun 2021.
3. Pengurangan sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO merupakan bagian laba tahun 2021 pada Perumda Air Minum Tirta Nauli yang sudah diakui pada laporan operasional tahun 2021.

**5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>54.765.461.295,95</b>	<b>52.288.571.531,70</b>

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode TA. 2022 sebesar Rp54.765.461.295,95 dengan rincian:

**Tabel 5. 74 Rincian Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun 2022**

NO	Uraian	LRA	LO	Kenaikan (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan -LO	1.664.307.000,00	0,00	1.664.307.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	16.174.900,00	16.174.900,00	0,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.754.166.239,00	1.754.166.239,00	0,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	123.290,32	123.290,32	0,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	560.983,28	(560.983,28)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.884.089.579,69	1.695.738.100,41	188.351.479,28
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	73.382.540,68	73.382.540,68	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	277.686,00	277.686,00	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	207.200,00	207.200,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.644.385,00	1.644.385,00	0,00
11	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	2.042.070,00	2.042.070,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

NO	Uraian	LRA	LO	Kenaikan (Penurunan)
		( Rp)	( Rp)	( Rp)
12	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	75.600,00	75.600,00	0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	411.850,00	411.850,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	84.896,00	84.896,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO	126.236,00	126.236,00	0,00
16	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	14.121,00	14.121,00	0,00
17	Pendapatan Denda PBBP2-LO	65.180.408,00	129.186.103,88	(64.005.695,88)
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	6.938.428,00	6.938.428,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	109.337.967,00	109.337.967,00	0,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan-LO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Komputer-LO	11.801.610,00	11.801.610,00	0,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-LO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO	35.502.000,00	35.502.000,00	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka-LO	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri-LO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel-LO	4.703.377,00	4.703.377,00	0,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota-LO	20.442.184,38	20.442.184,38	0,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO	2.826.000,00	2.826.000,00	0,00
30	Pendapatan dari BLUD-LO	48.819.187.846,00	50.874.998.028,00	(2.055.810.182,00)
31	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO	795.500,00	795.500,00	0,00
<b>Total</b>		<b>54.497.742.914,07</b>	<b>54.765.461.295,95</b>	<b>(267.718.381,88)</b>

Adapun selisih antara komponen Lain-lain PAD yang sah pada LRA dan LO sebesar Rp267.718.381,88 dapat dijelaskan berikut ini:

1. Hasil penjuakan alat angkutan disajikan sebesar Rp1.664.307.000,00 direklas ke surplus penjualan aset lain-lain sehingga hasil penjualan alat angkutan disajikan nihil pada LO.
2. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO merupakan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD Kota Sibolga. Hal ini sesuai Nota dinas Kementerian Keuangan RI Nomor ND-226/PB.3/2023.
3. Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada LRA disajikan sebesar Rp1.884.089.579,69. Pada Tahun 2022 terdapat pembebanan kerugian sebesar Rp37.067.536,00 dan penerimaan pendapatan atas TGR tahun sebelumnya sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Rp 225.419.015,28 sehingga Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dicatat di LO sebesar Rp1.695.738.100,41.

4. Pendapatan Denda Pajak Daerah pada LRA dicatat sebesar Rp65.180.408,00 merupakan pendapatan denda PBB-P2. Pada tahun 2022 timbul Piutang PBB-P2 sebesar Rp129.181.857,36 dan terdapat Penerimaan Piutang denda PBB-P2 2021 sebesar Rp65.176.161,48 sehingga Pendapatan Denda PBBP2-LO disajikan sebesar Rp129.186.103,88 pada LO.
5. Pendapatan BLUD LRA sebesar Rp 48.819.187.846,00 ditambah Piutang Sebesar Rp7.724.130.026,00, biaya transfer bank sebesar Rp175.100,00 dan Pendapatan diterima dimuka 2021 sebesar Rp24.166.670,00 kemudian dikurang Piutang 2021 yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp5.684.328.274,00, pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp8.333.340,00 sehingga Pendapatan BLUD pada LO dicatat sebesar Rp50.874.998.028,00.

**5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO.**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>527.385.555.457,00</b></u>	<u><b>504.919.983.456,00</b></u>

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemko Sibolga, namun ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Realisasi Pendapatan Transfer – LO untuk periode TA. 2022 sebesar Rp527.385.555.457,00 yaitu:

**Tabel 5. 75 Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LRA 2022	LO 2022	Kenaikan/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	488.538.490.242,00	492.967.946.991,00	(4.429.456.749,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	18.430.524.000,00	18.430.524.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer antar Daerah	27.110.100.012,00	15.987.084.466,00	11.123.015.546,00
<b>Jumlah</b>		<b>534.079.114.254,00</b>	<b>527.385.555.457,00</b>	<b>6.693.558.797,00</b>

**5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<u><b>492.967.946.991,00</b></u>	<u><b>470.049.232.046,00</b></u>

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 76 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
A	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	25.450.549.209,00	27.763.592.271,00	(2.313.043.062,00)
B	Dana Alokasi Umum - LO	381.093.828.683,00	383.210.242.370,00	(2.116.413.687,00)
C	Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	31.710.074.701,00	31.710.074.701,00	0,00
D	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	50.284.037.649,00	50.284.037.649,00	0,00
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>488.538.490.242,00</b>	<b>492.967.946.991,00</b>	<b>(4.429.456.749,00)</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Adapun kenaikan dan penurunan transfer pemerintah pusat pada LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih dana bagi hasil LO sebesar Rp2.313.043.062,00 merupakan dana bagi hasil yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kota Sibolga. Dana ini merupakan treasury deposit facility (TDF) dan disimpan pada rekening lain BI TDF-TKD Kota Sibolga.
2. Pada tahun 2022, terdapat pemotongan alokasi DAU Kota Sibolga untuk pembayaran Bunga Pinjaman Dana PEN Daerah sebesar Rp2.116.413.687,00, mekanisme ini sesuai KMK Nomor 12/KM.7/2022 tentang Pemotongan dana alokasi umum sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2021 untuk penyaluran periode bulan mei sampai dengan bulan desember tahun 2022. Hal ini mengakibatkan penambahan Realisasi DAU pada laporan operasional.

<b>5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>18.430.524.000,00</b>	<b>9.173.013.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah. Tidak ada perbedaan nilai realisasi DID antara LRA dan LO yang menunjukkan bahwa penerimaan tersebut merupakan penerimaan bersih operasional tahun anggaran 2022.

<b>5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>15.987.084.466,00</b>	<b>25.697.594.410,00</b>

Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO untuk periode TA. 2022 sebesar Rp15.987.084.466,00 dengan rincian:

**Tabel 5. 77 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LRA 2022	LO 2022	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>A</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>24.260.121.170,00</b>	<b>13.137.105.624,00</b>	<b>11.123.015.546,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil PKB-LO	1.610.345.063,00	797.837.950,00	812.507.113,00
2	Pendapatan Bagi Hasil BBN-KB-LO	1.087.602.167,00	535.383.099,00	552.219.068,00
3	Pendapatan Bagi Hasil PBB-KB-LO	9.489.484.924,00	680.840.260,00	8.808.644.664,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	193.345.949,00	74.036.886,00	119.309.063,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	11.879.343.067,00	11.049.007.429,00	830.335.638,00
<b>B</b>	<b>Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi</b>	<b>2.849.978.842,00</b>	<b>2.849.978.842,00</b>	<b>0,00</b>
1	Bantuan Keuangan umum dari pemerintah Provinsi	2.849.978.842,00	2.849.978.842,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.110.100.012,00</b>	<b>15.987.084.466,00</b>	<b>11.123.015.546,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Selisih antara LRA dan LO pada tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Selisih Pendapatan Dana bagi hasil PKB merupakan piutang tahun 2021 sebesar Rp812.507.113,00
2. Selisih Pendapatan Dana bagi hasil Hasil BBN-KB merupakan piutang tahun 2021 sebesar Rp552.219.068,00
3. Selisih Pendapatan Dana bagi hasil PBB-KB merupakan piutang tahun 2021 sebesar Rp8.808.644.664,00
4. Selisih Pendapatan Dana bagi hasil pajak bahan air permukaan merupakan piutang tahun 2021 sebesar Rp119.309.063,00
5. Selisih Pendapatan Dana bagi hasil pajak rokok merupakan piutang tahun 2021 sebesar Rp830.335.638,00

Pada Tahun 2022 Pemko Sibolga menerima bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dialokasi pada pekerjaan Penataan selasar wisata sungai aek doras yang dikelola Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga.

<b>5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<u>10.634.452.992,37</u>	<u>24.045.858.008,39</u>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO merupakan pendapatan diluar PAD dan Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp10.634.452.992,37 yang terdiri dari:

<b>5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah –LO</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<u>5.896.530.594,37</u>	<u>9.259.194.308,39</u>

Pendapatan Hibah – LO tahun 2022 sebesar Rp5.896.530.594,37. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 78 Rincian Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022**

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	964.138.270,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	4.813.890.415,05
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	49.850.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	65.000.000,00
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	3.651.909,32
	<b>Jumlah.....</b>	<b>5.896.530.594,37</b>

<b>5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<u>964.138.270,00</u>	<u>269.379.454,89</u>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp964.138.270,00 dengan rincian:





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**Tabel 5. 79 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Tahun 2022**

No	OPD Penerimaan	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
1	Dinas Perpustakaan	65.849.000,00	Penerimaan hibah dari perpustakaan nasional berupa peralatan komputer
2	Dinas Perpustakaan	133.910.380,00	Penerimaan hibah dari perpustakaan nasional berupa buku-buku.
3	Dinas Kesehatan	64.378.890,00	Penerimaan hibah dari kementerian kesehatan RI berupa alat laboratorium umum.
4	Kecamatan Sibolga Selatan	700.000.000,00	Penerimaan Hibah dari Kementerian PUPR berupa pembangunan rumah produksi
<b>Jumlah</b>		<b>964.138.270,00</b>	

<b>5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u><b>4.813.890.415,05</b></u>	<u><b>8.966.219.853,50</b></u>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO TA 2022 sebesar Rp4.813.890.415,05 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 80 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah daerah Lainnya Tahun 2022**

No	OPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
1.	Dinas Kesehatan	1.865.197.379,05	Penerimaan Hibah berupa Obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera utara tahun 2022
2.	RSU FL.Tobing	1.693.100.723,00	Penerimaan Hibah berupa Obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera utara tahun 2022
3	RSU FL.Tobing	1.195.047.313,00	Penerimaan Hibah berupa alat kedokteran umum dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera utara tahun 2022
4	Dinas Kesehatan	60.545.000,00	Penerimaan Hibah berupa alat kedokteran umum dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera utara tahun 2022
<b>Jumlah</b>		<b>4.813.890.415,05</b>	

<b>5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u><b>49.850.000,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri – LO pada Tahun 2022 sebesar Rp49.850.000,00 merupakan penerimaan hibah dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk berupa mebel yang diterima oleh Rumah Sakit Umum DR. FL.Tobing kota Sibolga.

<b>5.4.1.3.1.4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri- LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u><b>65.000.000,00</b></u>	<u><b>23.595.000,00</b></u>

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp65.000.000,00. Pendapatan hibah ini berupa gedung



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

dan bangunan dari Rumah sakit Metta medika sibolga dan dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga.

<b>5.4.1.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>3.651.909,32</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.651.909,32. Sumbangan Pihak Ketiga atau Sejenis adalah sumbangan pihak ketiga/sejenisnya yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pada Pemerintah kota Sibolga. Realisasi Pendapatan Hibah per 31 Desember 2022 merupakan kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) senilai Rp3.651.909,32

<b>5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>4.737.922.398,00</u>	<u>14.786.663.700,00</u>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan-LO pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.737.922.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 81 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO Tahun 2021 dan 2022**

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LO 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	13.046.806.000,00
2	Pendapatan atas pengembalian Hibah-LO	2.567.119,00	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO	4.735.355.279,00	1.739.857.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.737.922.398,00</b>	<b>14.786.663.700,00</b>

<b>5.4.1.3.2.1 Pendapatan Hibah Dana BOS - LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>0,00</u>	<u>13.046.806.000,00</u>

Realisasi Pendapatan Hibah dana BOS – LO pada TA 2022 adalah nihil, karena pada tahun 2022, pendapatan dana BOS ditampung dalam pendapatan transfer yaitu pada akun pendapatan transfer DAK Non fisik – BOS Reguler dan DAK Non fisik – BOS Kinerja.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.4.1.3.2.2 Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>2.567.119,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO pada TA 2022 adalah Rp2.567.119,00. Pendapatan ini merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu hibah KONI 2021.

<b>5.4.1.3.2.3 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>4.735.355.279,00</b>	<b>1.739.857.700,00</b>

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO pada tahun 2022 sebesar Rp4.735.355.279,00 Pendapatan ini adalah Pendapataan Dana Kapitasi JKN periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

<b>5.4.2 Beban</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>662.844.241.250,90</b>	<b>585.848.322.688,24</b>

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban TA 2022 sebesar Rp662.844.241.250,90 meningkat sebesar Rp76.995.918.562,66 atau 13,14% jika dibandingkan beban LO 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 82 Rincian Beban – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LO 2022	LO 2021	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Operasi	580.198.891.665,01	510.120.141.046,10	70.078.750.618,91	13,74
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	82.522.187.085,89	75.728.181.642,14	6.794.005.443,75	8,97
3	Beban Transfer	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
4	Beban Tak Terduga	48.162.500,00	0,00	48.162.500,00	100,00
<b>Jumlah...</b>		<b>662.844.241.250,90</b>	<b>585.848.322.688,24</b>	<b>76.995.918.562,66</b>	<b>13,14</b>

Kenaikan dan penurunan antara belanja dan beban dijelaskan sebagai berikut :

<b>5.4.2.1 Beban Operasi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>580.198.891.665,01</b>	<b>510.120.141.046,10</b>

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Pemko Sibolga yang memberikan manfaat jangka Pendek. Selama Tahun Anggaran 2022, Pemko Sibolga mencatat beban operasi sebesar Rp580.198.891.665,01 mengalami kenaikan sebesar Rp70.078.750.618,91 atau 13,74% dibandingkan beban operasi tahun 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 83 Rincian Beban Operasi – LO Tahun 2022**

Beban Operasi	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Pegawai	256.944.395.571,60	246.757.301.377,40	10.187.094.194,20	4,13
Beban Pemeliharaan	17.195.036.975,00	10.239.931.289,00	6.955.105.686,00	67,92



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Beban Operasi	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Perjalanan Dinas	39.496.099.501,00	25.051.609.562,00	14.444.489.939,00	57,66
Beban Persediaan	78.818.391.297,27	53.339.177.817,61	25.479.213.479,66	47,77
Beban Jasa	149.578.122.628,00	129.868.667.805,00	19.709.454.823,00	15,18
Beban Bunga	3.111.659.901,00	0,00	3.111.659.901,00	100,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	22.941.543.721,00	26.966.347.081,00	(4.024.803.360,00)	14,93
Beban Bantuan Sosial	11.615.460.389,00	7.126.708.000,00	4.488.752.389,00	62,98
Beban Penyisihan Piutang	498.181.681,14	478.995.459,90	19.186.221,24	4,01
Beban Lain-lain	0,00	10.291.402.654,19	(10.291.402.654,19)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>580.198.891.665,01</b>	<b>510.120.141.046,10</b>	<b>70.078.750.618,91</b>	<b>13,74</b>

**5.4.2.1.1 Beban Pegawai - LO**

**Tahun 2022**

**Tahun 2021**

**(Rp)**

**(Rp)**

**256.944.395.571,60**

**246.757.301.377,40**

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

**Tabel 5. 84 Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2022**

NO	URAIAN	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	109.063.196.005,00	109.063.196.005,00	0,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	952.173.400,00	952.173.400,00	0,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	9.667.468.469,00	9.667.468.469,00	0,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	70.415.938,00	70.415.938,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.960.455.522,00	4.960.455.522,00	0,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	5.974.687.000,00	5.974.687.000,00	0,00
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.990.898.000,00	1.990.898.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	54.870.000,00	54.870.000,00	0,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS	6.334.287.681,00	6.334.287.681,00	0,00
11	Beban Tunjangan Beras PPPK	57.718.740,00	57.718.740,00	0,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	75.511.261,00	75.511.261,00	0,00
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.672.481,00	1.672.481,00	0,00
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	13.708,00	13.708,00	0,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.559.509.375,00	6.559.509.375,00	0,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.967.815.109,00	3.967.815.109,00	0,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	223.799.371,00	223.799.371,00	0,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	153.041.906,00	153.041.906,00	0,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	671.400.588,00	671.400.588,00	0,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	194.942.794,00	194.942.794,00	0,00
21	Beban Jaminan Hari Tua PNS	120.067.520,00	120.067.520,00	0,00
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	46.490.353.271,00	46.490.353.271,00	0,00
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.151.762.250,00	2.151.762.250,00	0,00
24	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	18.885.188,00	18.885.188,00	0,00
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	81.352.102,00	81.352.102,00	0,00
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.933.276,00	2.933.276,00	0,00
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.071.250,00	15.071.250,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

NO	URAIAN	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	270.093.984,00	270.093.984,00	0,00
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.364.965,00	3.364.965,00	0,00
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	97.583.377,00	97.583.377,00	0,00
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	76.671.000,00	76.671.000,00	0,00
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	19.212.136,00	19.212.136,00	0,00
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	517.500,00	517.500,00	0,00
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	258.750,00	258.750,00	0,00
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	18.660.913,00	18.660.913,00	0,00
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	5.797.042,00	5.797.042,00	0,00
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.182.625,00	3.182.625,00	0,00
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	45.387.403,00	45.387.403,00	0,00
42	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	776.250,00	776.250,00	0,00
43	Beban TPG PNSD	17.879.378.874,00	17.879.378.874,00	0,00
44	Beban Tamsil Guru PNSD	557.500.000,00	557.500.000,00	0,00
45	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	661.428.372,00	661.428.372,00	0,00
46	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.365.540.000,00	677.442.800,00	(688.097.200,00)
47	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	194.700.000,00	194.700.000,00	0,00
48	Beban Uang Representasi DPRD	451.290.000,00	451.290.000,00	0,00
49	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	31.634.400,00	31.634.400,00	0,00
50	Beban Tunjangan Beras DPRD	47.652.360,00	47.652.360,00	0,00
51	Beban Uang Paket DPRD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
52	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	654.370.500,00	0,00
53	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.999.700,00	68.999.700,00	0,00
54	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0,00
55	Beban Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00
56	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.892.338,00	8.892.338,00	0,00
57	Beban Pembulatan Gaji DPRD	14.840,00	14.840,00	0,00
58	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	38.992.992,00	38.992.992,00	0,00
59	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.312.160,00	3.312.160,00	0,00
60	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.140.320,00	4.140.320,00	0,00
61	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	1.460.400.000,00	1.460.400.000,00	0,00
62	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.754.000.000,00	2.754.000.000,00	0,00
63	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
64	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
65	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
66	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.607.120,00	2.607.120,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

NO	URAIAN	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)
67	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	826.182,00	826.182,00	0,00
68	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.680,00	0,00
69	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00
70	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
71	Beban Pegawai BLUD	28.202.109.083,00	28.389.157.783,60	187.048.700,60
	<b>JUMLAH</b>	<b>257.445.444.071,00</b>	<b>256.944.395.571,60</b>	<b>501.048.499,40</b>

Adapun selisih antara belanja pegawai LRA dan beban pegawai LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Selisih pencatatan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp688.097.200,00 karena adanya kapitalisasi beban menjadi aset tetap sebesar Rp 476.420.000,00, reklas menjadi beban persediaan sebesar Rp90.150.000,00, reklas ke beban pemeliharaan sebesar Rp87.900.000,00 dan reklas ke belanja modal aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp26.307.200,00 sehingga beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dicatat sebesar Rp677.442.800,00 pada LO.
- Selisih antara Belanja Pegawai BLUD dengan Beban Pegawai BLUD adalah adanya pengakuan utang belanja pegawai BLUD tahun 2022 sebesar Rp6.003.106.538,00 dan pembayaran utang belanja tahun sebelumnya sebesar Rp5.816.057.837,40 sehingga beban pegawai BLUD dicatat sebesar Rp 28.389.157.783,60 pada LO.

**5.4.2.1.2 Beban Pemeliharaan**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>17.195.036.975,00</b>	<b>10.239.931.289,00</b>

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp17.195.036.975,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.598.201.345,00 atau 20,93% jika dibandingkan dengan LRA TA 2022. Realisasi beban pemeliharaan tahun 2022 terdiri dari:

**Tabel 5. 85 Rincian Beban pemeliharaan – LO Tahun 2022**

Uraian	LRA	LO	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.769.545.425,00	7.622.729.125,00	853.183.700,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.265.823.836,00	6.507.870.022,00	1.242.046.186,00
Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan	1.561.466.369,00	3.064.437.828,00	1.502.971.459,00
<b>Total...</b>	<b>13.596.835.630,00</b>	<b>17.195.036.975,00</b>	<b>3.598.201.345,00</b>

Adapun kenaikan/Penurunan antara Beban Pemeliharaan LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin disajikan sebesar Rp6.769.545.425,00 pada LRA, ditambah reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp 574.424.250,00, reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp136.436.000,00, reklas dari beban barang dan jasa Dana JKN sebesar Rp142.323.450,00 sehingga Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dicatat di LO sebesar Rp7.622.729.125,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

2. Realisasi Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan disajikan sebesar Rp5.265.823.836,00 pada LRA, beban pemeliharaan bertambah sebesar Rp2.363.313.840,00 karena adanya utang belanja pemeliharaan tahun anggaran 2022 pada dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp16.964.250,00, reklas dari belanja modal sebesar Rp 1.834.169.915,00, reklas dari beban barang dan jasa yang lain sebesar Rp237.561.675,00, reklas dari beban barang jasa BLUD sebesar Rp291.582.250,00 dan reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp304.159.950,00, penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan terjadi karena adanya pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp112.145.600,00, reklas ke beban barang dan jasa yang lain sebesar Rp237.561.675,00, terkapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp1.092.684.579,00 sehingga beban pemeliharaan gedung dan bangunan dicatat pada LO sebesar Rp6.507.870.022,00.
  
3. Realisasi Beban Jalan Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar Rp1.561.466.369,00 pada LRA, beban pemeliharaan bertambah sebesar Rp1.532.978.080,00 merupakan reklas dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp208.196.950,00 pada Dinas PUPR dan Rp81.620.000,00 pada dinas kesehatan, reklas dari beban dana JKN sebesar Rp4.923.850,00, reklas dari Beban tak terduga sebesar Rp1.238.237.280,00, kemudian dikurang sebesar Rp30.006.621,00 karena dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan irigasi dan jaringan, sehingga beban pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan dicatat pada LO sebesar Rp3.064.437.828,00

<b>5.4.2.1.3 Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>39.496.099.501,00</b>	<b>25.051.609.562,00</b>

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp39.496.099.501,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.444.489.939,00 atau 57,66% di dibandingkan TA 2021, jika dibandingkan dengan LRA, terdapat selisih Rp739.683.826,00 dengan rincian:

**Tabel 5. 86 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2022**

URAIAN	LRA	LO	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.213.366.175,00	28.845.230.001,00	631.863.826,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	10.404.299.500,00	10.512.119.500,00	107.820.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	138.750.000,00	138.750.000,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>38.756.415.675,00</b>	<b>39.496.099.501,00</b>	<b>739.683.826,00</b>

Selisih belanja perjalanan dinas biasa di LRA dengan beban perjalanan dinas biasa di LO sebesar Rp631.863.826,00 merupakan reklas dari belanja modal Jalan irigasi dan jaringan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) sebesar Rp64.502.000,00, reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp583.535.826,00 kemudian berkurang karena direklas menjadi beban obat-obatan Rp4.900.000 di dinas kesehatan, reklas menjadi beban obat-obatan sebesar Rp14.340.000,00, dan berkurang karena dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp 11.274.000,00 pada dinas PUPR sehingga beban perjalanan dinas biasa disajikan sebesar Rp28.845.230.001,00 di LO.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

Belanja perjalanan dinas dalam kota pada LRA disajikan sebesar Rp10.404.299.500,00, ditambah reklas dari dana JKN sebesar Rp45.760.000,00, reklas dari beban tak terduga sebesar Rp83.840.000,00 dan kemudian berkurang karena dikapitalisasi sebesar Rp21.780.000 sehingga beban perjalanan dinas biasa disajikan sebesar Rp10.512.119.500,00 di LO.

<b>5.4.2.1.4 Beban Persediaan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>78.818.391.297,27</b>	<b>53.339.177.817,61</b>

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dan metode Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik.

Realisasi beban persediaan selama tahun 2022 sebesar Rp78.818.391.297,27 mengalami kenaikan sebesar Rp25.479.213.479,66 atau 47,76% jika dibandingkan beban persediaan LO TA 2021, dan jika dibandingkan dengan belanja persediaan pada LRA, mengalami kenaikan sebesar Rp22.220.433.397,27 dengan rincian:

**Tabel 5. 87 Rincian Beban Persediaan – LO Tahun 2022**

No	Uraian	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	564.593.880,00	626.214.374,00	61.620.494,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	-	370.758,70	370.758,70
3	Beban Bahan-Bahan Baku	5.172.000,00	5.172.000,00	0,00
4	Beban Bahan-Barang dalam Proses	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	686.518.900,00	782.978.800,00	96.459.900,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.455.000,00	22.825.000,00	18.370.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	8.868.000,00	809.946.500,00	801.078.500,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.600.000,00	76.785.800,00	73.185.800,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	35.498.600,00	35.498.600,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	88.629.500,00	269.705.731,90	181.076.231,90
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.541.130.601,00	9.653.358.212,16	8.112.227.611,16
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	998.091.395,00	1.208.173.713,97	210.082.318,97
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	8.389.400,00	201.807.200,00	193.417.800,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.393.453,00	25.171.053,00	21.777.600,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.371.277.424,00	8.762.753.935,00	1.391.476.511,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.459.481.994,00	2.823.516.038,00	364.034.044,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.291.954.172,00	8.215.711.104,80	1.923.756.932,80
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	299.335.500,00	360.255.825,00	60.920.325,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.040.364.630,00	1.492.722.830,00	452.358.200,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.886.335.690,00	3.084.343.658,00	1.198.007.968,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.396.998.875,00	1.552.391.254,00	155.392.379,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.442.736.403,00	8.428.216.803,00	(14.519.600,00)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	148.464.600,00	353.450.100,00	204.985.500,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	431.721.500,00	431.721.500,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

No	Uraian	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.708.745.686,00	2.826.609.350,00	117.863.664,00
26	Beban Obat-Obatan-Obat	2.476.965.653,00	11.768.355.907,56	9.291.390.254,56
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	140.013.949,00	998.147.971,68	858.134.022,68
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.313.598.040,00	10.595.723.790,00	(717.874.250,00)
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.428.085.755,00	554.522.479,00	(2.873.563.276,00)
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.787.886.300,00	2.833.634.007,50	45.747.707,50
31	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00
32	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.504.000,00	2.484.000,00	(7.020.000,00)
33	Beban Pipa-Pipa Lainnya	567.000,00	243.000,00	(324.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>56.597.957.900,00</b>	<b>78.818.391.297,27</b>	<b>22.220.433.397,27</b>

Adapun selisih antara realisasi Beban Persediaan LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada LRA sebesar Rp564.593.880,00 bertambah karena direklas dari belanja modal gedung Bangunan sebesar Rp1.846.900,00, reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp24.722.094,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp43.570.000,00, kemudian berkurang karena direklas menjadi beban pemeliharaan sebesar Rp720.000,00, dikapitalisasi pada aset Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (pkplh) yaitu menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp6.778.500,00, dan menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.020.000 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp626.214.374,00
2. Pada tahun anggaran 2022 Realisasi Belanja Bahan-Bahan Kimia pada LRA sebesar nihil, beban bahan kimia bertambah atas beban persediaan awal sebesar Rp5.182.942,76, dikurang karena adanya sisa persediaan bahan kimia di dinas kesehatan sebesar Rp.812.184,06, sehingga beban bahan-bahan kimia dicatat sebesar Rp370.758,70.
3. Realisasi Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman pada LRA sebesar Rp686.518.900,00, bertambah sebesar Rp71.720.400,00 karena adanya utang belanja yang belum dibayar pada tahun 2022 pada dinas pkplh, yaitu reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp114.719.400,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp752.000,00, berkurang sebesar Rp90.731.900,00 karena di reklas menjadi beban pemeliharaan pada kegiatan Pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan Taman Rusunawa Kota Sibolga TA. 2022, sehingga beban bahan.bibit tanaman disajikan sebesar Rp782.978.800,00 pada LO.
4. Realisasi Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada LRA sebesar Rp4.455.000,00, bertambah sebesar Rp13.765.000,00 yaitu reklas dari beban barang jasa BLUD, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp4.605.000,00 sehingga beban bahan isi tabung pemadam kebakaran disajikan sebesar Rp22.825.000,00 pada LO.
5. Realisasi Belanja Beban Bahan Isi Tabung Gas pada LRA sebesar Rp8.868.000,00, bertambah karena adanya utang belanja 2022 pada RSUD FL.Tobing sebesar Rp56.943.000,00, reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp734.325.500,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- Rp9.810.000,00 sehingga beban bahan isi tabung gas disajikan sebesar Rp809.946.500,00 pada LO.
6. Realisasi Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan LRA sebesar Rp3.600.000,00, bertambah sebesar Rp73.185.800,00 yaitu reklas dari beban barang jasa dana BOS.
  7. Realisasi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan LRA sebesar Rp88.629.500,00, beban bertambah karena adanya belanja modal peralatan dan mesin pada sekretariat DPRD yang direklas menjadi suku cadang alat angkutan sebesar Rp178.076.231,90 dan reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp3.000.000,00.
  8. Realisasi Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran LRA sebesar Rp1.541.130.601,00, terjadi kenaikan beban karena adanya utang beban yang belum dibayar sebesar Rp2.186.672.965,96, pembebanan persediaan awal sebesar Rp1.951.108.464,16, reklas dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp93.262.320,00 pada dinas pendidikan dan kebudayaan dan sebesar Rp1.100.000,00 pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga, reklas ke beban persediaan lainnya (ATK, honorarium, kertas dan cover, bahan cetak dan bahan computer) sebesar Rp62.857.500,00 pada kegiatan pengadaan TCM dan BMPH dinas kesehatan, reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp5.447.076.921,28, reklas dari beban tak terduga sebesar Rp935.995.950,00, dan penurunan beban terjadi akibat adanya persediaan akhir sebesar Rp2.301.270.929,63, persediaan di Dinas Kesehatan yang *expired* sebesar Rp261.404.930,61 dan di RSUD FL.Tobing sebesar Rp2.571.250,00, kapitalisasi menjadi aset tetap lainnya Dinas PUPR sebesar Rp 599.400,00 atas kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sibolga Kota dan Kecamatan Sibolga Utara, sehingga Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran dicatat pada LO sebesar Rp 9.653.358.212,16.
  9. Realisasi Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat laboratorium LRA sebesar Rp998.091.395,00, kenaikan beban terjadi karena adanya pembebanan persediaan awal sebesar Rp1.185.676.969,91, reklas dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp6.966.150,00 pada dinas pendidikan dan kebudayaan, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp6.730.800,00 terdapat penurunan beban sebesar Rp989.291.600,94 antara lain adanya persediaan akhir sebesar Rp967.648.995,94, kapitalisasi menjadi peralatan dan mesin alat kantor lainnya pada dinas pendidikan sebesar Rp21.642.605,00, sehingga Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat laboratorium disajikan pada Laporan Operasional sebesar Rp1.208.173.713,97.
  10. Realisasi Belanja Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian pada LRA dicatat sebesar Rp8.389.400,00, terjadi penambahan beban karena adanya reklas dari belanja modal peralatan dan mesin pada dinas sosial sebesar Rp232.800, dinas perhubungan sebesar Rp525.000, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp276.000, dinas Pkplh sebesar Rp 190.760.400,00 dan dinas pariwisata pemuda dan olahraga sebesar Rp 1.623.600,00. Sehingga Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian disajikan sebesar Rp 201.807.200,00 pada LO.
  11. Realisasi Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat bengkel pada LRA disajikan sebesar Rp393.453,00, beban bertambah karena adanya reklas dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp21.822.000, dan penurunan beban karena terkapitalisasi menjadi aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp 44.400,00 di dinas PUPR sehingga Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat bengkel dicatat sebesar Rp25.171.053,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

12. Realisasi Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada LRA sebesar Rp7.371.277.424,00 ditambah utang belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.713.778,00 , beban persediaan awal 2022 sebesar Rp4.519.018,00, reklas dari Beban BLUD sebesar Rp253.615.525,00, reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp794.507.785,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp375.690.700,00, reklas dari beban tak terduga sebesar Rp6.795.200,00 kemudian dikurang pembayaran utang beban Atk pada Dinas Komunikasi dan informasi sebesar Rp267.795,00, reklas menjadi beban persediaan pada dinas kesehatan sebesar Rp8.025.700, reklas menjadi beban persediaan pada dinas Pkplh sebesar Rp8.438.200,00, dan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp39.633.800,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp8.762.753.935,00
13. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan *Cover* pada LRA sebesar Rp2.459.481.994,00 ditambah karena pembebanan persediaan awal 2022 sebesar Rp4.360.244,00, reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp262.663.900,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp138.923.100,00, reklas dari Beban tak terduga sebesar Rp461.600,00, kemudian dikurang karena adanya reklas ke beban persediaan pada dinas kesehatan sebesar Rp3.722.300,00, reklas menjadi beban pemeliharaan pada dinas Pkplh sebesar Rp4.546.000,00 dan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp34.106.500,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp2.823.516.038,00.
14. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada LRA sebesar Rp6.291.954.172,00 ditambah utang belanja barang dan jasa BLUD pada RSU FL.Tobing sebesar Rp60.988.125,00, beban persediaan awal 2022 sebesar Rp 245.420.834,50, reklas dari belanja modal aset tetap lainnya buku pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga sebesar Rp12.000.000,00, reklas dari beban jasa BLUD sebesar Rp517.353.000,00, reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp970.813.124,00, reklas dari beban barang dan jasa JKN sebesar Rp370.893.400,00 dan reklas dari Beban tak terduga sebesar Rp2.149.000,00 kemudian dikurang karena adanya sisa persediaan akhir 2022 sebesar Rp186.531.050,70, reklas menjadi beban persediaan pada dinas kesehatan sebesar Rp5.313.000,00 , reklas menjadi beban pemeliharaan pada pkplh sebesar Rp5.017.200 dan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp58.999.300,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp8.215.711.104,80.
15. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos pada LRA sebesar Rp299.335.500,00 ditambah reklas dari beban jasa BLUD sebesar Rp23.500.325,00 reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp30.480.000,00, reklas dari beban barang dan jasa JKN sebesar Rp8.330.000,00 dan berkurang karena terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp1.390.000,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp360.255.825,00.
16. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada LRA sebesar Rp1.040.364.630,00 ditambah reklas dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.614.500,00 reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp475.568.860,00 , reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp15.130.200,00 kemudian dikurang karena direklas menjadi beban persediaan pada dinas pendidikan sebesar Rp3.064.560, Reklas beban barang jasa menjadi beban pemeliharaan pada dinas Pkplh sebesar Rp2.055.000 dan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp35.835.800,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

17. Realisasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor LRA sebesar Rp1.886.335.690,00 ditambah utang belanja modal tahun anggaran Rp18.649.000,00 beban persediaan awal 2022 sebesar Rp284.067.936,00 reklas dari belanja modal sebesar Rp20.950.000,00, reklas dari beban jasa BLUD sebesar Rp335.915.100,00, reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp668.273.200,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp101.008.400,00 kemudian dikurang karena adanya sisa persediaan 2022 sebesar Rp228.437.068,00 dan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp2.418.600,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp3.084.343.658,00
18. Realisasi Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat listrik LRA sebesar Rp1.396.998.875,00 ditambah utang belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.932.000,00 beban persediaan awal 2022 sebesar Rp2.490.075,00, reklas dari belanja modal sebesar Rp1.841.000,00 reklas dari beban jasa BLUD sebesar Rp89.489.500,00, reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp131.717.579,00, dan reklas dari Beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp34.752.200,00 kemudian dikurang karena reklas ke beban pemeliharaan sebesar Rp98.175,00 dan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp108.731.800,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp1.552.391.254,00
19. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas LRA sebesar Rp8.442.736.403,00 , beban berkurang karena terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp14.519.600,00.
20. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga LRA sebesar Rp148.464.600,00 ditambah beban persediaan awal 2022 sebesar Rp87.921.600,00 reklas dari belanja modal sebesar Rp10.758.000,00 reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp106.155.900,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp150.000 sehingga disajikan di LO sebesar Rp353.450.100,00
21. Realisasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya LRA sebesar Rp2.708.745.686,00 ditambah reklas dari belanja modal sebesar Rp3.156.400,00, reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp133.490.500,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp6.755.900, kemudian dikurang karena terkapitalisasi sebesar Rp25.539.136,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp2.826.609.350,00
22. Realisasi Belanja Obat-Obatan-Obat LRA sebesar Rp2.476.965.653,00 ditambah utang belanja sebesar Rp1.674.933.254,53 beban persediaan awal sebesar Rp3.437.542.211,24, reklas dari Beban Lain sebesar Rp51.501.100,00, reklas dari beban jasa BLUD sebesar Rp6.484.043.345,56, reklas dari beban barang jasa dana BOS sebesar Rp132.381.870,00, penerimaan hibah sebesar Rp3.558.298.102,05, kemudian dikurang karena adanya sisa persediaan sebesar Rp5.763.109.186,92, persediaan Obat-obatan RSUD yang *expired* sebesar Rp65.013.625,50 persediaan Dinas Kesehatan yang *expired* sebesar Rp219.186.816,40 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp11.768.355.907,56.
23. Realisasi Beban Obat-obatan Lainnya LRA sebesar Rp140.013.949,00 ditambah pembebanan persediaan awal Rp1.362.334.169,51 kemudian dikurang karena adanya sisa persediaan sebesar Rp348.350.358,69, persediaan obat-obatan lainnya pada dinas kesehatan yang *expired* sebesar Rp155.849.788,14 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp998.147.971,68



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

24. Realisasi Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat LRA sebesar Rp11.313.598.040,00 ditambah utang belanja tahun 2022 sebesar Rp146.268.000,00 beban persediaan awal sebesar Rp566.947.000,00, reklas dari Belanja modal sebesar Rp783.856.400,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp200.000,00 kemudian dikurang karena adanya pemabayaran utang tahun sebelumnya Rp6.892.500,00 sisa persediaan sebesar Rp2.205.746.750,00, reklas ke beban lain sebesar Rp2.506.400,00 sehingga beban barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat disajikan sebesar Rp10.595.723.790,00.
25. Realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain LRA sebesar Rp3.428.085.755,00 ditambah reklas dari Beban barang jasa Dana BOS sebesar Rp56.213.000,00, kemudian dikurang karena reklas ke beban hibah sebesar Rp2.229.776.700,00 atas barang yang sudah diserahkan ke pihak ketiga yang terdiri dari rehab kantor kejaksaan negeri Sibolga senilai Rp554.790.700,00 , rehab aula kantor kejaksaan Negeri Sibolga sebesar Rp198.775.050,00 dan pembangunan raungan kerja satreskrim dan sat narkoba Polres Siboolga, sehingga Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dicatat pada LO sebesar Rp554.522.479,00.
26. Realisasi Belanja Natura dan Pakan-Natura pada LRA sebesar Rp2.787.886.300,00 ditambah beban persediaan awal sebesar Rp94.522.309,20, Reklas dari beban lain pada kegiatan pengadaan PMT Balita Gizi sebesar Rp8.132.400,00 , reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp1.655.000, kemudian dikurang karena adanya sisa persediaan sebesar Rp58.562.001,70, sehingga dicatat pada LO sebesar Rp 2.833.634.007,50.
27. Realisasi Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) pada LRA disajikan sebesar Rp9.504.000,00 direklas menjadi beban pemeliharaan pada dinas Pkplh sebesar Rp7.020.000, sehingga dicatat pada LO sebesar Rp2.484.000,00.
28. Realisasi Beban Pipa-Pipa lainnya pada LRA disajikan sebesar Rp567.000,00 direklas menjadi beban pemeliharaan pada dinas Pkplh sebesar Rp324.000,00, sehingga dicatat pada LO sebesar Rp243.000,00.

**5.4.2.1.5 Beban Jasa**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>149.578.122.628,00</b>	<b>129.868.667.805,00</b>

Realisasi Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp149.578.122.628,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.709.454.823,00 atau 15,18% dibanding Beban jasa pada tahun 2021. Dan jika dibandingkan dengan LRA TA 2022 terjadi penurunan sebesar Rp16.815.446.471,84 dengan rincian:

**Tabel 5. 88 Rincian Beban Jasa Tahun 2022**

No.	URAIAN	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.712.721.023,00	6.124.537.120,00	411.816.097,00
2	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.004.808.500,00	12.986.033.900,00	(18.774.600,00)
3	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.282.716.000,00	1.294.484.600,00	11.768.600,00
4	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	209.884.000,00	209.884.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

No.	URAIAN	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
6	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.437.220.000,00	1.997.127.650,00	559.907.650,00
7	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.549.349.500,00	3.757.770.900,00	208.421.400,00
8	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	146.298.000,00	146.298.000,00	0,00
9	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	32.524.500,00	32.524.500,00	0,00
10	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	210.984.000,00	210.984.000,00
11	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
12	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	75.017,00	75.017,00
13	Beban Pakaian Batik Tradisional	100.592.160,00	100.592.160,00	0,00
14	Beban Pakaian Olahraga	486.923.400,00	490.373.400,00	3.450.000,00
15	Beban Pakaian Paskibraka	188.728.000,00	188.728.000,00	0,00
16	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	4.126.621.279,00	4.126.621.279,00
17	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.628.743.400,00	4.809.138.400,00	180.395.000,00
18	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.826.760.000,00	2.560.478.000,00	733.718.000,00
19	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
20	Beban Honorarium Rohaniwan	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00
21	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	76.400.000,00	76.400.000,00
22	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
23	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	155.167.000,00	154.167.000,00
24	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	631.400.000,00	631.400.000,00	0,00
25	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	3.691.800.000,00	5.045.297.000,00	1.353.497.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	7.023.932.898,00	12.192.746.584,00	5.168.813.686,00
27	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	152.549.648,00	181.578.341,00	29.028.693,00
28	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	638.468.537,00	643.528.537,00	5.060.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.275.565.000,00	5.275.565.000,00	0,00
30	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.413.510.000,00	1.413.510.000,00	0,00
31	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.769.600.000,00	1.769.600.000,00	0,00
32	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	189.840.000,00	189.840.000,00	0,00
33	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.413.955.000,00	2.413.955.000,00	0,00
34	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
35	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	490.150.000,00	490.150.000,00	0,00
36	Beban Jasa Tenaga Administrasi	13.655.380.000,00	14.448.934.000,00	793.554.000,00
37	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.471.085.000,00	1.486.985.000,00	15.900.000,00
38	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	259.900.000,00	261.240.000,00	1.340.000,00
39	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.158.399.230,00	1.921.097.730,00	(237.301.500,00)
40	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.859.790.000,00	2.079.070.000,00	219.280.000,00
41	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.412.050.000,00	1.582.450.000,00	170.400.000,00
42	Beban Jasa Tenaga Supir	1.863.045.000,00	1.863.045.000,00	0,00
43	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	48.087.000,00	48.087.000,00	0,00
44	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	-	50.000.000,00	50.000.000,00
45	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	715.150.000,00	715.150.000,00	0,00
46	Beban Jasa Tata Rias	126.120.000,00	126.720.000,00	600.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

No.	URAIAN	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
47	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	911.270.000,00	911.270.000,00	0,00
48	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	79.122.416,00	71.775.416,00	(7.347.000,00)
49	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	93.600.000,00	194.540.371,00	100.940.371,00
50	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
51	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	352.010.000,00	352.010.000,00	0,00
52	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00
53	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.469.500,00	29.309.500,00	840.000,00
54	Beban Jasa Kalibrasi	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
55	Beban Jasa Pengolahan Sampah	4.718.287.500,00	5.143.096.984,00	424.809.484,00
56	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	34.165.000,00	34.165.000,00	0,00
57	Beban Jasa Pengukuran Tanah	17.000.000,00	14.000.000,00	(3.000.000,00)
58	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	923.568.000,00	923.568.000,00	0,00
59	Beban Tagihan Telepon	12.609.102,00	90.098.612,00	77.489.510,00
60	Beban Tagihan Air	750.286.951,00	1.242.465.711,00	492.178.760,00
61	Beban Tagihan Listrik	15.130.192.508,00	16.224.159.626,00	1.093.967.118,00
62	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	105.695.000,00	150.408.000,00	44.713.000,00
63	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.960.561.958,00	4.269.638.977,00	309.077.019,00
64	Beban Paket/Pengiriman	18.711.420,00	18.711.420,00	0,00
65	Beban Penambahan Daya	120.079.300,00	120.079.300,00	0,00
66	Beban Registrasi/Keanggotaan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
67	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	549.964.527,00	534.743.027,00	(15.221.500,00)
68	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	37.415.875,00	37.415.875,00
69	Beban Lembur	0,00	56.399.000,00	56.399.000,00
70	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	128.556.400,00	1.270.552.400,00	1.141.996.000,00
71	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	12.787.004.700,00	12.787.004.700,00	0,00
72	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	394.460.828,00	394.460.828,00	0,00
73	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	485.316.000,00	485.316.000,00	0,00
74	Beban Sewa Lapangan Lainnya	38.119.000,00	38.264.900,00	145.900,00
75	Beban Sewa Excavator	46.400.783,00	46.400.783,00	0,00
76	Beban Sewa Electric Generating Set	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00
77	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46.872.000,00	46.872.000,00	0,00
78	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	42.530.060,00	37.205.060,00	(5.325.000,00)
79	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.853.926,00	71.853.926,00	0,00
80	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	151.450.000,00	151.450.000,00	0,00
81	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00
82	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	18.824.194,00	18.824.194,00	0,00
83	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	99.400.000,00	99.400.000,00	0,00
84	Beban Sewa Mebel	488.271.204,00	488.271.204,00	0,00
85	Beban Sewa Alat Pendingin	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
86	Beban Sewa Alat Dapur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
87	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

No.	URAIAN	LRA 2022 (Rp)	LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
88	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	804.020.000,00	804.020.000,00	0,00
89	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
90	Beban Sewa Peralatan Umum	1.788.336.216,00	1.825.472.216,00	37.136.000,00
91	Beban Sewa Elektronik/Electric	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
92	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	521.262.400,00	517.000.000,00	(4.262.400,00)
93	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	800.000,00	800.000,00
94	Beban Sewa Bangunan Terbuka	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
95	Beban Sewa Taman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
96	Beban Sewa Hotel	486.244.247,00	486.244.247,00	0,00
97	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	75.117.200,00	75.117.200,00	0,00
98	Beban Sewa Alat Musik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
99	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	44.426.500,00	44.426.500,00
100	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.392.153.009,00	330.806.666,00	(1.061.346.343,00)
101	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
102	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	104.654.700,00	104.654.700,00	0,00
103	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
104	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00
105	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	249.757.099,00	249.757.099,00
106	Beban Bimbingan Teknis	2.145.946.690,00	2.177.855.968,00	31.909.278,00
107	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.463.020.000,00	1.463.020.000,00	0,00
108	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
109	Beban Barang dan Jasa BOS	9.109.649.231,00	0,00	(9.109.649.231,00)
110	Beban Barang dan Jasa BLUD	25.195.016.333,84	175.100,00	(25.194.841.233,84)
<b>JUMLAH</b>		<b>166.393.569.099,84</b>	<b>149.578.122.628,00</b>	<b>(16.815.446.471,84)</b>

Selisih antara Beban LRA dan Beban LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada LRA sebesar Rp5.712.721.023,00 bertambah karena reklas dari beban barang jasa BLUD sebesar Rp265.489.247,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp146.326.850,00 sehingga beban jasa bahan bakar dan pelumas yang dicatat pada LO 2021 adalah sebesar Rp6.124.537.120,00
2. Realisasi Beban Makanan dan Minuman Rapat pada LRA sebesar Rp13.004.808.500,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp26.820.000,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp31.576.000,00 reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp5.496.000,00 mengalami pengurangan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp82.666.600,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp12.986.033.900,00.
3. Realisasi Beban Makanan dan Minuman jamuan tamu pada LRA sebesar Rp1.282.716.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp8.900.600,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp1.294.484.600,00
4. Realisasi Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan bersumber dari dana BOS sebesar Rp209.884.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

5. Realisasi Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan pada LRA sebesar Rp1.437.220.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa BLUD sebesar Rp559.907.650,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp1.997.127.650,00
6. Realisasi Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada LRA sebesar Rp3.549.349.500,00 bertambah karena adanya reklas dari beban tak terduga sebesar Rp208.421.400,00
7. Realisasi Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp210.984.000,00 merupakan reklas dari beban barang dan jasa Dana BLUD.
8. Realisasi Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebesar Rp2.540.000,00 merupakan reklas dari beban barang dan jasa Dana BLUD.
9. Realisasi Beban Pakaian adat daerah sebesar Rp75.017,00 merupakan reklas dari beban barang dan jasa Dana BLUD.
10. Realisasi Beban Pakaian Olahraga pada LRA sebesar Rp486.923.400,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp3.450.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp490.373.400,00
11. Realisasi beban komponen lainnya sebesar Rp4.126.621.279,00 merupakan belanja modal yang tidak menjadi aset tetap karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset (dicatat secara ekstrakompatabel) sebesar Rp4.021.026.035,00 dan beban penurunan investasi pada BUMD PD.Sibolga Nauli sebesar Rp105.595.244,00. Pada tahun sebelumnya, kedua beban ini dicatat pada beban lain-lain.
12. Realisasi Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia disajikan pada LRA sebesar Rp4.628.743.400,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp2.100.000,00 , reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp178.295.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp4.809.138.400,00
13. Realisasi Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada LRA sebesar Rp1.826.760.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp375.000.000,00 , reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp 276.268.000,00 reklas dari beban tak terduga sebesar Rp82.450.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp2.560.478.000,00
14. Realisasi Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website merupakan reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp76.400.000
15. Realisasi Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan pada LRA sebesar Rp1.000.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp154.167.000
16. Realisasi Beban Jasa Tenaga Pendidikan pada LRA sebesar Rp3.691.800.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp1.353.497.000, sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp5.045.297.000,00
17. Realisasi Beban Jasa Tenaga Kesehatan pada LRA sebesar Rp7.023.932.898,00 bertambah karena adanya utang belanja yang belum dibayar sebesar Rp183.867.125,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp2.061.301.521,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp3.073.630.200,00, berkurang karena adanya pembayaran hutang sebesar



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

- Rp149.985.160,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp12.192.746.584,00
18. Realisasi Beban Jasa Tenaga Laboratorium pada LRA sebesar Rp152.549.648,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp29.028.693,00, sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp181.578.341,00
  19. Realisasi Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada LRA sebesar Rp 638.468.537,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp23.640.000,00, terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp18.580.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp643.528.537,00
  20. Realisasi Beban Jasa Tenaga Administrasi pada LRA sebesar Rp13.655.380.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp793.554.000,00, sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp14.448.934.000,00
  21. Realisasi Beban Jasa Tenaga Operator Komputer pada LRA sebesar Rp1.471.085.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp15.900.000,00, sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp1.486.985.000,00
  22. Realisasi Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada LRA sebesar Rp259.900.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp1.340.000,00, sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp261.240.000,00
  23. Realisasi Beban Jasa Tenaga Ahli pada LRA sebesar Rp2.158.399.230,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp19.410.000,00 mengalami pengurangan karena reklas ke beban pemeliharaan sebesar Rp8.000.000,00 dan terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp248.711.500,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp1.921.097.730,00
  24. Realisasi Beban Jasa Tenaga kebersihan pada LRA sebesar Rp1.859.790.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp219.280.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp2.079.070.000,00
  25. Realisasi Beban Jasa Tenaga keamanan pada LRA sebesar Rp1.412.050.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp170.400.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp1.582.450.000,00
  26. Realisasi Beban Jasa Audit/Surveillance ISO sebesar Rp50.000.000,00 merupakan beban yang bersumber dari beban barang dan jasa dana BLUD.
  27. Realisasi Beban Jasa tata rias pada LRA sebesar Rp126.120.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp600.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp126.720.000,00
  28. Realisasi Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik pada LRA sebesar Rp79.122.416,00 berkurang sebesar Rp7.347.000,00 karena dikapitalisasi ke aset tetap.
  29. Realisasi Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan pada LRA sebesar Rp93.600.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp100.940.371,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp 194.540.371,00
  30. Realisasi Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga pada LRA sebesar Rp28.469.500,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp840.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp29.309.500,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

31. Realisasi Beban Jasa Pengolahan Sampah pada LRA sebesar Rp4.718.287.500,00 bertambah karena adanya utang belanja tahun 2022 sebesar Rp8.880.000,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp439.573.324,00 berkurang karena adanya pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp23.643.840,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp5.143.096.984,00
32. Realisasi Beban Beban Jasa Pengukuran Tanah pada LRA sebesar Rp17.000.000,00 berkurang karena terkapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp3.000.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp14.000.000,00
33. Realisasi Beban Tagihan Telepon pada LRA sebesar Rp12.609.102,00 bertambah karena adanya utang beban yang timbul selama tahun 2022 sebesar Rp47.370,00, reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp77.484.510,00 Adapun beban tagihan telepon mengalami pengurangan karena adanya pembayaran utang beban 2021 sebesar Rp42.370,00 sehingga beban tagihan telepon yang dicatat pada LO sebesar Rp90.098.612,00
34. Realisasi Beban Tagihan air pada LRA sebesar Rp750.286.951,00 bertambah karena adanya utang beban yang timbul selama Tahun 2022 sebesar Rp97.658.289,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp434.468.995,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp69.409.961,00 Adapun beban tagihan air mengalami pengurangan karena adanya pembayaran utang beban 2021 sebesar Rp109.358.485,00 sehingga beban tagihan air yang dicatat pada LO sebesar Rp1.242.465.711,00
35. Realisasi beban tagihan listrik pada LRA sebesar Rp15.130.192.508,00 bertambah karena adanya utang beban yang timbul selama Tahun 2022 sebesar Rp1.033.564.133,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp784.433.588,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp160.977.540,00 Adapun beban tagihan listrik mengalami pengurangan karena adanya pembayaran utang beban 2021 sebesar Rp885.008.143,00 sehingga beban tagihan listrik yang dicatat pada LO sebesar Rp16.224.159.626,00
36. Realisasi Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah tagihan listrik pada LRA sebesar Rp105.695.000,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD sebesar Rp9.900.000,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp34.813.000,00 sehingga beban yang dicatat pada LO sebesar Rp150.408.000,00
37. Realisasi beban jasa kawat/faksimili/internet pada LRA sebesar Rp3.960.561.958,00 bertambah karena adanya utang beban yang timbul selama Tahun 2022 sebesar Rp26.597.064,00 reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp304.313.775,00 adapun beban jasa kawat/faksimili/internet mengalami pengurangan karena adanya pembayaran utang beban 2021 sebesar Rp21.833.820,00 sehingga beban jasa kawat/faksimili/internet yang dicatat pada LO sebesar Rp4.269.638.977,00
38. Realisasi Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada LRA sebesar Rp549.964.527,00 bertambah karena adanya utang beban yang timbul selama Tahun 2022 sebesar Rp1.910.000,00, reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp1.542.500,00 mengalami pengurangan karena adanya pembayaran utang beban 2021 sebesar Rp 18.674.000,00 sehingga Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan yang dicatat pada LO sebesar Rp534.743.027,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

39. Realisasi Beban Pengolahan Air Limbah sebesar Rp37.415.875,00 merupakan reklas dari beban barang dan jasa dana JKN
40. Realisasi Beban Lembur sebesar Rp56.399.000,00 merupakan reklas dari beban barang dan jasa dana BLUD
41. Realisasi Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 pada LRA sebesar Rp128.556.400,00 bertambah karena adanya utang beban yang timbul selama Tahun 2022 sebesar Rp1.141.996.000,00, sehingga Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang dicatat pada LO sebesar Rp1.270.552.400,00
42. Realisasi Beban Sewa Lapangan Lainnya pada LRA sebesar Rp38.119.000,00 bertambah karena adanya beban dibayar dimuka tahun 2021 sebesar Rp7.205.400,00 dan berkurang karena adanya beban dibayar dimuka tahun 2022 sebesar Rp7.059.500,00, sehingga Beban Sewa Lapangan Lainnya yang dicatat pada LO sebesar Rp38.264.900,00
43. Realisasi Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada LRA sebesar Rp42.530.060,00 bertambah karena reklas dari beban barang dan jasa dana BOS sebesar Rp 2.175.000,00 dan dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp7.500.000,00 sehingga dicatat pada LO adalah sebesar Rp37.205.060,00
44. Realisasi Beban Sewa Peralatan Umum pada LRA sebesar Rp1.788.336.216,00 bertambah karena reklas dari beban tak terduga sebesar Rp37.136.000, sehingga dicatat pada LO adalah sebesar Rp1.825.472.216,00
45. Realisasi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada LRA sebesar Rp521.262.400,00 berkurang karena terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp4.262.400,00 sehingga dicatat pada LO sebesar Rp517.000.000,00
46. Realisasi Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp800.000,00 merupakan beban yang bersumber dari beban barang dan jasa dana BOS.
47. Realisasi Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp44.426.500,00 merupakan beban yang bersumber dari beban barang dan jasa dana BOS.
48. Realisasi Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural pada LRA sebesar Rp1.392.153.009,00 berkurang karena terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp1.061.346.343,00 sehingga dicatat pada LO adalah sebesar Rp330.806.666,00
49. Realisasi Beban Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp249.757.099,00 merupakan beban yang bersumber dari beban barang dan jasa dana BLUD.
50. Realisasi Beban Bimbingan Teknis pada LRA sebesar Rp2.145.946.690,00 bertambah karena adanya reklas dari beban barang dan jasa dana JKN sebesar Rp31.909.278,00 sehingga dicatat pada LO adalah sebesar Rp2.177.855.968,00
51. Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS pada LRA sebesar Rp9.109.649.231,00 bertambah karena adanya reklas dari belanja modal dana BOS sebesar Rp20.070.000,00 dan berkurang karena direklas ke beban persediaan sebesar Rp3.009.719.888, reklas ke beban pemeliharaan sebesar Rp440.595.950 reklas ke beban barang dan jasa sebesar Rp5.039.920.601 reklas ke beban perjalan dinas sebesar Rp583.535.826 reklas ke aset tetap sebesar Rp55.946.966,00 sehingga Beban barang jasa BOS yang dicatat pada LO adalah nihil.
52. Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD pada LRA sebesar Rp25.195.016.333,84 direklas ke beban operasi lainnya sebesar Rp25.195.016.333,84 sehingga beban barang jasa BLUD yang dicatat pada LO sebesar Rp 175.100,00. Beban ini adalah biaya transfer bank yang langsung dibebankan pada pendapatan BLUD.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

5.4.2.1.6 Beban Bunga	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>3.111.659.901,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja bunga pada Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp995.246.214,00. Selama Tahun 2022 terdapat pembayaran bunga pinjaman dengan mekanisme pemotongan atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.116.413.687,00 sehingga beban bunga selama Tahun 2022 yang disajikan dalam Laporan Operasional adalah sebesar Rp3.111.659.901,00.

5.4.2.1.7 Beban Hibah	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
	<b>22.941.543.721,00</b>	<b>26.966.347.081,00</b>

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemko Sibolga atas pemberian hibah yang telah diprogramkan pada APBD Kota Sibolga TA. 2022. Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp22.941.543.721,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.024.803.360,00 atau 14,94% jika dibandingkan dengan beban hibah tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan belanja hibah LRA TA 2022 terdapat perbedaan sebesar Rp8.735.821.809,00 dengan rincian sebagai Berikut:

**Tabel 5. 89 Rincian Beban Hibah Tahun 2022**

Uraian Mapping	LRA	LO	Kenaikan/ Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	580.000.000,00	9.110.819.700,00	8.530.819.700,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	64.002.109,00	64.002.109,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.201.752.600,00	8.201.752.600,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	3.064.000.000,00	3.205.000.000,00	141.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.030.574.552,00	2.030.574.552,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	329.394.760,00	329.394.760,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>14.205.721.912,00</b>	<b>22.941.543.721,00</b>	<b>8.735.821.809,00</b>

Kenaikan beban hibah antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kenaikan Beban Hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp8.530.819.700 terdiri dari reklas dari beban tak terduga sebesar Rp6.301.043.000,00 dan hibah ke pihak lain oleh dinas PUPR sebesar Rp2.229.776.700,00.  
Beban hibah yang direklas dari beban tak terduga terdiri dari :
  - a. Pencairan Dana Bantuan Kegiatan Pendampingan Vaksinasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kota Sibolga pada Kodim 0211/TT sebesar Rp275.429.000,00
  - b. Dukungan Biaya Kegiatan Upacara Hari Pahlawan Tanggal 10 November 2022 Dan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Nelayan Penanganan Dampak Inflasi Pada Korem 023/Kawal Samudera sebesar Rp121.600.000,00
  - c. Bantuan Anggaran Karya Bakti dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi kota Sibolga pada Korem 023/Kawal Samudera sebesar Rp1.000.000.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

- d. Bantuan Anggaran penanganan dampak COVID-19 dan vaksin massal pada Polres Sibolga sebesar Rp4.595.514.000,00
- e. Bantuan Sosial Dampak Inflasi Kepada Masyarakat Kota Sibolga Pada Polres Sibolga Tahun Anggaran 2022 sebesar 308.500.000,00

Adapun hibah dari dinas PUPR sebesar Rp2.229.776.700,00 terdiri dari

- a. Rehab kantor Kejaksaan Negeri Sibolga sebesar Rp554.790.700,00
  - b. Rehab aula kantor Kejaksaan Negeri Sibolga sebesar Rp198.775.050,00
  - c. Pembangunan ruangan kerja Sat Reskrim dan Sat Narkoba Polres Sibolga sebesar Rp1.476.210.950,00
2. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp64.002.109,00 adalah hibah dari dinas pendidikan dan kebudayaan kepada sekolah swasta yang ada dikota sibolga berupa buku.
  3. Kenaikan Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp141.000.000,00 merupakan utang Beban Hibah kepada HKBP Distrik IX Sibolga-Tapanuli Tengah-Nias yang akan dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

**5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>11.615.460.389,00</b>	<b>7.126.708.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemko Sibolga kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial TA.2022 sebesar Rp11.615.460.389,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.488.752.389,00 atau 62,98% dibanding dengan beban bantuan sosial TA.2021. dan jika dibandingkan dengan belanja bantuan sosial yang disajikan di LRA sebesar Rp7.590.137.180,00, terdapat kenaikan sebesar Rp4.025.323.209,00 dengan rincian:

**Tabel 5. 90 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2022**

Uraian	LRA	LO	Kenaikan/Penurunan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.044.880.000,00	1.076.781.520,00	31.901.520,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	795.500.000,00	795.500.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.268.557.180,00	5.268.557.180,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	3.993.421.689,00	3.993.421.689,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	481.200.000,00	481.200.000,00	0,00
Jumlah	<b>7.590.137.180,00</b>	<b>11.615.460.389,00</b>	<b>4.025.323.209,00</b>

1. Kenaikan Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp31.901.520,00 merupakan Reklas dari beban tak terduga untuk Bantuan Dana Berobat masyarakat.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

2. Kenaikan Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp3.993.421.689,00 merupakan:
  - a. Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 sebesar Rp369.600.000,00 yaitu Asuransi Nelayan Mandiri dan adanya Beban Bantuan Sosial yang dibayar tahun 2021 sebesar Rp369.600.000,00 yaitu Asuransi Nelayan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
  - b. Reklas dari beban tak terduga yang dikelola dinas sosial sebesar Rp476.150.000,00 terdiri dari
    1. Bantuan Biaya Sosial kepada masyarakat sebesar Rp220.000.000,00
    2. Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Kejadian Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah pada Dinas Sosial sebesar Rp238.300.000,00
    3. Pemberian Tali Asih Kepada Veteran/Janda dan Lanjut Usia (Lansia) sebesar Rp17.850.000,00
  - c. Reklas dari beban tak terduga yang dikelola oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sebesar Rp3.147.671.689,00 terdiri dari
    - 1) Bantuan Dana Akibat Musibah Ledakan BOM Ikan tanggal 24 Januari 2022 di Jalan KH. Ahmad Dahlan sebesar Rp194.000.000,00
    - 2) Dana Bantuan terhadap Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Kebakaran di Kota Sibolga sebesar Rp 56.500.000,00
    - 3) Dana Makanan dan Minuman serta perlengkapan kebutuhan Keluarga Korban ledakan BOM Ikan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga sebesar Rp139.617.689,00
    - 4) Bantuan Biaya Perobatan korban Ledakan Bom Ikan yang dirujuk ke Medan sebesar Rp59.300.000,00
    - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Paket Bantuan untuk Gebyar Vaksin di 4 (Empat) Kecamatan sebesar Rp594.254.000,00
    - 6) Dana Biaya Umum untuk Bantuan kepada Masyarakat Kurang Mampu akibat Pandemi Covid-19 sebesar Rp2.104.000.000,00

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	<b>498.181.681,14</b>	<b>478.995.459,90</b>

Beban penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota nomor 900/10/Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemko Sibolga. Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp498.181.681,14 dengan rincian:

**Tabel 5. 91 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2022
1	<b>Beban Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>287.747.853,32</b>
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	100.201,57
	Beban Penyisihan Pajak Restoran	1.880.439,44
	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	208.346,25
	Beban Penyisihan Pajak Reklame	47.780,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

No	Uraian	Tahun 2022
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.100,00
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	285.508.986,06
<b>2</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>74.863.875,00</b>
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	107.125,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Los	875.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	72.513.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.368.750,00
<b>3</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>135.569.952,82</b>
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	135.569.952,82
	<b>Jumlah</b>	<b>498.181.681,14</b>

Rincian perhitungan beban penyisihan per jenis piutang dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

**5.4.2.1.9 Beban Lain-lain**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>10.291.402.654,19</b>

Beban lain-lain pada tahun 2022 adalah nihil. Pada tahun sebelumnya, beban ini merupakan Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap dan untuk tahun ini, beban tersebut dicatat pada beban jasa yaitu akun beban komponen lainnya.

**5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>82.522.187.085,89</b>	<b>75.728.181.642,14</b>

Beban Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2022 sebesar Rp82.522.187.085,89 mengalami kenaikan sebesar Rp6.794.005.443,75 atau 8,97% dari Beban Penyusutan Tahun 2021 dengan rincian:

**Tabel 5. 92 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	29.043.638.676,89
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.360.096.903,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.118.451.506,00
	<b>Jumlah</b>	<b>82.522.187.085,89</b>

Beban Penyusutan dilakukan dengan mempedomani beberapa hal berikut:

- Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap dengan pendekatan bulanan.
- Untuk aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan dimulai bulan pertama perolehan.

Rincian penyusutan dan amortisasi tahun 2022 per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.4.2.3 Beban Transfer</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2022 realisasi beban transfer di Pemko Sibolga sebesar Rp75.000.000,00 Bantuan keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Kejadian Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Tapanuli Utara

<b>5.4.2.3.1 Beban Bantuan Keuangan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada tahun 2022 tidak terdapat beban bantuan keuangan di Pemko Sibolga.

<b>5.4.2.4 Beban Tak Terduga</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	<b>48.162.500,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Tak Terduga pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp48.162.500,00 dan nihil. Beban sebesar Rp48.162.500,00 merupakan penyetoran sisa dana BOS TA.2011 ke RKUN sesuai surat BPKP perwakilan provinsi sumatera utara nomor LAP-56/PW01/3.2/2022 tentang laporan hasil reuiu sisa dana BOS tahun 2011 pada kota Sibolga.

• <b>Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	<b>(40.178.467.851,84)</b>	<b>18.563.351.918,30</b>

Surplus dari Kegiatan Operasi TA. 2022 dan 2021 sebesar (Rp40.178.467.851,84) dan Rp18.563.351.918,30.

• <b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	<b>960.280.589,35</b>	<b>(46.211.187.061,06)</b>

Defisit dari kegiatan non operasional tahun 2022 sebesar Rp960.280.589,35, yang terdiri dari:

**Tabel 5. 93 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022**

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
<b>1</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>1.664.307.000,00</b>	<b>26.280.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar</b>	<b>1.664.307.000,00</b>	<b>26.280.000,00</b>
	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin	0,00	26.280.000,00
	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Aset Lain-lain	1.664.307.000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Surplus atas penerbitan SKTJM kehilangan aset BMD	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>704.026.410,65</b>	<b>46.237.467.061,06</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>2.1</b>	<b>Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar</b>	<b>0,00</b>	<b>45.016.159.406,00</b>
	Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin	0,00	45.016.159.406,00
<b>2.2</b>	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>704.026.410,65</b>	<b>1.221.307.655,06</b>
	Defisit atas Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan	0,00	81.621.540,00
	Persediaan yang expired pada RSUD FL.Tobing	67.584.875,50	37.028.798,81
	Persediaan yang expired pada Dinas Kesehatan	636.441.535,15	1.102.657.316,25
	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional ( 1-2 )</b>	<b>960.280.589,35</b>	<b>(46.211.187.061,06)</b>

• <b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(39.218.187.262,49)</b>	<b>(27.647.835.142,76)</b>

Surplus (defisit) sebelum pos luar biasa tahun 2022 dan 2021 sebesar (Rp39.218.187.262,49) dan (Rp27.647.835.142,76).

• <b>Pos Luar Biasa</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pos luar biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah Nihil.

• <b>Surplus/ Defisit LO</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>(39.218.187.262,49)</b>	<b>(27.647.835.142,76)</b>

Surplus/defisit LO TA. 2022 dan 2021 sebesar (Rp39.218.187.262,49) dan (Rp27.647.835.142,76).

**Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas:**

**5.5 LAPORAN ARUS KAS (LAK)**

Arus Kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar dana daerah dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan dan aktivitas pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. Kenaikan/Penurunan bersih kas selama periode tahun anggaran berkenaan, ditambah saldo awal Kas Daerah, merupakan saldo akhir Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran.

Kenaikan/Penurunan bersih kas selama periode TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>51.345.614.874,79</b>	<b>94.691.455.966,14</b>

**Tabel 5. 94 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA. 2022 dan 2021**

Aktivitas Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021	%
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Arus Kas Masuk	619.602.357.695,63	588.906.218.589,27	5,21
Arus Kas Keluar	568.256.742.820,84	494.214.762.623,13	14,98
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>51.345.614.874,79</b>	<b>94.691.455.966,14</b>	<b>(45,78)</b>

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2022 sebesar Rp51.345.614.874,79 mengalami penurunan sebesar (Rp43.345.841.091,35) atau 45,78% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

<b>5.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<b>619.602.357.695,63</b>	<b>588.906.218.589,27</b>

Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari pendapatan Pajak Daerah, pendapatan Retribusi Daerah, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat, dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi, dan penerimaan dari Pendapatan Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**Tabel 5. 95 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021**

Arus Kas Masuk	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pendapatan Pajak Daerah	12.169.731.508,00	11.398.529.221,00	771.202.287,00	6,77
Pendapatan Retribusi Daerah	4.683.973.666,80	4.246.987.577,00	436.986.089,80	10,29
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.046.702.945,44	9.255.412.429,00	1.791.290.516,44	19,35
Lain-lain PAD yang Sah	52.817.261.014,07	50.607.857.906,27	2.209.403.107,80	4,37
Dana Bagi Hasil	25.450.549.209,00	24.351.430.125,00	1.099.119.084,00	4,51
Dana Alokasi Umum	381.093.828.683,00	384.535.437.000,00	(3.441.608.317,00)	(0,90)
Dana Alokasi Khusus – Fisik	31.710.074.701,00	33.815.853.302,00	(2.105.778.601,00)	(6,23)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	50.284.037.649,00	27.346.511.619,00	22.937.526.030,00	83,88
Penerimaan Dana Insentif Daerah	18.430.524.000,00	9.173.013.000,00	9.257.511.000,00	100,92
Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	27.110.100.012,00	19.418.510.710,00	7.691.589.302,00	39,61
Penerimaan Hibah	67.651.909,32	0,00	67.651.909,32	100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.737.922.398,00	0,00	4.737.922.398,00	100,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	14.756.675.700,00	(14.756.675.700,00)	(100,00)
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>619.602.357.695,63</b>	<b>588.906.218.589,27</b>	<b>30.696.139.106,36</b>	<b>5,21</b>

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas operasi TA 2022 seluruhnya sebesar Rp619.602.357.695,63 mengalami penurunan sebesar Rp30.696.139.106,36 atau 5,21% dibandingkan dengan realisasi TA 2021.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<b>568.256.742.820,84</b>	<b>494.214.762.623,13</b>

Arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**Tabel 5. 96 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021**

Arus Keluar Kas	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Pembayaran Pegawai	257.445.444.071,00	246.602.398.284,00	10.843.045.787,00	4,40
Pembayaran Barang	275.344.778.304,84	221.685.398.219,13	53.659.380.085,71	24,21
Pembayaran Bunga	995.246.214,00	0,00	995.246.214,00	100,00
Pembayaran Hibah	14.205.721.912,00	5.787.542.420,00	8.418.179.492,00	145,45
Pembayaran Bantuan Sosial	7.590.137.180,00	7.146.308.000,00	443.829.180,00	6,21
Pembayaran Bantuan Keuangan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
Pembayaran Tak terduga	12.600.415.139,00	12.993.115.700,00	(392.700.561,00)	(3,02)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>568.256.742.820,84</b>	<b>494.214.762.623,13</b>	<b>74.041.980.197,71</b>	<b>14,98</b>

Realisasi arus kas keluar untuk belanja operasi TA 2022 sebesar Rp568.256.742.820,84 mengalami kenaikan sebesar Rp74.041.980.197,71 atau 14,98% dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

<b>5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<b>(140.004.123.952,00)</b>	<b>(86.349.769.378,26)</b>

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

**Tabel 5. 97 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021**

Aktivitas Investasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Masuk	<b>1.680.481.900,00</b>	755.000.000,00	122,58
Arus Kas Keluar	141.684.605.852,00	87.104.769.378,26	62,66
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(140.004.123.952,00)</b>	<b>(86.349.769.378,26)</b>	<b>62,14</b>

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2022 sebesar (Rp140.004.123.952,00) mengalami penurunan sebesar (Rp53.654.354.573,74) atau 62,14% dibandingkan realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2021.

<b>5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi</b>	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
	<b>1.680.481.900,00</b>	<b>755.000.000,00</b>

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas investasi TA 2022 sebesar Rp1.680.481.900,00 yang merupakan Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari  
Aktivitas Investasi**

**Tahun 2022  
(Rp)  
141.684.605.852,00**

**Tahun 2021  
(Rp)  
87.104.769.378,26**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

**Tabel 5. 98 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2022 dan 2021**

Arus Keluar Kas	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan mesin	17.755.536.383,00	29.476.702.047,00	(11.721.165.664,00)	(39,76)
Belanja Gedung dan Bangunan	45.911.783.872,00	25.014.924.501,26	20.896.859.370,74	83,54
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	73.469.155.847,00	24.660.329.503,00	48.808.826.344,00	197,92
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.548.129.750,00	7.952.813.327,00	(3.404.683.577,00)	(42,81)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>141.684.605.852,00</b>	<b>87.104.769.378,26</b>	<b>54.579.836.473,74</b>	<b>62,66</b>

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas investasi TA 2022 sebesar Rp141.684.605.852,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.579.836.473,74 atau 62,66% dari Realisasi TA 2021. Berdasarkan proporsi belanja modal, maka arus kas TA 2022 terealisasi untuk pembayaran Belanja Peralatan Dan Mesin sebesar Rp17.755.536.383,00, Belanja Gedung Dan Bangunan sebesar Rp45.911.783.872,00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp73.469.155.847,00, dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.548.129.750,00.

**5.5.3 Arus Kas Bersih dari  
Aktivitas Pendanaan**

**Tahun 2022  
(Rp)  
83.185.750.711,00**

**Tahun 2021  
(Rp)  
(3.080.176.595,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

**Tabel 5. 99 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 dan 2021**

Aktivitas Pembiayaan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Masuk	83.185.750.711,00	0,00	100,00
Arus Kas Keluar	0,00	3.080.176.595,00	(100,00)
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>83.185.750.711,00</b>	<b>(3.080.176.595,00)</b>	<b>(2.800,68)</b>

Realisasi Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada TA 2022 sebesar Rp83.185.750.711,00 sedangkan realisasi TA 2021 sebesar (Rp3.080.176.595,00) yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

**5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari  
Aktivitas Pendanaan**

**Tahun 2022  
(Rp)  
83.185.750.711,00**

**Tahun 2021  
(Rp)  
0,00**

Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan pada TA 2022 adalah Rp83.185.750.711,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan berasal dari Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

<b>5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>0,00</u>	<u>3.080.176.595,00</u>

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun 2022 adalah NIHIL.

<b>5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

**Tabel 5. 100 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021**

Aktivitas Non Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Masuk	37.017.934.559,00	28.101.388.156,46	31,73
Arus Kas Keluar	37.017.934.559,00	28.101.388.156,46	31,73
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas Transitoris TA 2022 sebesar Nihil. Hal ini dapat dirincikan sebagai berikut:

<b>5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
	<u>37.017.934.559,00</u>	<u>28.101.388.156,46</u>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2022 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp35.979.742.641,00, pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp693.735.612,00, Pengembalian Belanja (*Contra Post*) sebesar Rp249.356.606,00, dan pengembalian sisa Tambahan Uang (TU) Tahun 2022 sebesar Rp95.099.700,00.

Untuk penerimaan PFK sebesar Rp35.979.742.641,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 101 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga BUD TA 2022**

PFK	Jumlah (Rp)
Iuran Wajib Pegawai 8%	2.058.580.426,00
Iuran Wajib Pegawai 1%	8.158.466.307,00
PPh pasal 21	6.297.664.270,00
PPh Pasal 22	544.693.007,00
PPh Pasal 23	197.899.534,00
PPh Pasal 4 Jasa Konstruksi	2.086.559.210,00
PPN	16.635.879.887,00
<b>Total</b>	<b>35.979.742.641,00</b>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

**5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari  
Aktivitas Transitoris**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>37.017.934.559,00</b>	<b>28.101.388.156,46</b>

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2022 digunakan untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp35.979.742.641,00, pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp693.735.612,00, Pengembalian Belanja (*Contra Post*) sebesar Rp249.356.606,00, dan pengembalian sisa Tambahan Uang (TU) Tahun 2022 sebesar Rp95.099.700,00.

Untuk pengeluaran PFK sebesar Rp35.979.742.641,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5. 102 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga BUD TA 2022**

PFK	Jumlah (Rp)
luran Wajib Pegawai 8%	2.058.580.426,00
luran Wajib Pegawai 1%	8.158.466.307,00
PPh pasal 21	6.297.664.270,00
PPh Pasal 22	544.693.007,00
PPh Pasal 23	197.899.534,00
PPh Pasal 4 Jasa Konstruksi	2.086.559.210,00
PPN	16.635.879.887,00
<b>Total</b>	<b>35.979.742.641,00</b>

**5.5.5 Saldo Akhir Kas**

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>87.156.069.140,18</b>	<b>92.628.827.506,39</b>

Saldo Akhir Kas pada tahun anggaran berkenaan adalah kenaikan/penurunan bersih kas selama tahun anggaran berkenaan ditambah saldo awal kas. Pada Tahun Anggaran 2022, Saldo Akhir Kas adalah sebesar Rp87.156.069.140,18, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5. 103 Saldo Akhir Kas TA 2022 dan 2021**

Arus Kas	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
	<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>92.628.827.506,39</b>	
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(3.159.715.304,21)</b>	<b>5.261.509.992,88</b>	<b>(160,05)</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>87.156.069.140,18</b>	<b>92.628.827.506,39</b>	<b>(5,88)</b>
- Kas di RKUD	57.000.948.549,82	60.193.571.271,19	(5,30)
- Kas di BLUD	29.919.976.562,36	31.974.746.540,20	(6,43)
- Kas di Bendahara FKTP	145.688.554,00	387.367.921,00	(62,39)
- Kas di Bendahara Dana BOS	11.916.306,00	40.588.400,00	(70,64)
- Kas di Bendahara Pengeluaran	5.350.000,00	0,00	100,00
- Kas Lainnya	24.435.618,00	31.139.374,00	(21,53)
- Kas di Bendahara Penerimaan	47.753.550,00	1.414.000,00	3.277,20
- Setara Kas	0,00	0,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kota Sibolga merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD di Kota Sibolga. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 104 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Ekuitas Awal	<b>1.616.146.509.073,86</b>	<b>1.643.148.687.553,96</b>	<b>(27.002.178.480,10)</b>
2	Surplus/Defisit LO	(39.218.187.262,49)	(27.647.835.142,76)	(11.570.352.119,73)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>				
3	Koreksi Nilai Persediaan	241.934.965,00	6.623.946,10	235.311.018,90
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Nilai Pendapatan	0,00	0,00	0,00
6	Koreksi Nilai Piutang	719.463.464,60	355.184.807,06	364.278.657,54
7	Koreksi Nilai Utang	(9.040.346,00)	4.059.399,00	(13.099.745,00)
8	Koreksi Nilai Aset Tetap	731.537.353,00	209.044.389,00	522.492.964,00
9	Koreksi ekuitas lainnya	64.236.336,55	70.744.121,50	(6.507.784,95)
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>1.578.676.453.584,52</b>	<b>1.616.146.509.073,86</b>	<b>(37.495.561.226,34)</b>

Rincian Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

## 5.7 Pengungkapan Lain-lain

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain atas pos-pos laporan keuangan yang perlu dikemukakan.





## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Kota Sibolga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Sebagai daerah otonom, Pemerintahan Kota Sibolga terdiri dari Walikota Sibolga sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga sebagai lembaga legislatif. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Perangkat Daerah. DPRD Kota Sibolga terdiri dari 20 orang anggota, dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua, merupakan hasil pemilihan umum Tahun 2019.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pembagian urusan mencakup sebagai berikut:

#### **A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Sosial.

#### **B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar**

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Statistik;



- 15) Persandian;
  - 16) Kebudayaan;
  - 17) Perpustakaan;
  - 18) Kearsipan.
- C. Urusan Pemerintahan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan;
  - 2) Pariwisata;
  - 3) Pertanian;
  - 4) Kehutanan;
  - 5) Energi dan Sumberdaya Mineral;
  - 6) Perdagangan;
  - 7) Perindustrian.
- D. Penunjang Urusan Pemerintahan
- 1) Perencanaan;
  - 2) Keuangan;
  - 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - 4) Penelitian dan Pengembangan;
  - 5) Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 6) Fungsi Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- E. Kewilayahan
- 1) Kewilayahan.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026, yang telah diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 41, yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- 3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- 4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;



- 8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sibolga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi Kota Sibolga yaitu “**MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR**”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemko Sibolga, terutama di bidang pengelolaan keuangan Daerah, dapat disampaikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

### **1. Organisasi**

Struktur Organisasi Pemko Sibolga diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

### **2. Kebijakan**

Dasar pengelolaan Keuangan Daerah Pemko Sibolga dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum Perda Nomor 9 Tahun 2009 diundangkan, secara yuridis formal pengelolaan keuangan daerah Pemko Sibolga didasarkan pada Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang masih didasarkan pada Kepmendagri Nomor 20 Tahun 2004. Di bidang pengelolaan barang daerah telah diundangkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah melalui pelaksanaan turunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Pemko Sibolga mempersiapkan kebijakan dan regulasi berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntansi tersebut yaitu sebagai berikut :

- a) Peraturan Walikota Sibolga Nomor 900/09/2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga,
- b) Peraturan Walikota Sibolga Nomor 09 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan Walikota Nomor 900/10/ Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sibolga,
- c) Peraturan Walikota Nomor 900/34/2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Sibolga



### **3. Personalia**

Pemerintah Kota Sibolga selama Tahun anggaran 2022 telah melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan personalia yaitu :

- a. Pergantian manajemen/mutasi beberapa Pejabat dan staf .
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan singkat oleh OPD untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam hal pengelolaan keuangan.

### **4. Perencanaan**

Perencanaan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2022 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. RKA yang berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dituangkan dalam RKA berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. Setelah APBD ditetapkan, kegiatan masing-masing OPD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

### **5. Pelaksanaan**

Pelaksanaan anggaran Tahun berikutnya diharapkan agar menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **6. Pelaporan**

Penyampaian laporan realisasi anggaran berupa penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran masih ada yang terlambat. Demikian juga dengan penyampaian laporan realisasi pengadaan barang oleh OPD sebagai pengguna barang masih ada yang terlambat. Hal ini tentunya menghambat penyampaian laporan keuangan OPD dengan tepat waktu.

### **7. Pengawasan**

Pengawasan atas setiap kegiatan pada setiap OPD dilaksanakan secara melekat oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran. Setiap pimpinan OPD berkewajiban mengawasi, mengkoordinasikan, mengadakan rapat berkala, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Sebaliknya bawahan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan-laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Pengawasan secara intern terhadap setiap kegiatan dilakukan oleh Inspektorat Kota Sibolga sebagai lembaga pengawasan fungsional intern Kota Sibolga dan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pemeriksaan terhadap kegiatan setiap OPD dilakukan oleh aparat fungsional pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh BPK ini merupakan pemeriksaan yang akan memberikan penilaian atas kewajaran Laporan Keuangan yang disajikan, termasuk Laporan Keuangan Pemko Sibolga pada Tahun anggaran 2022 ini.



## BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan keuangan dari entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan Kota Sibolga juga melampirkan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sibolga.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan, terutama koordinasi antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel guna mendukung dan mewujudkan visi Kota Sibolga **“Sehat, Pintar dan Makmur”**.

Pencapaian target pendapatan Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar Rp660.855.544.276,00 dengan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp621.282.839.595,63 atau 94,01%. Realisasi tersebut



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2022**

---

mengalami kenaikan sebesar Rp 31.621.621.006,36 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2021 sebesar Rp589.661.218.589,27. Anggaran belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp823.827.845.243,00. Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp709.941.348.672,84 atau 86,18%, sehingga sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp113.886.496.570,16 atau 13,82%. Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp128.621.816.671,45 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp581.319.532.001,39. Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp621.282.839.595,63 dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp709.941.348.672,84, maka pada Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit sebesar (Rp88.658.509.077,21).

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp162.972.300.966,00 dengan realisasi sebesar Rp175.814.578.217,39 atau 107,88%. Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Nihil. Dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp175.814.578.217,39 yang berasal dari realisasi Penerimaan Pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp91.527.437.298,88 jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp84.287.140.918,51.

SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp87.156.069.140,18 yang berasal dari defisit sebesar (Rp88.658.509.077,21) dan pembiayaan netto sebesar Rp175.814.578.217,39. SiLPA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp5.472.758.366,21) atau (5,91%) dari SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp92.628.827.506,39.

Pemko Sibolga telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Kota Sibolga dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan TA 2022 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

**WALIKOTA SIBOLGA,**

**JAMALUDDIN POHAN**